



PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI



**Ali Nizar Fadholi | Achmad | Khoirul Holis
Moh. Hasibuddin | Muhammad**

Editor : Dr. Buna'I, S.Ag., M.Pd

Pengembangan

KURIKULUM PAI



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

Achmad, S.Pd.I | Khoirul Holis, S.Pd | Ali Nizar Fadholi, S.Pd |
Muhammad, S.Pd | Moh. Hasibuddin, S.H | Royhain Iqbal, S.Pd
| Mohammad Juhri, S.Pd | Didik Andriyanto, A. Ma., S. Pd. I |
Mulyadi, S.Pd | Syafiyqun Fawwaz, S.Pd | Sherly Quraisy, S.Pd |
Zainab Nurlaili, S.Pd | Fauzatul Jannah S.Pd | Atik Silvia, S.Pd |
Rahmawati, S. Pd | Mahfida Inayati, S.Pd



www.penerbitbukumurah.com

Pengembangan KURIKULUM PAI

Copyright @2023 By **Khoirul Holis, S.Pd. dkk.**
All rights reserved

ISBN : 978-623-499-405-6

QRCDN : 62-464-5916-921

15 x 23 cm, viii + 231 halaman

Cetakan ke-1, Juni 2023

Penulis

: Achmad, S.Pd.I | Khoirul Holis, S.Pd | Ali Nizar
Fadholi, S.Pd | Muhammad, S.Pd | Moh. Hasibuddin, S.H
| Royhain Iqbal, S.Pd | Mohammad Juhri, S.Pd | Didik
Andriyanto, A. Ma., S. Pd. I | Mulyadi, S.Pd | Syafiyqun
Fawwaz, S.Pd | Sherly Quraisy, S.Pd | Zainab
Nurlaili, S.Pd | Fauzatul Jannah S.Pd | Atik Silvia, S.Pd |
Rahmawati, S. Pd | Mahfida Inayati, S.Pd

Desain Sampul

: Aswan Kreatif

Tata Letak

: Tim KBM Indonesia Group

Editor Naskah

: Dr. Buna'I, S.Ag., M.Pd

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website : penerbitkbm.com | Email : naskah@penerbitkbm.com



www.penerbitbukumurah.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ketentuan pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Kata Pengantar

PUJI SYUKUR kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku bunga rampai hasil dari gagasan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Madura kelas A angkatan tahun 2022 dengan judul “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam” dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dibina oleh Dr. Bunai, S.Ag., M.Pd sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami karena bisa bekerja sama dengan baik dalam penyelesaian penyusunan buku bunga rampai ini.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Bunai, S.Ag., M.Pd yang telah sabar membimbing kami, serta kepada seluruh civitas akademika khususnya Direktur Pascasarjana IAIN Madura Bapak Dr. H. Atiqullah, M.Pd dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan buku bunga rampai ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura.

Pamekasan, 29 Mei 2023

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura Kelas A 2022



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

ORGANISASI KURIKULUM

PENDAHULUAN..... 1

PEMBAHASAN..... 2

 A. Pengertian Kurikulum 2

 B. Komponen-komponen kurikulum..... 3

 C. Analisis KD dan IPK..... 6

 D. Pengembangan Kurikulum kedalam Bahan Ajar 7

KESIMPULAN..... 8

DAFTAR PUSTAKA 8

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM RALP W. TYLER

PENDAHULUAN..... 11

PEMBAHASAN..... 12

 A. Definisi Kurikulum..... 12

 B. Model Pengembangan Kurikulum Ralp W. Tyler..... 13

KESIMPULAN..... 18

DAFTAR PUSTAKA 19

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM (Model Ralph Taylor, Hilda Taba, Dk Wheler, Beauchamp dan Roger)

PENDAHULUAN..... 21

PEMBAHASAN..... 22

 A. Pengembangan Kurikulum dan Urgensinya 22

 B. Model-Model Pengembangan Kurikulum 23

DAFTAR PUSTAKA 30

PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1

PENDAHULUAN..... 31

PEMBAHASAN..... 32

 A. Pendekatan Materi (*Content Based Approach*)..... 35

 B. Pendekatan Kompetensi (*Competence Based Approach*) 36

KESIMPULAN..... 40

DAFTAR PUSTAKA 40

PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2

PENDAHULUAN..... 43

PEMBAHASAN..... 44

 A. Pengertian Kurikulum 44

 B. Pendekatan Subjek Akademik 44

 C. Pendekatan Humanistik..... 47

Pengembangan Kurikulum PAI

D. Pendekatan teknologi.....	50
E. Pendekatan Rekonstruksi Sosial	52
KESIMPULAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

JENIS - JENIS KURIKULUM

PENDAHULUAN.....	57
PEMBAHASAN.....	59
A. Pengertian Kurikulum	59
B. Pengertian Kurikulum Tertulis	60
C. Pengertian Kurikulum Tersembunyi	63
KESIMPULAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

PENDAHULUAN.....	69
PEMBAHASAN.....	70
A. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum	70
KESIMPULAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DILIHAT DARI DESAIN DAN PELAKSANAANYA

PENDAHULUAN.....	79
PEMBAHASAN.....	80
A. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas	87
KESIMPULAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

PENDAHULUAN.....	93
PEMBAHASAN.....	94
A. Pengertian Kepala Sekolah	94
B. Syarat Kepala Sekolah.....	96
C. Tugas dan peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum.....	97
KESIMPULAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108

PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

PENDAHULUAN.....	111
PEMBAHASAN.....	112
A. Guru Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional.....	112
B. Peranan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Desentralisasi.....	119
C. Hal-Hal Yang Harus dikuasai Seorang Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.....	121
KESIMPULAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123

EVALUASI KURIKULUM

PENDAHULUAN.....	125
PEMBAHASAN.....	127
A. Model Evaluasi Kurikulum PAI Dalam Pembelajaran	127
B. Kriteria Dan Pendekatan Evaluasi Kurikulum PAI	134
KESIMPULAN.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140

PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DI SEKOLAH INDONESIA

PENDAHULUAN..... 143

PEMBAHASAN..... 145

 A. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia Pra Kemerdekaan..... 146

 B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia Pada Masa Orde Lama..... 147

 C. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia Pada Masa Orde Baru..... 148

 D. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Indonesia pada Masa Reformasi..... 151

 E. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Masa New Normal . 153

KESIMPULAN..... 155

DAFTAR PUSTAKA 157

PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA

PENDAHULUAN..... 159

PEMBAHASAN..... 160

 A. Perkembangan Kurikulum Madrasah Sebelum Kemerdekaan..... 160

 B. Perkembangan Kurikulum Madrasah Setelah Kemerdekaan..... 165

KESIMPULAN..... 172

DAFTAR PUSTAKA 173

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI DI PTU DI INDONESIA

PENDAHULUAN..... 175

PEMBAHASAN..... 178

DAFTAR PUSTAKA 186

**PERKEMBANGAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
(PTAI) DI INDONESIA**

PENDAHULUAN	189
PEMBAHASAN.....	191
KESIMPULAN.....	198
DAFTAR PUSTAKA	198

**PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KKN_I (KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA)**

PENDAHULUAN.....	201
PEMBAHASAN.....	202
A. Konsep Kurikulum Berbasis KKN _I	202
B. Deskripsi Jenjang KKN _I	204
C. Langkah-Langkah Penerapan Kurikulum Berbasis KKN _I	209
D. Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis KKN _I	214
KESIMPULAN.....	218
DAFTAR PUSTAKA	219
BIODATA PENULIS.....	223



ORGANISASI KURIKULUM¹

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan, berisi rancangan pelajaran yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Adanya kurikulum sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pendidikan dikarenakan dalam kurikulum terdapat rancangan atau desain yang akan diterapkan bagi seluruh lapisan pendidikan.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kurikulum memiliki peran yang besar dalam pendidikan. Kurikulum terdiri dari beberapa tujuan, fungsi, komponen, dan manfaat. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai dengan adanya kurikulum, sementara fungsi merupakan kegunaan dari kurikulum yang itu berbeda tergantung objek yang menggunakannya. Sedangkan komponen adalah isi dari kurikulum yang terdiri dari tujuan, materi, strategi/metode, dan evaluasi.

Jika kita kaitkan antara kurikulum dengan pembelajaran, maka kurikulum merupakan pedoman yang untuk di jalankannya

¹ Royhain Iqbal

sebuah pembelajaran, karena kurikulum memuat isi atau materi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Inilah mengapa kurikulum bisa dikatakan sebagai bahan ajar, karena fungsinya sebagai pedoman serta isi dari pembelajaran itu sendiri. Bahan ajar bisa diartikan sebagai perangkat ajar yang berupa materi pelajaran guna membahas pokok bahasan, bisa berupa cetak maupun non cetak.

Dengan demikian adanya kurikulum merupakan acuan dari berlangsungnya pembelajaran karena didalamnya terdapat bahan ajar yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Hal inilah yang menjadi alasan hubungan antara kurikulum dan bahan ajar.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum Menurut UU No. 20 Tahun 2003: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga

pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Pengertian kurikulum sangat luas dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kurikulum tidak dapat diungkapkan dalam satu pendapat yang dianggap baku, karena semua pendapat tersebut memiliki alasan masing-masing yang rasional. Dari beberapa uraian tersebut, sebagian menekankan pada isi atau mata pelajaran, sebagian lagi menekankan pada isi atau matapelajaran, sebagian lagi menekankan pada proses atau pengalaman, sedangkan pihak yang lain menekankan pada dua pendapat tersebut dalam artian menekankan pada isi atau mata pelajaran dan proses atau pengalaman.

B. Komponen-Komponen Kurikulum

1. Tujuan

Secara jelas tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sitem nilai pancasila di rumuskan dalam undang-undang No.20 tahun 2003, pasal 3, yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus di capai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan inidapat di definisikan sebagai kualifikasi yang harus di miliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang di rumuskan dalam bentuk kompetisi lulusan setiap jenjang pendidikan. Seperti misalnya. Standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.

Berikut contoh tujuan institusional, seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan Bab 5 pasal 26 yang menjelaskan bahwa Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

2. Materi

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran (Instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan sesuai dengan tujuan, silabus pelajaran, dan pengetahuan ilmiah.

Materi kurikulum mengandung aspek tertentu sesuai dengan tingkat tujuan kurikulum, yang meliputi teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Kriteria untuk memilih isi materi kurikulum yang relevan harus memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Materi harus benar dan signifikan, artinya menggambarkan pengetahuan mutakhir.
- b. Relevan dengan kenyataan sosial dan kultur agar anak lebih memahaminya.
- c. Materi harus seimbang antara keluasan dan kedalaman.
- d. Materi harus mencakup berbagai ragam tujuan.
- e. Sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik.
- f. Materi harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik.

3. Strategi

Strategi diartikan sebagai rancangan kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu seperti yang diharapkan.² Dengan adanya strategi kita bisa mengatur alur dari

² Sudirman, "Strategi Implementasi Kurikulum: Suatu Kajian Perspektif Teori Di Sekolah Dasar," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 938.

pembelajaran, karena kita bisa memilih akan seperti apa konsep pembelajaran yang akan diterapkan selama di dalam kelas. Kemudian bisa dikatakan apakah strategi ini berhasil atau tidak jika diterapkan selama pembelajaran berlangsung.

4. Evaluasi

Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru dan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dibuat keputusan kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan dan upaya bimbingan yang diperlukan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhirdari proses pengembangan kurikulum Penilaian terhadap Input pelajaran(semua SDA sebelum menempuh program berupa dana, sarana prasarana dan siswa.), Proses pembelajaran, *Output* pembelajaran (Penilaian terhadap lulusan pendidikan) dan *Outcome* pembelajaran (Kemampuan lulusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab). Evaluasi kurikulum harus mencakup:

- a. Menilai pencapaian tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Bagaimana metode yang digunakan dalam kurikulum itu efektif atau tidak sehingga bisa mempermudah ketercapaian tujuan.
- c. Melihat pengaruh kurikulum itu pada prestasi dan sikap peserta didik, apakah kemajuan dan perkembangan mereka baik atau buruk.³

³ Sarudin, "Komponen-Komponen Kurikulum," *Puslitbang: Pendidikan Agama Dan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, n.d: 16.

C. Analisis KD dan IPK

1. Kompetensi Dasar

- a. Untuk Mata pelajaran Akidah Akhlak, al-Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab, menyalin KD sesuai dengan KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.
- b. Untuk mata pelajaran selain yang disebutkan di atas, termasuk PAI pada sekolah, dapat menyalin KD sesuai dengan lampiran Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.

2. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan ciri pencapaian kompetensi dasar. Indikator ini dinyatakan secara spesifik dan operasional. Spesifik berhubungan dengan kekhususan satu kompetensi, tidak bergabung dengan yang lain. Operasional berhubungan dengan keterukuran kompetensi yang akan dicapai.

Indikator pada hakikatnya adalah ukuran, karakteristik, ciri- ciri, pembuatan atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Oleh karena itu indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, seperti: mengidentifikasi, membedakan, menghitung, menyimpulkan, menceritakan kembali, mempraktekkan, mendemonstrasikan, dan mendeskripsikan.

Guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi dua atau lebih indikator pencapaian hasil belajar. Hal ini sesuai dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut. Pemilihan kata kerja operasional untuk perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi dapat menggunakan versi Bloom-Andersen, sebagaimana terlampir.⁴

⁴ Rudi Ahmad Suryadidan and Aguslani Mushlih, *Desain Dan Perencanaan Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 90-91.

Dalam Kurikulum 2013 (K-13), IPK adalah (a) kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-1 dan KI-2, dan (b) kemampuan yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-3 dan KI-4.⁵

D. Pengembangan Kurikulum Kedalam Bahan Ajar

Kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan pembelajaran yang didalamnya terdapat isi, dan bahan dari suatu pelajaran, sehingga menjadi pedoman dalam kegiatan melaksanakan tujuan pembelajaran.⁶ Salah satu upaya dalam pengembangan kurikulum perlu dilakukan pengorganisasian dan desain kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah bentuk penyusunan bahan ajar atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.

Dengan adanya pengorganisasian kurikulum, diharapkan kurikulum akan memenuhi berbagai kebutuhan, tuntutan, harapan, permasalahan yang dialami peserta didik, pendidik, maupun masyarakat. Selain pengorganisasian kurikulum perlu dilakukan perencanaan, validasi, implementasi dan evaluasi yang merupakan bagian dari desain kurikulum. Dalam mendesain kurikulum harus memerhatikan berbagai prinsip yang dijadikan acuan. Dengan memahami organisasi dan desain pengembangan kurikulum, sebuah lembaga akan mampu mengorganisasi dan mendesain kurikulum yang digunakannya dengan sedemikian baik agar dapat membawa lembaga atau sekolahnya kepada pencapaian tujuan pendidikan yang ditentukan.⁷

Pengembangan kurikulum ke dalam bahan ajar adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat

⁵ Muhammad, *Pembelajaran SKI Di Madrasah Kiat Praktis Desain Instruksional* (Mataram: Sanabil, 2020): 61.

⁶ Sari Damara Gita, Muhsinah Annisa, and A. Wilda Indra Nanna, "Pengembangan Modul Ipa Materi Hubungan Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Berbasis Pendekatan Kontekstual," *LENSA: Jurnal Pendidikan IPA* 8, no. 1 (2018): 29.

⁷ Wahyu Aprilia, "Organisasi Dan Desain Pengembangan Kurikulum," *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 210-211.

menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁸

KESIMPULAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum terdapat beberapa komponen yaitu tujuan, materi, strategi dan evaluasi. Kompetensi inti yang terdapat dalam kurikulum merupakan tujuan utama yang ingin di capai selama pembelajaran sementara kompetensi dasar merupakan sub pembahasan dari kompetensi itu sendiri. Kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari masing masing lembaga selama hal tersebut bisa di sesuaikan dan tidak keluar dari tujuan utama yang telah ditentukan.

Dalam tulisan ini, tentu tidak terlepas dari kekurangan. Penulis akan memperbaiki makalah ini sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran saran yang membangun agar bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Wahyu. “Organisasi Dan Desain Pengembangan Kurikulum.” *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020).
- Gita, Sari Damara, Muhsinah Annisa, and A. Wilda Indra Nanna. “Pengembangan Modul Ipa Materi Hubungan MakhluK Hidup Dan Lingkungannya Berbasis Pendekatan Kontekstual.” *LENSA: Jurnal Pendidikan IPA* 8, no. 1 (2018).
- Muhammad. *Pembelajaran SKI Di Madrasah Kiat Praktis Desain Instruksional*. Mataram: Sanabil, 2020.

⁸ Muhammad Rouf, Akhmad Said, and Dedi Eko Riyadi HS., “Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Model Dan Implementasi,” *Jurnal Al-Ibrah* 5, no. 2 (2020): 26.

- Rouf, Muhammad, Akhmad Said, and Dedi Eko Riyadi HS. "Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Model Dan Implementasi." *Jurnal Al-Ibrah* 5, no. 2 (2020).
- Sarudin. "Komponen-Komponen Kurikulum." *Puslitbang: Pendidikan Agama Dan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, n.d.
- Sudirman. "Strategi Implementasi Kurikulum: Suatu Kajian Perspektif Teori Di Sekolah Dasar." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019).
- Suryadidan, Rudi Ahmad, and Aguslani Mushlih. *Desain Dan Perencanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM RALP W. TYLER⁹

PENDAHULUAN

Kurikulum tentunya memiliki kedudukan yang sentral dan strategis dalam sebuah proses pendidikan kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan, guna mencapai tujuan. Dalam menerapkan kurikulum, sebuah Negara tentu memiliki model pengembangannya masing-masing. Melalui adanya pengembangan kurikulum, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum, atau sebagai acuan untuk memahami penerapan kurikulum.

Selain itu, pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap institusi pendidikan. Hal ini dimaksudkan ada proses dan hasil pendidikan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dan zaman.

Salah satu model pengembangan kurikulum yang pertama dan sering digunakan dalam mengembangkan suatu kurikulum adalah Model Ralp W. Tyler, karena dianggap paling rasional.

⁹ Mohammad Juhri

Sehingga model ini sering disebut sebagai pandangan klasik dalam menyusun kurikulum.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Definisi Kurikulum

Kurikulum secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*curir*” yang artinya “pelari” dan “*curere*: yang diartikan sebagai “tempat berlari”. Secara istilah kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹¹ Dengan demikian kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari untuk mencapai garis finish.¹²

Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum memiliki berbagai variasi. Kurikulum diartikan mulai dari yang sangat sederhana, yakni sebagai kumpulan sejumlah mata pelajaran sampai dengan kurikulum sebagai kegiatan sosial. Kurikulum menurut Mac Donald dalam Widyastono menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses belajarmengajar agar berlangsung secara efektif dan efisien.¹³

Berdasarkan pengertian kurikulum di atas, maka kurikulum secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rencana tentang kegiatan pendidikan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara-cara untuk mencapai tujuan pendidikan.

¹⁰ Ella Yulaewati, *Kurikulum Dan Pembelajaran Filosofi Teori Dan Aplikasi* (Pakar Raya, 2019).

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Angka (19)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2003).

¹² Zainal Arifin, *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 2.

¹³ Harry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah Dari Kurikulum 2004, 2006, Ke Kurikulum 2013*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 2.

Di samping itu, untuk menerapkan suatu kurikulum, tentu memiliki model pengembangannya masing-masing. Adanya berbagai model pengembangan kurikulum, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum, atau sebagai acuan untuk memahami penerapan kurikulum. Salah satu model pengembangan kurikulum yang sering dipakai adalah Model Pengembangan Kurikulum Ralp W. Tyler. Maka dari itu, dalam jurnal ini menggunakan model pengembangan kurikulum Tyler sebagai sebuah acuan untuk mengembangkan kurikulum bahkan rencana pembelajaran.

B. Model Pengembangan Kurikulum Ralp W. Tyler

1. Kurikulum Menurut Tyler

Langkah-langkah pengembangan kurikulum pendidikan di berbagai Negara sangat dipengaruhi oleh empat pertanyaan yang diajukan oleh Tyler. Ke-empat pertanyaan ini merupakan parameter penyusunan kurikulum.¹⁴ Menurut Tyler, ada empat pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab dalam pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

- a. Tujuan pendidikan apa yang harus dicapai sekolah?
- b. Pengalaman pendidikan apakah yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
- c. Bagaimana pengalaman pendidikan ini dapat dikelola secara efektif?
- d. Bagaimana kita dapat memutuskan bahwa tujuan pendidikan ini telah tercapai?¹⁵

Beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh Tyler tersebut, merupakan sebuah konsep pemikiran Tyler dalam mengembangkan kurikulum. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka ada empat langkah dalam mengembangkan kurikulum,

¹⁴ *Ibid.* 41.

¹⁵ Ralp W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (USA: The University of Chicago Press, 2018), 1.

yakni merumuskan tujuan, merumuskan pengalaman belajar, mengelola pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Bila digambarkan sebagai berikut.¹⁶

2. Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum

Langkah-langkah pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh empat langkah Tyler seperti yang telah diuraikan sebelumnya, meliputi:

a. Merumuskan Tujuan

Merumuskan tujuan dalam konsep pemikiran Tyler adalah merumuskan tujuan pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, merumuskan tujuan pendidikan merupakan suatu tindakan atau langkah pertama yang harus dilakukan karena dengan menentukan tujuan sama dengan menentukan arah atau sasaran pendidikan.¹⁷ Tujuan pendidikan merupakan sasaran yang harus dicapai dalam program pendidikan. Merumuskan tujuan kurikulum sangat tergantung dari filsafat dan teori pendidikan yang dianut.¹⁸ Menurut Tyler ada tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tujuan pendidikan, yaitu mempelajari hakikat peserta didik, kehidupan masa kini di luar sekolah, dan pendapat para ahli tentang tujuan pendidikan.

b. Menyusun Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar perlu disusun agar para guru mendapatkan gagasan tentang rincian kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang akan dilakukan juga harus ditetapkan terlebih dahulu.

Pengalaman belajar bukan isi atau materi pelajaran dan bukan pula diartikan sebagai aktivitas guru dalam memberikan pelajaran. Dalam hal ini pengalaman belajar diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diperoleh oleh siswa bukan yang diperbuat oleh guru. Dari pengertian di atas maka dapat dipahami

¹⁶ Yulaewati, *Kurikulum Dan Pembelajaran Filosofi Teori Dan Aplikasi*.

¹⁷ Widayastono, *Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah Dari Kurikulum 2004, 2006, Ke Kurikulum 2013*.

¹⁸ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 82.

bahwa yang dimaksud dengan merumuskan pengalaman belajar adalah keaktifan siswa dalam belajar. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik (*student centered*). Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dan motivator.

Disamping itu, penentuan proses (pengalaman) pelajaran dilakukan untuk menentukan proses pembelajaran apa yang paling cocok dan sesuai dengan latar belakang kemampuan peserta didik.¹⁹ Karena dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara peserta didik dan lingkungannya serta dengan sumber belajar yang akan membentuk perilaku peserta didik. Dengan demikian, pemilihan ketepatan dalam menentukan/memilih proses pembelajaran sangat menentukan dalam mencapai tujuan.

c. Mengelola Pengalaman Belajar.

Pengelolaan pengalaman belajar siswa dalam hal ini mencakup pengalaman belajar suatu mata pelajaran maupun suatu program pembelajaran. Pengalaman belajar mencakup tahapan-tahapan belajar dan materi belajar. Dimana semua ini harus diorganisasikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam pencapaian tujuan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tyler:

*For educational experiences to produce a cumulative effect, they must be so organized as to reinforce each other. Organization is thus seen as an important problem in curriculum development because it greatly influence the efficiency changes are brought in the learner.*²⁰

Dengan demikian, pengorganisasian atau pengelolaan pengalaman belajar peserta didik merupakan hal yang sangat penting juga dalam mengembangkan kurikulum. Hal ini bisa

¹⁹ Tim Pengembangan MKDP, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 8.

²⁰ Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*.

mempengaruhi efisiensi pembelajaran dan perubahan tingkat mata pelajaran pokok yang akan diajarkan.

Pengelolaan pengalaman belajar siswa harus memperhatikan tiga prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Tyler:

There are three major criteria to be met in building an affectively organized group of learning experiences. These are continuity, sequence, and integration. Continuity refers to the vertical reorientation of major curriculum elements. Sequence as a criterion emphasizes the importance of having each successive experience build upon the preceding one but to go more broadly and deeply into matters involved. Integration refers to the horizontal relationship of curriculum experience. The organization of these experience should be such that they help the student increasingly to get a unified view and unify his behavior in relation to the elements dealt with.

Berdasarkan pendapat Tyler tersebut, maka prinsip-prinsip dalam mengelola pengalaman belajar tersebut adalah kontinuitas, urutan isi, dan integrasi. Kontinuitas dalam hal ini diartikan sebagai pengalaman belajar yang berkesinambungan dengan pengalaman belajar sebelumnya dan sesudahnya. Ini disebut dengan pengelolaan pengalaman secara vertikal.

Kemudian pengelolaan pengalaman belajar berdasarkan prinsip urutan isi adalah pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan tahapan perkembangan siswa tersebut. Menurut Yulaelawati, dalam menentukan urutan isi harus memperhatikan beberapa hal, seperti urutan isi pelajaran harus menyajikan urutan dari mudah ke sulit, permukaan ke lebih dalam, konkret ke lebih abstrak, dan tunggal ke lebih majemuk, dan lain sebagainya.²¹ Dengan demikian dalam mengurutkan isi pelajaran harus memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan.

²¹ Yulaewati, *Kurikulum Dan Pembelajaran Filosofi Teori Dan Aplikasi*.

Tidak asal menyusun isi, karena akan mempengaruhi pengalaman belajar anak.

Sementara prinsip integrasi diartikan sebagai pengalaman belajar yang bermanfaat untuk pengalaman belajar lainnya, dan kemudian pengalaman-pengalaman tersebut saling mengisi dan memberikan penguatan. Hal ini disebut oleh Tyler sebagai pengelolaan pengalaman belajar secara horizontal.

d. Menilai/ Evaluasi Pembelajaran.

Evaluasi dalam kurikulum dimaksudkan agar mampu menilai kesesuaian implementasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Tyler, menilai pembelajaran merupakan langkah akhir. Jenis penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan tujuan pendidikan. Maka, para pengembang kurikulum harus memperhatikan komponen-komponen dan prinsip-prinsip evaluasi yang sudah ada.²² Selain itu, dengan adanya evaluasi dapat menentukan apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, ataupun sebaliknya.

Jadi evaluasi pada kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana penggunaan kurikulum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan atau sejauh mana lembaga pendidikan mampu mencapai tujuan dari kurikulum yang ditetapkan.

Dalam menembangkan evaluasi, menurut Tyler sebaiknya memperhatikan dua hal berikut.

This conception of evaluation has two aspects. In the first place, it implies that evaluation must appraise the behavior of students since it is change in these behaviors which is sought in education. In the second place, it implies that evaluation must improve more than a single appraisal at any one time since to see whether change has taken place, it is necessary to make an appraisal at an early point and

²² MKDP, *Kurikulum Dan Pembelajaran*.

*other appraisals at later point's to identify changes that may be occurring.*²³

Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, yakni perubahan perilaku siswa dengan tujuan pendidikan, dan evaluasi menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu, maka akan tampak ada atau tidak adanya perubahan tingkah laku yang diharapkan yang memang sesuai dengan tujuan.

Dengan demikian dapat dibuat garis besar bahwa evaluasi ada dua fungsi, yakni fungsi evaluasi sumatif dan formatif. Fungsi evaluasi sumatif adalah tingkat ketercapaian tujuan oleh siswa, dan fungsi evaluasi formatif adalah evaluasi untuk melihat efektivitas proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap institusi pendidikan. Maka dari itu, untuk mengembangkannya diperlukan acuan atau kerangka yang disebut dengan model. Maka dari itu dalam mengembangkan suatu kurikulum mutlak memerlukan model pengembangan kurikulum.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat langkah menurut Tyler dalam mengembangkan kurikulum, yakni menentukan tujuan, menentukan pengalaman belajar, mengelola atau mengorganisasikan pengalaman, dan menilai/evaluasi pembelajaran.

Kemudian dapat diambil poin penting dari pemikiran Tyler dalam mengembangkan kurikulum ini adalah model pengembangan kurikulum ini menekankan pada bagaimana merancang suatu kurikulum disesuaikan dengan tujuan. Dengan sederhana dapat dipahami, bahwa mengembangkan kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan, visi, dan misi suatu lembaga penyelenggara pendidikan.

²³ Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hidayat, Sholeh. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- MKDP, Tim Pengembangan. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Angka (19)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2003.
- Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. USA: The University of Chicago Press, 2018.
- Widyastono, Harry. *Pengembangan Kurikulum Di Era Otonomi Daerah Dari Kurikulum 2004, 2006, Ke Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Yulaewati, Ella. *Kurikulum Dan Pembelajaran Filosofi Teori Dan Aplikasi*. Pakar Raya, 2019.

www.penerbitbukumurah.com
Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM (Model Ralph Taylor, Hilda Taba, Dk Wheler, Beauchamp dan Roger)²⁴

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan suatu rumusan yang sangat penting sebagai media penunjuk arah proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Demi mencapai pendidikan yang terbaru dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka diperlukan model-model pengembangan kurikulum, yang berfungsi menggiring pendidikan nasional berjalan menuju arah yang benar dan terus berkembang. Terdapat beberapa model-model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli, dimana model-model pengembangan kurikulum ini dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Beberapa ahli seperti Ralph Taylor, Hilda Taba, Dk Wheler, Beauchamp dan Roger, memiliki gagasan tersendiri untuk mengembangkan model kurikulum sebagai pengembangan kurikulum berdasarkan beberapa ahli yang mencakup ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Sesuai pendapat beberapa ahli yang disebut di atas.

²⁴ Ali Nizar Fadholi

PEMBAHASAN

A. Pengembangan Kurikulum dan Urgensinya

Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu.²⁵

Pengembangan kurikulum merupakan suatu upaya dalam melakukan pengembangan atau penyempurnaan dari sebuah kurikulum. Pada dasarnya kurikulum yang ada, tidak hanya bersifat diam, akan tetapi akan terbarukan sesuai zaman. Adanya pengembangan kurikulum ini sangat penting, karena dengan adanya pengembangan dalam kurikulum maka akan tercipta pendidikan yang continue sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Fondasi bangunan yang diibaratkan pada uraian di atas adalah dasar atau landasan dalam merancang sebuah kurikulum. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang, sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Seller dan Miller, sebagaimana dikutip oleh Sanjaya, mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus.²⁶

²⁵ Annisa Nurhidayati Mu'arif, dkk, "Pengembangan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 03. No. 01 (2021), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.164>.

²⁶ Annisa Nurhidayati Mu'arif, dkk.

B. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Model pengembangan kurikulum merupakan suatu model yang digunakan untuk melakukan pengembangan kurikulum, dimana model pengembangan kurikulum ini bertujuan sebagai variasi maupun suatu langkah penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh pribadi maupun pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan.

Terdapat banyak sekali model-model pengembangan kurikulum yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh pendidikan dunia. Kali ini kita akan membahas beberapa model pengembangan kurikulum yang ditawarkan oleh Ralph Taylor, Hilda Taba, Dk Wheler, Beauchamp dan Roger.

1. Model Pengembangan Kurikulum Raprl Taylor

Sebagai bapak pengembangan kurikulum, Tyler telah menanamkan atas perlunya hal yang rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Dalam bukunya yang berjudul *Basic Principiles Curriculum and Instruction* (1949), Tyler mencatat bahwa curriculum development weeded to be treated logically and systematically. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum, dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan.²⁷

Tyler tidak menyebutkan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kurikulumnya. Tyler hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Model pengembangan ini dapat dilihat pada tahapan berikut:

- a. Objectives (Tujuan pendidikan yang diharapkan).
- b. Selecting Learning Experiences (Menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud).

²⁷ Tatang Hidayat, Endis Firdaus, dan Momod Abdul Somad, "Model Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah," *Jurnal Kependidikan Islam* 05. No. 02 (Desember 2019).

- c. Organizing Learning Experiences (Mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan).
- d. Evaluation (Mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai)²⁸

2. Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba

Model kurikulum yang digunakan oleh Taba adalah model yang menggunakan induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental.²⁹

Dalam garis besarnya langkah-langkah dalam model Hilda Taba dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menentukan tujuan pendidikan, dengan langkah-langkah :
 - 1) Merumuskan tujuan umum
 - 2) Mengklasifikasi tujuan-tujuan
 - 3) Merinci tujuan-tujuan berupa pengetahuan (fakta ide, konsep), berpikir, nilai-nilai dan sikap, emosi dan perasaan, keterampilan.
 - 4) Merumuskan tujuan dalam bentuk yang spesifik.
- b. Mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar, dengan langkah-langkah :
 - 1) Mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa
 - 2) Mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial
 - 3) Menentukan keluasan dan kedalaman pembelajaran

²⁸ Tatang Hidayat, Endis Firdaus, dan Momod Abdul Somad.

²⁹ siti Anisatun Nafi'ah, "Model Pengembangan Kurikulumhilda Tabapada Kurikulum 2013 Di Sd/Mi," *Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar* 02. No. 01 (Januari-Juni2019).

- 4) Menentukan keseimbangan antara ruang lingkup dan kedalaman
- c. Mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar.
- 1) Menentukan organisasi kurikulum
 - 2) Menentukan urutan atau sequence materi kurikulum
 - 3) Melakukan pengintegrasian kurikulum
 - 4) Menentukan fokus pelajaran
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum
- 1) Menentukan kriteria penilaian
 - 2) Menyusun program evaluasi yang komprehensif
 - 3) Teknik pengumpulan data
 - 4) Interpretasi data evaluasi
 - 5) Menerjemahkan evaluasi ke dalam kurikulum³⁰

Dalam hal ini Hilda Taba lebih mengedepankan percobaan atau eksperimen untuk mendiagnosa hal-hal terkait kurikulum yang harus di evaluasi.

Ada delapan langkah yang digunakan dalam kegiatan unit eksperimen menurut Taba yaitu; mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan khusus, memilih isi, mengorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, melihat sekuen, dan keseimbangan.³¹

Selanjutnya menguji unit eksperimen, kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya pada kelas eksperimen tetapi diuji juga pada kelas atau tempat lain sehingga dapat diketahui tingkat validitas dan juga dapat memperoleh data untuk penyempurnaan. Setelah melakukan penyempurnaan atau revisi juga diadakan konsolidasi. Pada kegiatan ini dilakukan penarikan kesimpulan

³⁰ Yu'timaalahuyatazaka, "Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba dan Identifikasinya Dalam Kurikulum Pendidikan Islam," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 04. No. 02' (Agustus 2016).

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

yang bersifat umum, karena hasil dari kesimpulan tersebut belum tentu bisa digunakan di sekolah lain.³²

Setelah melakukan penarikan kesimpulan, dilaksanakan pengkajian oleh ahli kurikulum, tujuannya untuk mengetahui konsep yang digunakan sesuai atau tidak. Kemudian kurikulum diterapkan di daerah yang lebih luas tidak hanya di sekolah yang dilakukan eksperimen.³³

Sehingga dengan langkah ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pendidikan, fasilitas, hingga pembiayaan.

3. Model Pengembangan Kurikulum DK Wheeler

Wheeler mempunyai argument tersendiri agar pengembangan kurikulum dapat menggunakan lingkaran proses, artinya setiap elemen saling berkaitan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, dan suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Wheeler mengembangkan ide-idenya sebagaimana telah dilakukan oleh Tyler dan Taba. Wheeler menawarkan lima langkah yang saling keterkaitan dalam proses kurikulum.³⁴

Menurut Wheeler dalam mengembangkan kurikulum langkah yang dilakukan harus sistematis, karena bentuk dari setiap upaya akan berkaitan dan berurutan seperti keliling sebuah lingkaran. Artinya dengan suatu ketentuan dalam melakukan sebuah langkah-langkah tidak boleh ada lompatan ke step selanjutnya karena dalam step-stepnya berhubungan dan tidak bisa dilewati.

Lima langkah itu jika dikembangkan dengan logis dan temporer akan menghasilkan suatu kurikulum yang efektif.

³² Nana Syaodih Sukmadinata.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata.

³⁴ Nurul Aulia, "Model dan Strategi Pengembangan Kurikulum Agama Islam," *Jurnal STIT Lingga* 01. No. 01` (Februari 2020).

Wheeler mengembangkan lebih lanjut apa yang dilakukan Tyler dan Taba, meski hanya dipersentasikan agak berbeda. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Seleksi maksud, tujuan, dan sarasannya.
- b. Seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan dan sasaran.
- c. Seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan.
- d. Organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar
- e. Evaluasi setiap fase dan masalah tujuan-tujuan³⁵

Peranan Wheeler terhadap pengembangan kurikulum adalah terhadap hakikat lingkaran dari elemen-elemen kurikulum. Kurikulum proses disini tampak lebih sederhana serta bersifat berkelanjutan (continue) memiliki makna responsif terhadap perubahan-perubahan pendidikan yang ada yaitu selalu berkembang mengikuti zaman yang ada.

4. Model Pengembangan Kurikulum Beauchamp

George A. Beauchamp (1968) lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran.

Tahap perkembangan kurikulum model beauchamps's yaitu memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah-sekolah di daerah tertentu baik bersekala regional atau nasional yang disebut arena, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar, untuk tugas tersebut perlu dibentuk dewan kurikulum sebagai koordinator yang bertugas

³⁵ Nurul Aulia.

juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih materi pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, dimana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sekolah.³⁶

Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode beauchampini dikembangkan oleh Beauchampahli dibidang kurikulum hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. Lima tahap tersebut adalah:

- a. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. (Suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah-sekolah di daerah tertentu baik bersekala regional atau nasional yang disebut arena).
- b. Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum.
- c. Tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar-mengajar, untuk tugas tersebut perlu dibentuk dewan kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum, memilih materi pelajaran baru, menentukan berbagai kriteria untuk memilih kurikulum mana yang akan dipakai dan menulis secara menyeluruh mengenai kurikulum yang akan dikembangkan.

³⁶ Fatma Wati, Siti Kabariah, Dan Adiyono, "Penerapan Model-Model Pengembangan Kurikulum Di Sekolah," *Journal Of Education* 02. No. 04 (Oktober 2022).

- d. Implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Validasi Sekolah atau Guru
- e. Evaluasi kurikulum³⁷

5. Model Pengembangan Kurikulum Rogers

Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model Relasi Interpersonal Rogers. Ada empat langkah pengembangan kurikulum model Rogers diantaranya adalah:

- a. Diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan.
- b. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar.
- c. Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik dan lainnya.
- d. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah no. 3 dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Para ahli kurikulum Menetapkan coordinator kurikulum Implementasi Evaluasi³⁸

³⁷ Muhammad Rouf, Akhmad Said, Dan Dedi Eko Riyadi Hs., "Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Model Dan Implementasi," *Jurnal Al-Ibrah* 05. No. 02 (Desember 2020).

³⁸ Muhammad Rouf, Akhmad Said, Dan Dedi Eko Riyadi Hs.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nurhidayati Mu'arif, dkk. "Pengembangan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 03. No. 01 (2021). <https://doi.org/DOI: 10.31004/edukatif.v3i1.164>.
- Fatma Wati, Siti Kabariah, dan Adiyono. "Penerapan Model-Model Pengembangan Kurikulum di Sekolah." *Journal Of Education* 02. No. 04 (Oktober 2022).
- Muhammad Rouf, Akhmad Said, dan Dedi Eko Riyadi HS. "Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Model dan Implementasi." *Jurnal Al-Ibrah* 05. No. 02 (Desember 2020).
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nurul Aulia. "Model dan Strategi Pengembangan Kurikulum Agama Islam." *Jurnal STIT Lingga* 01. No. 01` (Februari 2020).
- Siti Anisatun Nafi'ah. "Model Pengembangan Kurikulumhilda Taba pada Kurikulum 2013 di SD/MI." *Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar* 02. No. 01 (Januari-Juni 2019).
- Tatang Hidayat, Endis Firdaus, dan Momod Abdul Somad. "Model Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah." *Jurnal Kependidikan Islam* 05. No. 02 (Desember 2019).
- Yu'timaalahuyatazaka. "Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba dan Identifikasinya Dalam Kurikulum Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 04. No. 02` (Agustus 2016).



PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1 ³⁹

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan satu komponen yang seharusnya ada dalam suatu lembaga-pendidikan, Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, baik pendidikan yang sifatnya umum maupun pendidikan Agama, Penyusunan kurikulum dilakukan oleh berbagai para pakar/ahli, ahli di bidang ilmu, tenaga pendidik, para pejabat pendidikan, serta unsur-unsur yang ada didalamnya.

Rancangan ini disusun tidak lain untuk memberikan suatu pedoman terhadap para pelaksana pendidikan, dalam hal proses pembinaan serta bimbingan perkembangan siswa guna mencapai tujuan sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dan kelas merupakan salah satu tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum di sekolah

Kurikulum Pendidikan Agama Islam-(PAI) mempunyai kedudukan yang sentral terhadap seluruh proses pendidikan, sebagai arah segala aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan.

³⁹ Achmad

Selain sebagai rencana pendidikan, kurikulum juga merupakan suatu pedoman dan juga pegangan terhadap jenis, ruang lingkup dan urutan isi serta strategi dalam proses pendidikan. Fungsi lainnya adalah menjadi sumber konsep serta landasan teoritis bagi para pengembangan kurikulum dalam institusi pendidikan.

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Oleh karenanya kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar program pendidikan dalam rangka perwujudan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam studi tentang kurikulum sering dipertanyakan jenis pendekatan yang dipergunakan dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum tersebut. Penggunaan suatu jenis pendekatan (approach) atau orientasi pada umumnya menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh kurikulum.⁴⁰ Dalam hal ini, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum merujuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang

⁴⁰ Nurul Huda, "Pendekatan–Pendekatan Pengembangan Kurikulum" II, no. September (2019): 175–97.

lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum.⁴¹

Kurikulum Pendidikan Agama Islam-(PAI) sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol dengan kurikulum pada umumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada isi/materi pelajarannya saja. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Majid, mengatakan bahwa, kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan rumusan tentang tujuan dan materi pelajaran, serta evaluasi pendidikan yang bersumber dari ajaran/syari“at Agama Islam.

Pada intinya ciri khas kurikulum dalam pendidikan Islam haruslah memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, setiap hal yang mempunyai keterkaitan dengan kurikulum, termasuk tujuan, isi, metode pembelajaran dan sebagainya yang berlaku dalam pendidikan haruslah berdasarkan agama dan akhlak islami serta terisi dengan ruh ajaran Islam. Hal inilah yang membedakan antara kurikulum Pendidikan Agama Islam-(PAI) dan pendidikan umum terletak pada konsepnya, yaitu proses pendidikan yang mengacu pada pembentukan manusia yang sempurna (insan al-kamil) berdasarkan prinsip ajaran Islam.⁴²

Kurikulum dikatakan baik dan relevan, bilamana dalam mencapai tujuan pendidikan Agama Islam adalah yang bersifat intergrated dan komprehensif serta mampu menjadikan Al-Qur“an dan Al-Hadits sebagai sumber utama didalam penyusunannya.

⁴¹ Abdurrahman Abdurrahman, “Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Sekolah Dasar,” *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33394/realita.v5i1.2898>.

⁴² Muhamad Ghazali Abdah, “Ragam Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI),” *Fondatia* 3, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158>.

Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah teknik pendekatan kurikulum yang serasi setelah mempertimbangkan keempat determinan ialah asas filosofis, sosiologis, psikologis dan hakekat ilmu pengetahuan yang merupakan pegangan umum.⁴³ Namun masih perlu lagi pegangan yang lebih rinci, yakni :

- a. Memilih pendekatan kurikulum yang serasi untuk mendesain kurikulum dengan mempertimbangkan keempat determinan itu,
- b. Berdasarkan pendekatan yang disiplin, menentukan mata pelajaran/mata kuliah yang akan disajikan, beserta bidang dan rangkaiannya yang dianggap dapat mencapai tujuan lembaga pendidikan itu.⁴⁴

Berbagai pendekatan kurikulum yang ada dewasa ini menurut beberapa tokoh ialah: Menurut Muhaimin Pendekatan Subjek Akademis (bidang studi). Pada pendekatan subyek akademik menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya PAI seperti yang lazim didapati dalam sistem pendidikan sekarang ini di semua sekolah dan perguruan tinggi. Prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu.⁴⁵

Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Para ahli akademis terus mencoba mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan, dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati, hubungan antara sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan

⁴³ Abdah.

⁴⁴ Huda, "Pendekatan–Pendekatan Pengembangan Kurikulum."

⁴⁵ Huda.

lebih dahulu mata pelajaran/mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu.⁴⁶

A. Pendekatan Materi (*Content Based Approach*)

Pendekatan yang beorientasi pada bahan (subject matter oriented). Kurikulum dengan pendekatan ini cenderung menekan kepentingan pencapaian target-target materi pelajaran, cenderung mengabaikan perubahan dan perkembangan perilaku secara utuh ke arah perubahan perilaku yang positif. Namun demikian, sejumlah kalangan masih meyakini bahwa pendekatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat pencapaian penguasaan materi pelajaran, sehingga berpengaruh besar terhadap kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dilihat dari pengelolaannya pengembangan kurikulum dibedakan antara sistem pengelolaan yang terpusat (sentralisasi), dan tersebar (desentralisasi). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah tahun 1968 dan 1975 bersifat sentralisasi, hanya ada satu kurikulum untuk satu jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Kurikulum bersifat nasional, seragam, dikembangkan oleh tim pusat, guru-guru hanya berperan sebagai pelaksana di sekolah, yakni menjabarkan rencana tahunan, caturwulan dan satuan pelajaran tiap pelajaran. Dalam kurikulum 1984 telah ada muatan lokal yang disisipkan pada berbagai bidang studi yang sesuai, dan hal ini lebih intersifkan lagi pelaksanaannya dalam kurikulum 1994. Dalam kurikulum 1994 muatan lokal tidak lagi disisipkan pada setiap bidang studi, tapi menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi, baik bidang studi wajib maupun pilihan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, kemungkinan muatan lokal akan lebih besar, modelnya lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi, sehingga pengelolaannya menjadi desentralisasi. Idealnya perimbangan muatan nasional dengan daerah antara 25%-40% nasional dan 60%-75% daerah. Dengan bobot muatan daerah atau lokal yang lebih besar berarti

⁴⁶ Muhamad Nur, "Penerapan Esp Di Perguruan Tinggi Umum (Non English Majors) Melalui Pendekatan Content-Based Instruction-Cbt," *Mabasan* 12, no. 1 (2018): 86–103, <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.39>.

pengembangan kurikulum lebih banyak dilakukan oleh tim pengembangan yang terdiri atas para ahli dan guru-guru di daerah. Kurikulum juga akan lebih banyak diwarnai oleh unggulan daerah, baik kekayaan, perkembangan maupun kebutuhan daerah. Model kurikulumnya akan beragam sesuai dengan tujuan, fungsi dan isi program pendidikan. Pengembangan kurikulum menjadi lebih berbasis daerah atau kewilayahan. Kurikulum yang demikian ada yang menyebutnya kurikulum berbasis masyarakat, ada juga yang menyebutnya kurikulum berbasis sekolah.⁴⁷

B. Pendekatan Kompetensi (*Competence Based Approach*)

Pendekatan yang berorientasi pada kompetensi (*competencies based curriculum*). Pendekatan ini lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pembelajaran. Dalam praktiknya, tidak dibenarkan melakukan lompatan kompetensi sebelum kompetensi dasar dikuasai pembelajar pada jenjang tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga tidak mengabaikan proses, sebab proses dipahami sebagai bagian dari kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran.⁴⁸

Menurut Crunkilton (1979 : 222) dalam Mulyasa, (2004 : 77) mengemukakan bahwa “kompetensi ialah sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat hubungan (link) antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh kerja.⁴⁹

⁴⁷ Abdah, “Ragam Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI).”

⁴⁸ Nur, “Penerapan Esp Di Perguruan Tinggi Umum (Non English Majors) Melalui Pendekatan Content-Based Instruction-Cbt.”

⁴⁹ Arifatud Dina, Venissa Dian Mawarsari, and Rohmat Suprpto, “Implementasi Kurikulum 2013 Pada Perangkat Pembelajaran Model Discovery Learning Pendekatan

Pendekatan kompetensi merupakan pendekatan pengembangan kurikulum yang memfokuskan pada penguasaan kompetensi tertentu berdasarkan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Setiap tahap perkembangan memiliki sejumlah potensi bawaan yang dapat dikembangkan, tetapi pemekarannya sangat tergantung pada kesempatan yang ada dan kondisi lingkungannya. Pendidikan merupakan lingkungan utama yang memberikan kesempatan dan dukungan bagi perkembangan potensi-potensi peserta didik.

Setiap peserta didik memiliki potensi bawaan sendiri-sendiri, meskipun aspek-aspek perkembangannya sama tetapi tingkatannya berbeda-beda. Seorang peserta didik memiliki kemampuan berpikir matematis yang tinggi, tetapi peserta didik lain berpikir ekonomi, politik, keruangan, keterampilan sosial, atau komunikasi yang tinggi. Guru-guru diharapkan dapat mengenali dan memahami potensi-potensi, terutama potensi-potensi tinggi yang dimiliki peserta didiknya. Dengan bekal pemahaman tersebut, mereka diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi-potensi peserta didik sehingga dapat berkembang secara optimal.

Menurut Gordon, (1998 : 109) dalam Mulyasa, (2004 : 77-78) menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut

Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁰

Scientific Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Geometri SMK," *Jurnal Karya Pendidikan Matematika 2*, no. 1 (2015): 22–31,
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JPMat/article/view/1830>.

⁵⁰ <https://disdikbb.org/news/antara-kurikulum-terpisah-dan-kurikulum-integratif/>

1. Pemahaman (*understanding*) yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu.
2. Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
3. Sikap (*attitude*) yaitu (senang atau tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi
4. terhadap suatu rangsangan terhadap yang datang dari luar.

Minat (*interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Berdasarkan gambaran kompetensi di atas. Maka kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tersebut.

Dengan demikian penerapan kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, serta memberanikan diri berperan dalam berbagai kegiatan di sekolah maupun masyarakat (Mulyasa, 2002 : 39).

Pendekatan Intregatif: Gabungan dari kedua pendekatan tersebut

Kurikulum integratif (*integrative curriculum*) memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu kesatuan. Kurikulum ini meniadakan batas-batas mata pelajaran. Unit-unit disatukan dalam kesamaan tema dengan isi materi yang saling berkaitan. Tema diisi dengan sejumlah materi yang ada kaitannya dengan lingkungan, antara lain cara memelihara kesehatan lingkungan, makhluk hidup dalam suatu lingkungan, cara berbahasa, atau kebiasaan berolahraga.

Pengorganisasian kurikulum ini pada umumnya digunakan pada satuan pendidikan jenjang SD/MI dengan istilah pendekatan tematik. Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan pada satuan

pendidikan jenjang SD/MI untuk mengorganisasikan pendekatan pembelajarannya sesuai dengan konteks yang dihadapi. Organisasi pembelajaran tidak lagi diarahkan hanya menggunakan pendekatan tematik seperti yang selama ini diterapkan oleh sebagian besar satuan pendidikan jenjang SD/MI. Satuan pendidikan jenjang SD/MI dapat menerapkan organisasi pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan mata pelajaran ataupun melanjutkan penggunaan pendekatan tematik.⁵¹

Pembelajaran dengan pendekatan tematik adalah bentuk pendekatan pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dari beberapa materi atau pelajaran menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Dengan penerapan pendekatan ini terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.⁵²

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau beberapa mata pelajaran. Melalui pendekatan pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Dalam pembelajaran tematik, belajar diharapkan tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui (*learning to know*), tetapi belajar juga untuk melakukan (*learning to do*), untuk menjadi (*learning to be*), dan untuk hidup bersama (*learning to live together*).⁵³

⁵¹ delora Jantung Amelia Ichsan Anshory, Setiya Yunus Saputra, "Pembelajaran Tematik Integratif Pada Kurikulum 2013 Di SD Kelas Rendah," *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)* 4, no. 1 (2018): 35.

⁵² <https://disdikbb.org/news/antara-kurikulum-terpisah-dan-kurikulum-integratif/>

⁵³ Angga Angga et al., "Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Kabupaten Garut," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 5877–89, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>.

KESIMPULAN

Pendekatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran hampir secara keseluruhan telah menggunakan pendekatan kompetensi dalam proses pembelajaran ada sebagian kecil yang belum menggunakan pendekatan kompetensi dalam proses pembelajaran

Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Pendekatan Kurikulum ditinjau dari perspektif pendekatan, dalam dua pendekatan yang telah dikemukakan.

Pendekatan pertama, pendekatan yang berorientasi pada bahan (subject matter oriented). Kurikulum dengan pendekatan ini cenderung menekan kepentingan pencapaian target-target materi pelajaran, cenderung mengabaikan perubahan dan perkembangan perilaku secara utuh ke arah perubahan perilaku yang positif.

Kedua, Pendekatan yang berorientasi pada kompetensi (competencies based curriculum). Pendekatan ini lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pembelajaran. Dalam praktiknya, tidak dibenarkan melakukan lompatan kompetensi sebelum kompetensi dasar dikuasai pembelajar pada jenjang tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga tidak mengabaikan proses, sebab proses dipahami sebagai bagian dari kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdah, Muhamad Ghazali. "Ragam Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)." *Fondatia* 3, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.158>.
- Abdurrahman, Abdurrahman. "Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Di Sekolah Dasar." *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 1 (2020).

<https://doi.org/10.33394/realita.v5i1.2898>.

- Angga, Angga, Cucu Suryana, Ima Nurwahidah, Asep Herry Hernawan, and Prihantini Prihantini. “Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Kabupaten Garut.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 5877–89. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>.
- Dina, Arifatud, Venissa Dian Mawarsari, and Rohmat Suprpto. “Implementasi Kurikulum 2013 Pada Perangkat Pembelajaran Model Discovery Learning Pendekatan Scientific Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Geometri SMK.” *Jurnal Karya Pendidikan Matematika* 2, no. 1 (2015): 22–31. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JPMat/article/view/1830>.
- Huda, Nurul. “Pendekatan–Pendekatan Pengembangan Kurikulum” II, no. September (2019): 175–97.
- Ichsan Anshory, Setiya Yunus Saputra, delora Jantung Amelia. “Pembelajaran Tematik Integratif Pada Kurikulum 2013 Di SD Kelas Rendah.” *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)* 4, no. 1 (2018): 35.
- Nur, Muhamad. “Penerapan Esp Di Perguruan Tinggi Umum (Non English Majors) Melalui Pendekatan Content-Based Instruction-Cbt.” *Mabasan* 12, no. 1 (2018): 86–103. <https://doi.org/10.26499/mab.v12i1.39>.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2 ⁵⁴

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan suatu rumusan yang sangat penting demi tercapainya suatu tujuan pendidikan dan juga sebagai alat atau media atau petunjuk arah suatu proses belajar mengajar guna memenuhi standart pendidikan Nasional.

Demi tercapainya suatu pendidikan perlu kita pelajari tentang sejarah singkat perkembangan kurikulum di Indonesia diturunkan dari buku lima puluh tahun pendidikan Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional tahun 1996. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 hingga saat ini menjadi kurikulum merdeka belajar. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan implikasi dari terjadinya perubahan system politik, social budaya, ekonomi dan perkembangan iptek.

Kurikulum sebagai salah satu instrumental input dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dikembangkan secara

⁵⁴ Didik Andrianto

dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Semua kurikulum nasional dikembangkan mengacu pada landasan yuridis Pancasila dan UUD 1945, perbedaan tiap kurikulum terletak pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan dan pendekatan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum

Para ahli kurikulum terdapat perbedaan dalam memberikan definisi mengenai kurikulum. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda yang mendasari pemikiran mereka.

Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dan digunakan dalam bidang olahraga. Secara etimologis *Curriculum* yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.⁵⁵

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

B. Pendekatan Subjek Akademik

Penyusunan kurikulum dalam pendekatan subjek akademis didasari oleh sistematisasi ilmu tertentu yang memiliki perbedaan dengan sistematisasi ilmu lainnya. Adapun pendapat lain mengungkapkan bahwa pendekatan subjek akademis merupakan pendekatan yang bersumber dalam sistematisasi disiplin ilmu masing-masing yang berlainan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Pada proses pengembangannya, hal pertama yang dilakukan ialah menentukan mata pelajaran apa yang diharuskan untuk dipelajari terlebih dahulu yang dipersiapkan untuk melakukan proses pengembangan disiplin ilmu. Adapun tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk memberikan pengetahuan yang optimal dan melatih peserta didik

⁵⁵ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

untuk mengembangkan berbagi ide-ide yang didapat pada kegiatan penelitian.

Pakar pendidikan terus menerus menciptakan berbagi kurikulum yang mampu membekali peserta didik sehingga mampu memasuki dunia pendidikan selanjutnya menggunakan berbagai konsep dan metode pendidikan dengan memperhatikan hubungan antar sesama, analisis, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Dalam pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan subjek akademis ini pengembangan dilaksanakan dengan pertama-tama menentukan mata pelajaran yang diharuskan untuk dipelajari oleh peserta didik, hal ini diharapkan mampu membekali pengembangan ilmu pengetahuan bagi peserta didik. Proses pendidikan berkenaan dengan semua upaya untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia, sedangkan manusia yang bermutu itu pada hakikatnya telah dijabarkan dan dirumuskan secara jelas dalam rumusan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri searah dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan.⁵⁶

Pada pendekatan ini dapat dibedakan antara macro-organizer, organizer, dan microorganizer yang menjadi keutamaan. Pendekatan ini sangat memprioritaskan perencanaan program serta penyusunan bahan pembelajaran dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam kurikulum persfektif pendekatan ini, bukan berfokus pada materi pembelajaran yang akan dipelajari saja namun juga menganalisis kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Contohnya, dalam aspek keimanan atau mata pelajaran aqidah memakai sistematis ilmu tauhid, aspek atau mata pelajaran Al-Qur'an memakai sistematisasi Al-Qur'an atau tafsir, akhlak memakai sistematisasi ilmu akhlak, ibdah atau muamalah memakai sistematisasi ilmu fiqih, tarik atau sejarah memakai sistematisasi ilmu sejarah kebudayaan Islam. Tetapi demikian, dalam pembinaannya wajib memperhatikan interaksi antara aspek atau mata pelajaran yang lainnya dengan menggunakan metode ekspositori dan inkuiri.

⁵⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Dalam pendekatan subjek akademis ini juga memiliki pendekatan yang lain, yakni:

1. Pendekatan yang meneruskan dari pendekatan struktur pengetahuan, dimana peserta didik bukan hanya dituntut untuk mengingat materi saja tetapi juga memahami setiap materi pembelajaran yang telah dipelajari.
2. Studi yang bersifat lebih integrative, maksudnya berbagai tanggapan dari masyarakat yang menuntut bermacam model pengetahuan yang sifatnya lebih komprehensif karena materi pembelajaran yang bermuat berbagai macam satuan pelajaran dapat membuat batasan ilmu yang ada akan hilang.
3. Pendekatan yang banyak diterapkan dalam sekolah yang fundamentalis, yakni dengan selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih memfokuskan pada kegiatan membaca, menulis, dan pemecahan masalah secara matematis. Pada pelajaran seperti ilmu sosial, ilmu kealaman, dan sebagainya dipelajari dengan tidak menghubungkan dengan kegiatan untuk memecahkan kasus pada kehidupan sehari-hari (Awwaliyah, 2019).

Selanjutnya pendekatan subjek akademis juga mempunyai karakteristik antara lain yaitu:

1. Tujuan, tujuan berdasarkan kurikulum subjek akademis ialah menaruh pengetahuan yang solid dan memberikan latihan pada peserta didik menggunakan ide-ide pada proses penelitian. Peserta didik wajib melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pemikiran serta mengontrolnya, dengan demikian peserta didik mempunyai sebuah konsep yang dapat terus dikembangkan pada lingkungan yang lebih kompleks.
2. Metode, metode yang seringkali diterapkan pada pendekatan subjek akademis ialah pendekatan dengan metode ekspositori dan inkuiri. Dalam materi disiplin ilmu yang didapat, dicari aneka macam permasalahan yang urgen lalu dirumuskan dan dicari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada.
3. Organisasi, isi pola organisasi yang paling penting merupakan pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari

pada satuan pelajaran yang digabungkan dengan pelajaran yang lain. Pola organisasi bahan ajaran disusun pada tema-tema pembelajaran yang telah ditetapkan, mencakup materi bermacam disiplin ilmu, dan bahan ajar yang diintegrasikan pada suatu persoalan yang meliputi berbagai macam masalah sosial baik yang dihadapi dalam kehidupan atau pun yang lainnya. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh dari disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya.

4. Evaluasi, kurikulum subjek akademis menerapkan bentuk penilaian bermacam-macam yang sinkron dengan tujuan dan sifat mata pelajaran.⁵⁷

C. Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik berlandaskan dengan ide “memanusiakan manusia”, yang memberikan kesempatan bagi manusia agar menjadi lebih human. Dengan demikian dapat meningkatkan harkat manusia yang berdasar pada filosofi, teori, penilaian dan pengembangan program pendidikan. Ide memanusiakan manusia merupakan anggapan mengenai dua makna yang terdapat pada diri manusia, yaitu: substansi jasad/materi merupakan bagian dari alam semesta yang telah Allah SWT ciptakan, serta selalu patuh dan sesuai dengan sunnatullah atau berdasarkan dengan peraturan Allah SWT yang ditetapkan di alam semesta sesuai dengan perkembangannya. Substansi immateri/non-jasadi ialah Allah SWT telah meniupkan atau menghembuskan ruh pada diri manusia, serta memberikan potensi dan fitrah yang bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Pendekatan ini bertumpu pada filsafat belajar humanisme yang memandang bahwa belajar tidak terbatas pada pengembangan ranah kognitif saja, melainkan melibatkan seluruh domain (kognitif, afektif dan psikomotorik) sehingga semua aspek mendapatkan perhatian.

⁵⁷ Lola Fadilah and Tasman Hamami, “Pendekatan Subjek Akademis Dan Humanistik Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 08. No. 02 (2021).

Al-Farabi menyatakan bahwa manusia itu mencakup 2 unsur yakni bersumber dari unsur al-Amr dan al-Khalq (ruh menurut keinginan Tuhan). Berdasarkan dua substansi yang ada, maka hal yang sangat penting adalah substansi immateri sedangkan jasad merupakan alat ruh dalam kehidupan di dunia. Saat ruh terpisah dari jasad maka akan terjadi kejadian yang disebut sebagai maut, karena yang mati hanyalah jasad sedangkan ruh kan meneruskan perjalanannya ke alam barzakh. Manusia dengan kedua substansi tersebut telah disempurnakan dengan panca indra dan potensi-potensi dasar yang dikenal dengan fitrah. Keduanya harus dikembangkan melalui proses pendidikan sehingga menjadi kemampuan aktual.

Dengan demikian pendidikan humanistik merupakan pandangan pendidikan yang memiliki tujuan untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang seutuhnya yaitu makhluk yang dibekali berbagai potensi sehingga mampu menjadi makhluk yang mulia dan diharapkan untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka proses pendidikan dapat membantu dalam proses pengembangan humanisasi, maksudnya menghargai hak-hak asasi manusia, mislanya setiap manusia berhak diberikan perlakuan yang adil, berhak untuk mengutarakan kebenaran, menyampaikan pendapat, dan lain-lain.

Terdapat karakteristik dari pendekatan humanistik diantaranya yaitu:

1. Partisipasi, kurikulum yang memfokuskan pada keikutsertaan peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ialah aktivitas belajar yang dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai macam kegiatan bersama. Melalui aktivitas bersama, peserta didik dapat melakukan kegiatan diskusi, seperti pengambilan keputusan, bertukar pikiran, bertanggung jawab bersama, dan lain sebagainya. Ini menerangkan karakteristik non-otoriter.
2. Integrasi, dengan berbagai kegiatan kelompok maka akan terjadi interaksi, pemahaman bersama, pertukaran pemikiran, dan aktivitas bersama.

3. Relevansi, materi pembelajaran sesuai dengan kemauan dan keperluan peserta didik, karena diadopsi dari dunia dan oleh peserta didik sendiri.
4. Pribadi anak, maksudnya proses pembelajaran memberikan tempat yang paling utama pada pribadi peserta didik.
5. Tujuan, pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik secara keseluruhan, yang sinkron dengan dirinya dan lingkungan secara menyeluruh.

Kurikulum humanistik mempunyai tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan kepribadian yang sesuai dengan keadaan yang ideal, proses pertumbuhan, integritas, dan otonomi. Pada dasarnya kurikulum dengan pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh psikologi angkatan ketiga yang mengharapkan adanya kematangan pada diri peserta didik, dimana kegiatan pembelajaran dibebaskan untuk selalu berekspresi, bertindak, melakukan percobaan, bahkan sampai dengan menimbulkan permasalahan, kemudian diamati dan menemukan umpan balik yang pada akhirnya peserta didik dapat menemukan jati diri mereka. Peserta didik akan belajar untuk dapat mengenal kepribadian mereka sendiri melalui berbagai macam respon sesuai dengan pengalaman belajar menggunakan meditasi dan disiplin spiritual, dimana peserta didik mampu mengendalikan kesadarannya. Pada akhirnya diharapkan peserta didik akan mampu memahami hubungan sebab akibat dimana emosi dan khayalan digunakan untuk mampu merespon dari sebuah aksi, pembelajaran akan mampu terus bertumbuh dan bertahan pada masa selanjutnya.

Adapun peran pendidik untuk peserta didik yaitu:

1. Mendengarkan secara menyeluruh pendapat peserta didik tentang pendapat yang ada.
2. Menghargai peserta didik.
3. Berbuat sebagaimana adanya dan tidak direayasa.

Dalam pendekatan humanistik, peserta didik dibimbing agar mampu membedakan hasil menurut maknanya dan

memandang aktivitas menjadi kebutuhan peserta didik pada masa yang akan datang. Sebagaimana konsep yang ada yaitu pendidikan pribadi (*personalized education*), pada pendekatan ini peserta didik diberikan tempat yang paling utama. Kurikulum ini memfokuskan pada integritas, maksudnya kesatuan tingkah laku bukan hanya pada kecerdasan tetapi juga pada emosional peserta didik. Adapun acuan pada kurikulum ini yaitu sebagai berikut:

1. Integritas secara keseluruhan efeksi pserta didik baik dari segi sikap, nilai dan kognisi yang mencakup kemampuan dan juga pengetahuan.
2. Kesadaran dan kepentingan.
3. Respon pada hal-hal tertentu, misalnya kedalaman pada suatu keterampilan.⁵⁸

D. Pendekatan Teknologi

Teknologi pada dasarnya merupakan pelaksanaan ilmu pengetahuan dalam memainkan kedudukan berarti pada kehidupan sehari-hari. Teknologi lahir mulai dari riset pemikiran manusia dengan proses ilmiah guna menggapai tujuan yang maksimal, teknologi pula bisa diarteknologian selaku fasilitas buat sediakan kebutuhan manusia. Teknologi data ialah sesuatu teknologi yang dapat digunakan buat mencerna informasi. Pengolahan itu tercantum memproses, memperoleh, menyusun, menaruh serta memanipulasi informasi dalam bermacam metode buat menciptakan data yang bermutu, ialah data yang relevan, akurat, serta sesuai dengan waktunya. Dengan terdapatnya teknologi bisa mempermudah manusia dalam meningkatkan sumber energi alam yang ada, namun kerap melebihi batasan sehingga terbentuknya ketidakseimbangan dalam pemakaian serta keserakahan manusia yang menimbulkan terbentuknya bencana alam.

Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa yang akan datang terutama dibidang informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi sempit cakupannya. Interaksi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, baik yang disengaja maupun

⁵⁸ Lola Fadilah and Tasman Hamami.

yang tidak disengaja menjadi semakin intensif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dan Negara-negara di dunia, globalisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Utamanya di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya yang sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan itu. Tentu saja melalui usaha-usaha nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya.⁵⁹

Namun perlu diingat, peranan teknologi khususnya media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak sejalan dengan esensi tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁶⁰

Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektifitas program metode dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi memengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media, atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional.⁶¹

Kurikulum berbasis teknologi ialah integrasi fitur ataupun produk yang berasal dari teknologi pada kurikulum, bisa berbentuk fitur perangkat keras ataupun perangkat lunak, dengan tujuan memudahkan proses penyampaian data kepada partisipan didik sehingga pendidikan jadi efisien sekaligus mengasyikkan. Dalam penggabungan, teknologi terpaut dengan kurikulum paling utama selaku bawah dalam formulasi tujuan, untuk pemenuhan bahan pendidikan, strategi pendidikan, serta penilaian.

⁵⁹ Deni Darmawan, *Teknologi Pembelajaran* (PT Remaja Rosdakarya, 2013).

⁶⁰ Pupuh Fathurrohman, *Strategi Belajar Mengajar* (PT Refika Aditama, 2014).

⁶¹ Pupuh Fathurrohman.

Kedudukan teknologi paling utama selaku perlengkapan buat membantu menggapai tujuan kurikulum.⁶²

Pendekatan teknologi dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Karenanya materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (job analysis) tersebut.

E. Pendekatan Rekonstruksi Sosial

Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi dan bekerja sama. ciri khas dari pembelajaran kontruksi sosial adalah terbangunnya kolaborasi yang saling berkontribusi dalam memproduksi pengetahuan dan nilai pada seseorang. Melalui kehidupan bersama dan kerja sama itulah manusia dapat hidup, berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Pandangan rekonstruksi sosial berkembang karena keyakinan pada kemampuan manusia untuk membangun masyarakat yang lebih baik serta peranan pendidikan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Pada pembelajaran yang berbasis pada kurikulum rekonstruksi sosial, isi pendidikan terdiri atas problemproblem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Sementara proses pendidikan berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerja sama.

Melalui pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial, siswa tidak hanya mampu mengetahui konsep-konsep dari berbagai aspek tersebut, mereka juga tidak hanya sekedar tahu bagaimana bentuk pengaplikasian dari materi yang mereka pelajari, akan tetapi mereka juga mengetahui untuk apa materi tersebut mereka pelajari, bagaimana materi tersebut diamalkan dalam kehidupan

⁶² Siti Nur'ariyani Jumyati, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4. No. 6 (2022).

sehari-hari, dan bagaimana materi tersebut mampu memecahkan permasalahan yang mereka temukan di masyarakat.⁶³

KESIMPULAN

Menurut pendekatan subjek akademis, kurikulum adalah seperangkat bahan kajian dan materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis dalam mata pelajaran pada pendidikan tertentu yang dipelajari peserta didik. Pada sisi lain, pendekatan humanistik memandang kurikulum menjadi alat untuk mengembangkan individu peserta didik, sebagai akibatnya mereka berkembang secara optimal dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan humanistik pada pengembangan kurikulum berakar dari pandangan filosofi belajar humanisme yang memandang bahwa belajar adalah proses yang terjadi pada diri individu peserta didik yang melibatkan semua ranah secara terpadu, sehingga seluruh potensi peserta didik berkembang secara keseluruhan. Implementasi pendekatan subjek akademis dan humanistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menaruh arah pada pendidikan agama Islam yang berorientasi pada pencapaian kemampuan pendidikan agama Islam yang ideal dan membuatkan seluruh potensi peserta didik secara holistic untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kepribadian seutuhnya.

Pengembangan kurikulum ialah aktivitas yang mengaitkan seluruh aspek serta sumber pembelajaran di seluruh jenjang. Kurikulum selaku pedoman penerapan pendidikan aktivitas berarti terdapatnya pedoman interaksi antara pendidik/ pengajar serta siswa dalam kurikulum. Dengan demikian, kurikulum berperan selaku pedoman utama dalam penerapan pada aktivitas pendidikan serta berperan pula selaku media buat menggapai tujuan pembelajaran, kurikulum bisa diposisikan selaku pijakan untuk sekolah buat meningkatkan pembelajaran dalam mengalami pertumbuhan serta pergantian era. Aktivitas pengembangan

⁶³ Khairunnisyah, "Pendekatan Rekonstruksi Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri 6 Pontianak," *Arfannur: Journal of Islamic Education* 1. No. 1 (2020).

kurikulum wajib memikirkan sebagian aspek, tercantum pendekatan komprehensif tanpa kepentingan ataupun kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pendekatan sosiokultural dengan mengaitkan sumber energi yang berkompeten khususnya guru selaku pelaksana kurikulum, serta meningkatkan kerangka perencanaan mulai dari tingkatan lokal ke regional setelah itu pada tingkatan nasional, sehingga pergantian kurikulum senantiasa menjajaki pertumbuhan era. Pengembangan kurikulum terintegrasi teknologi dapat meningkatkan pemikiran kritis partisipan didik. Penggunaan teknologi selaku perlengkapan pendidikan membagikan strategi pendidikan serta pengelolaan kelas yang efisien untuk guru di satuan pembelajaran. Dengan demikian pemanfaatan teknologi dalam desain kurikulum hendak memfasilitasi bermacam kebutuhan partisipan didik di kelas pada tingkatan mikro serta partisipan didik di sesuatu negeri pada tingkatan makro.

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan materi ajar berbasis kurikulum rekonstruksi sosial pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam penting dilakukan, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi (knowing), untuk meningkatkan kemampuan keterampilan siswa (doing) dan juga untuk membantu siswa untuk senantiasa menerapkan apa yang telah mereka pelajari sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pada kehidupan mereka (being).

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Darmawan. *Teknologi Pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Khairunnisyah. “Pendekatan Rekonstruksi Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri 6 Pontianak.” *Arfannur: Journal of Islamic Education* 1. No. 1 (2020).
- Lola Fadilah and Tasman Hamami. “Pendekatan Subjek Akademis Dan Humanistik Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 08. No. 02 (2021).
- Oemar Hamalik. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Pupuh Fathurrohman. *Strategi Belajar Mengajar*. PT Refika Aditama, 2014.
- Sholeh Hidayat. *Pengembangan Kurikulum Baru*. PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Siti Nur'ariyani Jumyati. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4. No. 6 (2022).

Printing keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



JENIS - JENIS KURIKULUM⁶⁴

PENDAHULUAN

Kurikulum adalah seperangkat program pendidikan, mata pelajaran, dan aktivitas yang dirancang untuk memandu pembelajaran dan pengembangan siswa dalam suatu lembaga atau sistem pendidikan tertentu. Ini menguraikan tujuan, objektif, dan standar yang diharapkan siswa capai di setiap tingkat pendidikan mereka.

Kurikulum merupakan aspek penting dari pendidikan karena memberikan kerangka kerja untuk penyampaian pendidikan dan memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang komprehensif yang membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam karir mereka di masa depan dan sebagai anggota masyarakat.

Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan melalui proses kolaboratif yang melibatkan pendidik, administrator, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mempertimbangkan kebutuhan dan minat siswa, serta tuntutan

⁶⁴ Mulyadi

sosial dan ekonomi dari masyarakat lokal, nasional, atau global. Kurikulum tidak bersifat statis dan tunduk pada peninjauan dan revisi berkelanjutan untuk memastikan agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Pendidikan diakui sebagai solusi alternatif dalam menumbuhkan kembangkam potensi dan skill anak didik agar menjadi generasi siap pakai dan mampu menghadapi setiap tantangan yang menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, sebagai generasi penerus bangsa, anak didik diharapkan mampu mengoptimalka segala potensi fitrahnya, untuk melakukan gerakan revolusioner bagi kemajuan bangsa kedepan, gerakan revolusioner ini bisa dilakukan apabila anak didik tidak terjebak dengan gempuran modernitas yang membawa perubahan dan warna lain yang mengancam moralitas anak bangsa secara keseluruhan.⁶⁵

Tentunya banyak hal harus diketahui seorang guru agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, mulai dari karakter, tingkahlaku, keadaan didalam kelas, mental dan kecerdasan siswa masing masing siswa memiliki kecerdasan yang tentunya berbeda- beda, hal ini membuat guru harus mengetahui seperti apa teori belajar yang tepat untuk di implementasikan kepada peserta didik.⁶⁶

Pada pembahasan makalah akan dijelaskan lebih mendalam tentang jenis – jenis kurikulum yang akan membuat pembaca lebih memahami secara luas tentang pengertian dan jenis jenis kurikulum pada pembahasan ini.

⁶⁵ Mulyadi, Inayati Mahfida, and Nor Hasan, "Revitalisasi Pendidikan Islam Tradisional Dalam Era Transformasi Digital," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 487.

⁶⁶ Mulyadi, "Teori Belajar Konstruktivisme Dengan Model Pembelajaran (Inquiry)," *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 07, no. 02 (2022): 174.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum adalah rencana dan susunan sistematis yang memuat berbagai materi pelajaran, metode, strategi, dan evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum mencakup semua aspek pendidikan seperti tujuan, isi, metode, strategi, dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum terdapat mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum mencakup semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi dan pendidikan lanjutan.

Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga. Secara etimologis curriculum berasal dari bahasa Latin. "Curriculum" berarti "a running course, or race course, especially a chariot race course" dan dalam bahasa Perancis "course" yang artinya "to run, berlari" (IKIP Bandung, 1994:139). Jadi istilah kurikulum pada zaman romawi mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kemudian istilah itu digunakan dalam bidang pendidikan yakni sejumlah "course" atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah "seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu". Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Michaels, Grossman dan Scott sebagaimana dikutip oleh Toenlie: "The planned curriculum is defined as broad goals and specific objectives, content, learning activities, use of instructional media, teaching strategies, and evaluation stated, planned and carried out by school personal". Dari beberapa pendapat tentang kurikulum, maka kurikulum diartikan sebagai suatu program

pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.⁶⁷

B. Pengertian Kurikulum Tertulis

Kurikulum tertulis adalah suatu rencana atau program yang tertulis secara rinci dan sistematis mengenai materi, tujuan, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam suatu pendidikan atau pelatihan. Kurikulum tertulis biasanya disusun oleh lembaga pendidikan atau pelatihan, dan digunakan sebagai panduan bagi pengajar dan peserta didik atau peserta pelatihan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Kurikulum tertulis biasanya meliputi beberapa komponen penting, seperti tujuan pembelajaran, standar kompetensi, materi pelajaran, metode pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan jadwal pelaksanaan. Tujuan dari kurikulum tertulis adalah untuk memastikan bahwa peserta didik atau peserta pelatihan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Kurikulum tertulis dapat disesuaikan dengan jenis pendidikan atau pelatihan yang diberikan, seperti pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, pelatihan kerja, atau kursus bahasa. Kurikulum tertulis juga dapat diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik atau peserta pelatihan, serta perkembangan terbaru dalam bidang pembelajaran yang relevan.

Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan

⁶⁷Mumu, "Implementasi Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) Dalam Pembentukan Karakter Melalui Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 06, No. 02 (2021): 111.

ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara.

Konsep kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum.⁶⁸

Berbicara masalah pendidikan, tidak terlepas dari subjek utamanya, yakni guru dan siswa. Kurikulum dikatakan tidak hanya terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi bagaimana cara mempengaruhi pribadi siswa. Fungsi kurikulum itu sebagai alat perubahan yangbterkait dengan pribadi siswa sehingga tujuan penddikan itu dapat tercapai.

Untuk merubah tingkah laku siswa, maka dibutuhkan perencanaan guru dalam mengimplementasikan tujuan pendidikan. Jadi, pengajaran yang dilakukan oleh guru harus memiliki pedoman yang berlandaskan pada kurikulum. Guru merupakan factor urgen dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum. Dalam mengembangkan sebuah kurikulum, maka sebagai seorang guru harus bertindak sebagai implementator.

⁶⁸ Fuja Siti Fujiawati, "Pemahaman Konsep Kurikulum Dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni," *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni* 01, No. 01 (2016): 19–20.

Bagaimanapun idealnya perencanaan kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai salah satu alat implementasi pendidikan. Dan begitu pula sebaliknya pengajaran tanpa adanya sebuah kurikulum sebagai pedoman, maka tidak akan efektif.

Adapun nilai-nilai pendidikan yang penting, untuk dijadikan sebagai materi pendidikan islam antara lain materi pendidikan yang menyeimbangkan aspek jasmani atau keseimbangan untuk kehidupan dunia dan akhirat, tanpa keduniaan, kebutuhan akhirat tidak akan tercapai. Begitu pula tanpa kebutuhan akhirat, maka dunia terasa hampa.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada saat menyusun sebuah kurikulum, kurikulum harus bersifat progress sesuai dengan perkembangan zaman. Focus pada kajian ini terkait dengan kurikulum pendidikan agama islam.

- a. Perkembangan kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia. Yang mana kurikulum di masa sekarang ini lebih mengarahkan pada aspek potensi manusia yang berbeda. Kebijakan yang ada pada dasarnya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya punya keanekaragaman potensi. Jadi hebatnya para peserta didik bukan hanya diukur dari aspek keilmuan yang mereka miliki tapi ditunjang dengan aspek-aspek pendukung lainnya.
- b. Tujuan akhir kurikulum pendidikan islam adalah mencapai keiklasan, jujur, istikomah, amanah, dan karakter-karakter lainnya yang baik dan harus melekat pada diri anak didik serta dapat menjadi sebuah habitasi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dalam kurikulum pendidikan islam harus juga ditanamkan rasa syukur pada diri anak didik serta memberikan analisis kepada mereka dengan cara mempergunakan rasa syukur itu dengan terus menggali potensi yang ada sehingga ketika mereka dewasa terus memupuk rasa syukur dan pantang menyerah dalam bekerja.

- d. Kurikulum juga harus bersifat realistic sesuai dengan konteks kognisi, afeksi dan psikomotorik.
- e. Metode dalam pengajaran harus bersifat luwes dan dinamis, sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang harus mengakar⁶⁹

C. Pengertian Kurikulum Tersembunyi

Kurikulum tersembunyi adalah suatu bentuk kurikulum yang tidak tercantum dalam rencana atau program resmi dari lembaga pendidikan atau pelatihan. Kurikulum tersembunyi mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diakui secara tidak langsung melalui interaksi sosial dalam lingkungan pembelajaran.

Kurikulum tersembunyi dapat berupa nilai-nilai sosial, norma, atau tata cara berkomunikasi yang dipelajari dan diinternalisasi oleh peserta didik atau peserta pelatihan melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, peserta didik dapat belajar tentang nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab melalui tindakan dan perilaku guru atau rekan sekelas, bahkan meskipun tidak secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum resmi.

Kurikulum tersembunyi juga dapat berupa pengalaman belajar yang tidak terencana, seperti pembelajaran melalui pengalaman sosial dan kultural dalam lingkungan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat belajar tentang keragaman budaya dan toleransi melalui interaksi dengan teman sekelas yang berasal dari latar belakang yang berbeda.

Kurikulum tersembunyi merupakan frase dari gabungan dua istilah, yakni kurikulum (*curriculum*) dan tersembunyi (*hidden*). Kurikulum secara etimologis terdiri dari kata *curere* yang berarti tempat berlari (*gelanggang, arena*) dan *curir* yang artinya pelari atau atlet (Maarif, 2005: 56). Sedangkan secara istilah, kurikulum dapat dipahami sebagai landasan yang

⁶⁹ Mariatul Hikmah, "Makna Kurikulum Dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 15, No. 01 (2020): 461–62.

digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya kearah tujuan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental.

Jika dihubungkan dengan istilah tersembunyi, maka secara umum dapat dipahami bahwa kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang tidak terlihat, namun berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sehingga kurikulum tersembunyi dalam hal ini merupakan sesuatu yang menjadi misi tertentu yang hanya diketahui oleh seorang guru ataupun pengelola pendidikan.⁷⁰

Kurikulum tersembunyi mencakup segala bentuk pendidikan, termasuk aktivitas rekreasional dan sosial tradisional, yang dapat mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang sebetulnya tak sengaja karena bukan berhubungan dengan sekolah tetapi dengan pengalaman belajar. Kurikulum tersembunyi juga dapat merujuk pada transmisi norma, nilai, dan kepercayaan yang disampaikan baik dalam isi pendidikan formal dan interaksi sosial di dalam sekolah-sekolah. Kurikulum tersembunyi ini sukar untuk didefinisikan secara eksplisit, karena berbeda-beda antar siswa dan pengalamannya serta karena kurikulum itu selalu berubah-ubah sering dengan berkembangnya pengetahuan dan keyakinan masyarakat. Konsep kurikulum tersembunyi terekspresikan dalam gagasan bahwa sekolah melakukan lebih dari sekedar menyebarkan pengetahuan, seperti tercantum dalam kurikulum formal. Terdapat berbagai kritik tentang implikasi sosial, landasan politik, dan hasil budaya dari aktivitas pendidikan modern dibalik kurikulum tersembunyi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum tersembunyi mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Harapan yang tidak resmi 2) Hasil pembelajaran yang tidak disengaja 3) Pesan implisit yang timbul dari struktur sekolah 4) Dibuat oleh para siswa 5) Aspek kurikulum tersembunyi.⁷¹

Kurikulum tersembunyi sering juga disebut dengan Other Curriculum, yaitu kurikulum yang merupakan hasil dari

⁷⁰ Hikmatul Mustaghfiroh, "Hidden Curriculum Dalam Pembelajaran PAI A," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2014): 150.

⁷¹ Ahmad Mahali, "Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pai," *Prosiding Pascasarjana lain Kediri* 3 (2020): 184.

“hubunganhubungan yang berkuasa” di dalam kelas, baik dalam bentuk unsur suprastruktur, kesadaran kelas, patriarki, heteroseksualitas, dan lain sebagainya yang nantinya akan membentuk sebuah habitus. Kurikulum tersembunyi ini dalam praktiknya dapat berupa pola kepemimpinan kelas, kewirausahaan, sopan santun, dan kualitas kelas⁷²

Saat mempertimbangkan implikasi sosial dari kurikulum tersembunyi, perlu diingat bahwa kontrol sosial adalah perhatian utama dari para penemu kurikulum pendidikan. Para peneliti awal di bidang ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa pelestarian keistimewaan, minat, dan pengetahuan sosial dari suatu kelompok dalam populasi membuat perlunya eksploitasi kelompok lain yang kurang kuat. Seiring berlalunya waktu, teori ini menjadi kurang diperhatikan, tapi warna yang mendasarinya masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan dalam kurikulum tersembunyi.

Beberapa teori pendidikan telah dikembangkan untuk membantu memberi makna dan struktur terhadap kurikulum tersembunyi dan untuk mengilustrasikan peran sekolah dalam sosialisasi. Tiga dari teori-teori tersebut, seperti dikemukakan oleh Henry Giroux dan Anthony Penna, adalah pandangan struktural-fungsional terhadap sekolah, pandangan fenomenologis yang berhubungan dengan sosiologi pendidikan yang baru, dan pandangan kritis radikal yang berhubungan dengan analisis neo-Marxist terhadap teori dan praktik pendidikan. Pandangan struktural-fungsional memusatkan diri pada bagaimana norma dan nilai diterapkan dalam sekolah dan seberapa penting hal tersebut bagi keberfungsian masyarakat telah diterima secara penuh.

Pandangan fenomenologis berpendapat bahwa makna dibentuk melalui pertemuan dan interaksi sosial, dan berimplikasi pada pendapat bahwa pengetahuan adalah objektif. Pandangan radikal kritis mengenali hubungan antara reproduksi ekonomi dan budaya serta menekankan hubungan antara teori, ideologi, dan praktik belajar sosial. Walau dua teori pertama telah berkontribusi terhadap analisis kurikulum tersembunyi, pandangan radikal kritis

⁷² Muhammad Nurhalim, “, Optimalisasi Kurikulum Aktual Dan Kurikulum Tersembunyi Dalam Kurikulum 2013,” *Insania* 19, No. 1 (2014): 119.

memberikan wawasan paling luas. Pandangan tersebut mengakui aspek ekonomis dan sosial dalam pendidikan yang secara jelas diilustrasikan oleh kurikulum tersembunyi. Selain itu juga mengilustrasikan signifikansi dari karakteristik abstrak seperti teori dan ideologi yang membantu mendefinisikan peristiwa ini.

Aspek Kurikulum Tersembunyi (*Hidden Curriculum*)

Dengan mengutip pendapat Glatthorn, Wina Sanjaya menuliskan dalam bukunya, bahwa ada dua aspek dalam hidden curriculum, yaitu:

Pertama, aspek tetap. Yang dimaksud dengan aspek tetap hidden curriculum adalah hal-hal yang dikategorikan ke dalam hidden curriculum yang relatif tidak akan pernah mengalami perubahan yang signifikan. Termasuk di dalam aspek ini adalah ideologi, keyakinan, dan nilai budaya masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap sekolah dalam arti nilai budaya masyarakat mana yang perlu diwariskan dan yang tidak boleh diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Kedua, aspek tidak tetap. Ada tiga variabel penting yang termasuk di dalam aspek tidak tetap dan relatif berubah. Ketiga variabel tersebut adalah: Pertama, variabel organisasi. Yang dimaksud dengan variabel organisasi di sini adalah kebijakan penugasan guru dan mengelompokkan siswa untuk proses pembelajaran. Kedua, variabel sistem sosial. Variabel sistem sosial di sini yaitu suasana sekolah yang tergambar dari pola-pola hubungan semua komponen sekolah. Banyak faktor sistem sosial di sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku siswa, yakni pola hubungan guru dengan tenaga administrasi, keterlibatan kepala sekolah dalam pembelajaran, keterlibatan guru dalam proses pengambilan keputusan, hubungan yang baik antar sesama guru, hubungan antara guru dan siswa, keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai aktivitas. Ketiga, variabel

budaya. Variabel budaya yaitu dimensi sosial yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan struktur kognitif.⁷³

KESIMPULAN

Kurikulum adalah rencana dan susunan sistematis yang memuat berbagai materi pelajaran, metode, strategi, dan evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum mencakup semua aspek pendidikan seperti tujuan, isi, metode, strategi, dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum terdapat mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, serta kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum mencakup semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi dan pendidikan lanjutan.

Kurikulum tertulis adalah suatu rencana atau program yang tertulis secara rinci dan sistematis mengenai materi, tujuan, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam suatu pendidikan atau pelatihan. Kurikulum tertulis biasanya disusun oleh lembaga pendidikan atau pelatihan, dan digunakan sebagai panduan bagi pengajar dan peserta didik atau peserta pelatihan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Kurikulum tersembunyi adalah suatu bentuk kurikulum yang tidak tercantum dalam rencana atau program resmi dari lembaga pendidikan atau pelatihan. Kurikulum tersembunyi mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diakui secara tidak langsung melalui interaksi sosial dalam lingkungan pembelajaran.

⁷³ M Slamet Yahya, "Hidden Curriculum Pada Sistem Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto Tahun 2013," *Jurnal Kependidikan* 1, No. 1 (2013): 131–33.

DAFTAR PUSTAKA

- Fujiawati, Fuja Siti. “Pemahaman Konsep Kurikulum Dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni.” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni* 01, No. 01 (2016): 19–20.
- Hikmah, Mariatul. “Makna Kurikulum Dalam Perspektif Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 15, No. 01 (2020): 461–62.
- Mahali, Ahmad. “Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pai.” *Prosiding Pascasarjana Iain Kediri* 3 (2020): 184.
- Mulyadi. “Teori Belajar Konstruktivisme Dengan Model Pembelajaran (Inquiry).” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 07, No. 02 (2022): 174.
- Mulyadi, Inayati Mahfida, And Nor Hasan. “Revitalisasi Pendidikan Islam Tradisional Dalam Era Transformasi Digital.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, No. 3 (2023): 487.
- Mumu. “Implementasi Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) Dalam Pembentukan Karakter Melalui Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 06, No. 02 (2021): 111.
- Mustaghfiroh, Hikmatul. “Hidden Curriculum Dalam Pembelajaran Pai A.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, No. 1 (2014): 150.
- Nurhalim, Muhammad. “, Optimalisasi Kurikulum Aktual Dan Kurikulum Tersembunyi Dalam Kurikulum 2013.” *Insania* 19, No. 1 (2014): 119.
- Yahya, M Slamet. “Hidden Curriculum Pada Sistem Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto Tahun 2013.” *Jurnal Kependidikan* 1, No. 1 (2013): 131–33.



PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM ⁷⁴

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan proses pembelajaran, kurikulum sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk menyusun target dalam proses belajar mengajar. Karena dengan adanya kurikulum maka akan memudahkan setiap pengajar dalam proses belajar mengajar, maka dengan itu perlu untuk diketahui apa arti dari kurikulum itu. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru disekolah.⁷⁵

Salah satu aspek yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem

⁷⁴ Moh. Hasibuddin

⁷⁵ Husni Mubarak, Sapuan, Sukron Makmun, *Pengembangan Kurikulum*, Program Pascasarjana Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang Tahun 2018.

pendidikan.⁷⁶ Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup banyak mengalami perubahan dan pengembangan kurikulum. Terhitung, pemerintah pernah menjalankan pergantian kurikulum sebanyak sepuluh kali, dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984 (kurikulum CBSA), kurikulum 1994, kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006 (KTSP), hingga kurikulum 2013.⁷⁷

Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi sebuah keharusan dan berlaku sepanjang hidup. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum harus mampu dievaluasi dan diterapkan sebagai usaha pembenahan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah dicita-citakan bersama.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

1. Pengembangan Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah *manhaj*, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan.

Adapun definisi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution ialah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Sedangkan menurut Zaenal Arifin, kurikulum

⁷⁶ Arif Rahman Prasetyo, Tasman Hamami, Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum, *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* Volume 8, Nomor 1, Mei 2020.

⁷⁷ Ibid, Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum, *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* Volume 8, Nomor 1, Mei 2020.

merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.⁷⁸

Taba mengartikan kurikulum bagian “rencangan studi” yang dirancang untuk memberi pelajaran pada siswa atau anak. Dipandangan tradisional mengemukakan dan menyatakan kurikulum merupakan seperangkat mapel yang wajib diambil seorang peserta didik untuk memperoleh ijazah, Konsep pengembangan kurikulum tersebut di atas memiliki cakupan yang begitu luas. Pengembangan dari kurikulum memiliki arti begitu luas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan system evaluasi.⁷⁹

Perencanaan kurikulum merupakan cara awal didalam membuat silabus. Staf kurikulum biasanya mengambil tindakan serta membuat keputusan untuk mengembangkan perencanaan untuk nantinya digunakan oleh siswa dan guru. Penyampaian kurikulum, atau yang biasa disebut implementasi kurikulum, berupaya menerjemahkan rencana kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum adalah tahap akhir dari pengembangan kurikulum dan menegaskan jangkauan hasil belajar, tingkat kinerja program yang direncanakan, dan hasil kurikulum. Pengembangan kurikulum melibatkan banyak individu, tidak hanya mereka yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan, tetapi juga politisi, pengusaha, orang tua siswa dan elemen masyarakat lainnya yang tertarik dengan pendidikan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengilhami kurikulum.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*, Hal 46.

⁷⁹ Muhammad Abdul Gofur, Junedi, Mukh Nursikin, Prinsip-Prinsip Inovasi Dan Pengembangan Kurikulum Pai, *Educational Journal Of Islamic Management (Ejim)*, Volume : 2 Issue : 2 | November, 2022.

⁸⁰ *Ibid*, Hal, 82.

2. Prinsip-prinsip Kurikulum Secara Umum

a. Prinsip Relevansi

Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan ke luar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi dan proses yang tercakup dalam kurikulum harus relevan dan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi ke dalam yaitu terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yakni antara tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. Relevansi internal menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum.⁸¹

Relevansi berarti sesuai atau serasi, jadi kurikulum pendidikan agama Islam harus sesuai dan serasi dengan tiga aspek yaitu; sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Sesuai dengan perkembangan kehidupan sekarang maupun masa depan. Dan sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan.

Aspek pertama: kurikulum akan menjadi ideal apabila telah sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik atau program pembelajaran tersebut dapat menyesuaikan perkembangan lingkungan hidup sehingga dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. *Aspek kedua:* kurikulum akan berkembang dan menjadi kurikulum yang baik apabila sudah serasi dengan perkembangan masa kini dan masa depan. Jika bahan atau program pembelajaran tidak memiliki relevansi dengan perkembangan masa kini, maka akan terjadi kejenuhan baik bagi peserta didik, maupun bagi guru/sekolah sebagai pelaksana. Aspek ini bisa disebut dengan aspek modernisasi, yaitu memberikan pengaruh kepada kurikulum agar selalu berkembang sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kurikulum akan selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman.⁸²

⁸¹ Komara Nur Ikhsan, Supian Hadi, Implementasi Dan Pengembangan Kurikulum, *Jurnal Ilmiah Edukasi* Volume 6, Nomor 1, Juni 2018.

⁸² Nurul Zainab, Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Perspektif Islam, *Fenomena*, Vol. 16 No. 2 Oktober 2017, Hal, 364.

Jika berpegang pada aspek modernisasi, maka di dalam pandangan Islam hal tersebut relevan dengan ayat suci al-Qur'an diantaranya surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas berimplikasi kepada para pengembang kurikulum agar selalu merencanakan serta mengembangkan kurikulum untuk hari esok, agar selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tidak menjadikan kurikulum bias dan tak bernilai.

Aspek ketiga: kurikulum harus mampu memberikan program atau bahan pembelajaran sesuai dengan tuntutan atau keinginan dunia pekerjaan, jika tidak maka lulusan dari sebuah lembaga pendidikan akan menjadi pengangguran yang tak memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan.⁸³

b. Prinsip Kontinuitas

Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, yang meliputi sinambung antar mata pelajaran, antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau belajar siswa bisa maju secara sistematis, di mana pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Dengan demikian, akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat awal siswa (prerequisite) untuk mengikuti pendidikan pada kelas atau jenjang

⁸³ *Ibid*, Hal, 365

pendidikan yang lebih tinggi, juga terhindar dari adanya pengulangan-pengulangan program dan aktifitas belajar yang tidak perlu dan bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga dan dana.⁸⁴

Menurut Sholeh Hidayat, supaya dalam pengembangan kurikulum terdapat kesinambungan, maka dalam penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Materi-materi ajar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat berikutnya hendaknya sudah di ajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya.
- 2) Materi-materi ajar yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya tidak perlu lagi diajarkan pada tingkat sekolah berikutnya, kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu (scope and sequence of curriculum).⁸⁵

c. Prinsip Fleksibilitas

Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya. Hal ini memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa, peran kurikulum disini sangat penting terhadap perkembangan siswa untuk itu prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan sumber daya manusia. Pengembangan kurikulum secara fleksibel mempersiapkan siswa untuk saat ini dan masa yang akan datang. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Selain itu, pengembangan kurikulum memberikan kebebasan bagi pendidik dalam

⁸⁴ Miftahul Ulum, Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum: Relevansi Dan Kontinuitas, *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* Volume 12 (1) Maret (2020), Hal, 71-72

⁸⁵ *Ibid*, Hal, 73

mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa.⁸⁶

d. Prinsip Efisiensi

Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran, ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur.⁸⁷

Efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar berarti bahwa waktu, tenaga dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan program pembelajaran dapat merealisasikan hasil yang optimal. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya tidak mahal. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Prinsip efisiensi terkait dengan efisiensi waktu, tenaga, peralatan yang akan menghasilkan efisiensi biaya.⁸⁸

e. Prinsip Efektivitas

Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas, yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: efektivitas mengajar

⁸⁶ Yuyun Dwi Haryanti, Sa'odah, Yeni Dwi Kurino, Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 Bagi Guru Sd Menyongsong Era Society 5.0, *Seminar Nasional Pendidikan*, FKIP UNMA 2022.

⁸⁷ *Ibid*, Hal,129.

⁸⁸ Rosichin Mansur, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural, *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman Fai Unisma, Jurnal Ilmiah Vicratina*, Volume 10, No. 2 Nopember 2016.

guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran.⁸⁹

Oleh karena itu ada upaya dalam upaya membuat kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang berlebihan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam implementasinya dalam proses pembelajaran adalah bagaimana tujuan pengembangan kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan oleh semua pihak, terutama efektivitas pembelajaran di kelas.⁹⁰

KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa kearah perubahan-perubahan yang di inginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Dalam pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum biasanya menggunakan beberapa prinsip yang merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu untuk dijadikan sebagai acuan agar kurikulum yang dihasilkan bisa memenuhi harapan stakeholders (pemangku kepentingan) pendidikan.

Terdapat beberapa prinsip yang biasa digunakan dalam pengembangan kurikulum, salah satunya yaitu prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip efisiensi dan prinsip efektifitas. Prinsip relevansi yaitu mempunyai arti kesesuaian yang mana kesesuaian tersebut dibagi dua; kesesuaian

⁸⁹ Shofiyah, Prinsip – Prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, Hal, 129.

⁹⁰ *Ibid*, Hal, 129

internal dan eksternal, prinsip kontinuitas mempunyai arti berkesinambungan, prinsip fleksibilitas mempunyai arti mudah, lentur atau mudah disesuaikan, prinsip efisiensi mempunyai arti tepat dan cermat dan prinsip efektivitas mempunyai arti suatu tindakan yang membuahkan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman Prasetyo, Tasman Hamami, Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum, *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* Volume 8, Nomor 1, Mei 2020.
- Husni Mubarak, Sapuan, Sukron Makmun, *Pengembangan Kurikulum*, Program Pascasarjana Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang Tahun 2018.
- Komara Nur Ikhsan, Supian Hadi, *Implementasi Dan Pengembangan Kurikulum*, *Jurnal Ilmiah Edukasi* Volume 6, Nomor 1, Juni 2018.
- Muhammad Abdul Gofur, Junedi, Mukh Nursikin, Prinsip-Prinsip Inovasi Dan Pengembangan Kurikulum Pai, *Educational Journal Of Islamic Management (Ejim)*, Volume : 2 Issue : 2 | November, 2022.
- Miftahul Ulum, Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum: Relevansi Dan Kontinuitas, *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan* Volume 12 (1) Maret (2020)
- Nurul Zainab, Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Perspektif Islam, *Fenomena*, Vol. 16 No. 2 Oktober 2017.
- Rosichin Mansur, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural, *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman Fai Unisma, Jurnal Ilmiah Vicratina*, Volume 10, No. 2 Nopember 2016.

Shofiyah, *Prinsip – Prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, Hal, 129.

Yuyun Dwi Haryanti, Sa'odah, Yeni Dwi Kurino, Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013 Bagi Guru Sd Menyongsong Era Society 5.0, *Seminar Nasional Pendidikan*, FKIP UNMA 2022.



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DILIHAT DARI DESAIN DAN PELAKSANAANYA⁹¹

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan suatu ruh yang sangat penting sebagai media penunjuk arah proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga nantinya dengan adanya kurikulum minimal akan ada tujuan yang akan dilakukan oleh lembaga pendidikan kedepannya sehingga menghasilkan hasil yang maksimal

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, serta proses pendidikan. Kemampuan seorang guru diuji dalam bentuk perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup yang diterapkan di dalam kelas. Di sana semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji. Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak pada guru. Oleh karena itu, gurulah pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum.

⁹¹ Syafiyqun Fawwaz

Tahapan pengembangan kurikulum kalau dilihat dari desain dan pelaksanaannya terdapat 6 tahapan sebagai berikut;

1. Kurikulum yang direkomendasikan (oleh pakar pendidikan)
2. Kurikulum yang ditulis (oleh pembuat kebijakan pendidikan)
3. Kurikulum yang didukung (oleh pemerintah dan penyandang dana lainnya)
4. Kurikulum yang diajarkan (oleh guru di kelas)
5. Kurikulum yang dipelajari (oleh murid)
6. Kurikulum yang diujikan (dalam ujian middle semester, unas, dan sejenisnya)

Dalam pembahasan di makalah ini, penulis fokus pada; Kurikulum yang direkomendasikan, Kurikulum yang diajarkan oleh guru di kelas, kurikulum yang dipelajari oleh murid, dan kurikulum yang diujikan.

PEMBAHASAN

Kurikulum Yang Direkomendasikan (Oleh Pakar Pendidikan)

Ada beberapa Kurikulum yang direkomendasikan oleh pakar pendidikan diantaranya yang paling fenomenal ialah Kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 dan Kurikulum darurat Yang dimana Kemunculan kurikulum merdeka belajar menunjang tersebarluasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).⁹²

Keunggulan Kurikulum Merdeka ialah berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Pembelajaran yang

⁹² Juliati Boang Manalu, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar," *Jurnal Mahesa* 1, no. 1 (2022): 82-83.

seperti ini jauh lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek memberikan peluang lebih luas pada siswa untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual dan untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil Pelajar Pancasila.⁹³

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa.⁹⁴

Yang pada Akhirnya pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Sehingga seorang guru dapat menilai kurikulum itu berjalan dengan efektif atau tidaknya tergantung dari hasil yang didapatkan dari seorang siswa

Kurikulum Yang Diajarkan

Kurikulum yang diajarkan, yaitu kurikulum yang diajarkan guru dalam kelas yang seharusnya didasarkan pada kurikulum yang tertulis. Untuk mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas, maka guru perlu menyusun program pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan RPP.⁹⁵

Sedangkan dalam kurikulum Merdeka Rpp di ubah menjadi Modul ajar Modul ajar merupakan perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar mempunyai peran utama untuk menopang guru dalam merancang pembelajaran.

⁹³ Dewi Rahmadayanti and Agung Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar," *JURNAL BASICEDU* 6, no. 4 (2022): 7176.

⁹⁴ dkk I Komang Wahyu Wiguna, "Langkah Mempercepat Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar," *Jurnal Pendidikan Dasar* 3, no. 1 (2022): 18.

⁹⁵ Zainal Arifin, *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014): 42.

Taught curriculum (Kurikulum yang Diajarkan), adalah kurikulum yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Dan yang dipersiapkan seorang guru adalah silabus dalam kurikulum 13. Sedangkan dalam kurikulum merdeka silabus diubah dengan sebutan ATP (Alur tujuan Pembelajaran)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kurikulum yang diajarkan guru di kelas merupakan sesuatu yang dipersiapkan guru untuk mengajar di kelas berupa silabus atau ATP, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar, dan bahan ajar. Hal ini merupakan suatu yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum mengajar.

1. Silabus atau ATP

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan dinas pendidikan.⁹⁶

Sedangkan ATP (Alur tujuan pembelajaran) merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis dalam fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga akhir.⁹⁷

2. RPP

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

⁹⁶ Loeloe Endah Poerwanti and Sofan Amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015): 150.

⁹⁷ Cindi Arjihan Desita Putri, "Kesulitan Calon Pendidik Dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka," *Jurnal Tindakan Kelas* 3, no. 1 (2022): 24.

untuk berpartisipasi aktif, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁹⁸

Komponen RPP adalah:

a. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

b. Standar Kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran

c. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

d. Indikator pencapaian kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan

⁹⁸ Putri: 42.

e. Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar

f. Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi

g. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar

h. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik

i. Kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran yang meliputi, pendahuluan, inti, dan penutup.

j. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian

k. Sumber belajar

Sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.⁹⁹

3. Modul Ajar

Dalam Modul ajar ada beberapa factor yang harus diperhatikan didalam Modul Akar diantaranya ialah

a. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran harus mencerminkan poin-poin penting pada pembelajaran dan dapat diuji oleh berbagai jenis asesmen sebagai bentuk dari pemahaman siswa. Bentuk tujuan pembelajaran pun beragam, mulai dari bidang kognitif yang meliputi fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, seni berpikir kritis dan keterampilan bernalar, dan langkah berkomunikasi.

b. Pemahaman Bermakna

Pemahaman bermakna untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tidak hanya menghafal konsep atau fenomena saja namun perlu diterapkan kegiatan menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk membentuk pemahaman yang baik sehingga konsep yang telah dirancang oleh guru dapat membentuk perilaku siswa.

c. Pertanyaan Pemantik

Guru dapat membuat pertanyaan kepada siswa yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran modul ajar untuk membangkitkan kecerdasan berbicara, rasa ingin tahu, memulai diskusi antar teman atau guru, dan memulai pengamatan. Fokus pembuatan pertanyaan dalam bentuk kata tanya terbuka, seperti; apa, bagaimana, mengapa

⁹⁹ Arifin, *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum*: 42.

d. Kegiatan Pembelajaran

Pada kegiatan ini berisikan skenario pembelajaran dalam kelas atau luar kelas. Kegiatan ini memiliki urutan yang sistematis yang dapat disertakandengan opsi pembelajaran atau pembelajaran alternatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, namun tetap pada koridor durasi waktu yang telah direncanakan. Adapun tahap kegiatan pembelajaran adalah pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif

e. Asesmen

Seperti yang telah diketahui bahwa kurikulum merdeka belajar mendesain asesmen menjadi tiga kategori, yaitu asesmen diagnostik asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Hal ini untuk mengukur capaian di akhir kegiatan pembelajaran. Asesmen diagnostik harus dilakukan sebelum pembelajaran dengan mengategorikan kondisi siswa dari segi psikologis dan kognitif.

Asesmen formatif dilakukan saat proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran. Adapun bentuk asesmennya beragam di antaranya adalah; (1) sikap, asesmen ini dapat berupa pengamatan, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan anekdota, (2) perfoma, penilaian ini berupa hasil keterampilan/ psikomotorik siswa berupa presentasi, drama, market day, dan lain sebagainya, dan (3) tertulis, penilaian ini berupa tes tertulis secara objektif, essay, multiple choice, isiam, dan lain-lain. Guru dapat berkreasi dalam melakukan asesmen kepada siswa.

f. Remedial dan Pengayaan

Dua kegiatan pembelajaran ini dapat diberikan kepada siswa dengan pencapaian tinggi dan siswa yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi. Guru dapat memperhatikan defrensiasi lembar kerja bagi siswa yang mendapatkan pengayaan dan siswa yangmendapatkan remedial.Pada tahap akhir, yaitu lampiran yang meliputi lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan guru dan siswa, glossarium, dan daftar pustaka.Beberapa komponen di atas tidak perlu dicantumkan semua pada modul ajar dan dikembalikan pada satuan pendidikan

yang memiliki kebebasan merancang dan mengembangkan modul sesuai dengan kondisi lingkungan belajar dan kebutuhan siswa.

A. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas

Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi yaitu;

- Pembagian tugas mengajar
- Pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler
- Pembagian tugas bimbingan belajar.¹⁰⁰

1. Kurikulum yang Dipelajari

Dalam hemat penulis kurikulum yang dipelajari oleh siswa di Sekolah terdiri dari dua hal yaitu, kegiatan intra dan ekstra, dalam hal ini kegiatan intra berupa materi pelajaran. Sedangkan kegiatan ekstra berupa ekstrakurikuler yang diikuti siswa sesuai dengan minat mereka.

a. Materi Pelajaran

Pengertian materi dalam sebuah pembelajaran (*instructional material*) adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru/instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.¹⁰¹

Materi pembelajaran merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran.

¹⁰⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012): 180.

¹⁰¹ S. Nasutoin, *Kurikulum Dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012): 85.

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kegiatan belajar mengajar, sehingga harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah:

1) Relevansi (kesesuaian)

Materi pembelajaran relevan dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lain.

2) Konsistensi (keajegan)

Materi pembelajaran konsisten dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam maka materi yang diajarkan harus juga meliputi dua macam.

3) *Adquency* (kecukupan)

Materi pembelajaran yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya jika terlalu banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum.¹⁰²

4) Kurikulum yang Diujikan

Kurikulum yang diujikan merupakan komponen untuk melihat efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran.¹⁰³ Kurikulum yang diujikan bisa diartikan sebagai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran atau evaluasi belajar dapat menjadi tolak ukur

¹⁰² Nasutoin: 86.

¹⁰³ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012): 68.

tercapainya tujuan yang ditetapkan di awal. Dengan menggunakan evaluasi belajar dapat diperoleh informasi yang akurat tentang keberhasilan siswa dalam proses belajar.

Untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan tujuan khusus yang telah ditentukan diadakan suatu ujian atau evaluasi. Evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil pembelajaran. Dalam evaluasi ini disusun butir soal untuk mengukur pencapaian setiap tujuan yang khusus atau indikator yang telah ditentukan.¹⁰⁴

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa siswa setelah melakukan proses pembelajaran, maka akan melakukan ujian atau evaluasi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan di awal dan dipelajari oleh siswa. Ujian atau evaluasi dilakukan untuk mengukur IPK atau IPTK sesuai dengan kurikulum yang dipakai pada lembaga pendidikan tersebut.

Selanjutnya, evaluasi tersebut harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik.

Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dalam K13.¹⁰⁵ Sedangkan dalam Kurikulum Merdeka berbentuk Sumatif (Penilaian harian), STS (Sumatif Tengah Semester) dan STA (Sumatif Akhir Tahun).

KESIMPULAN

Tahapan dalam Pengembangan kurikulum merupakan suatu unsur yang sangat penting, karena dengan adanya pengembangan kurikulum, seorang guru maupun lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dapat

¹⁰⁴ Hidayat: 69.

¹⁰⁵ Hidayat: 244.

mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan zaman dan sebagai media evaluasi perbaikan suatu kurikulum yang dipakai.

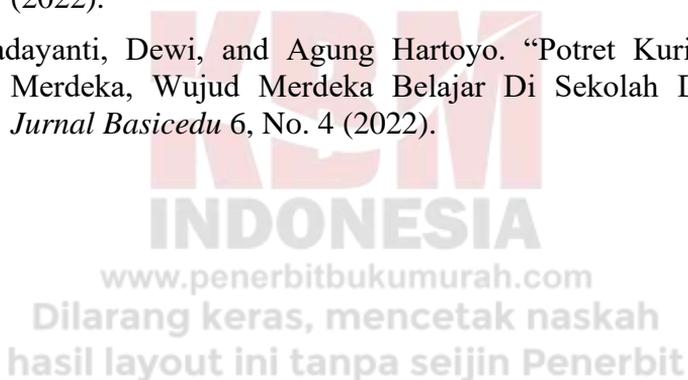
Terdapat beberapa tahapan Dalam Pengembangan Kurikulum yang ada Di Indonesia diantaranya yang dibahas Oleh Penulis disini ialah

1. Kurikulum Yang direkomendasikan, adapun Kurikulum yang direkomendasikan oleh pakar pendidikan ada beberapa yang penulis Ulas ialah Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka yang masih dipakai sampai saat ini di lembaga-lembaga pendidikan
2. Kurikulum yang diajarkan yang mana meliputi Silabus, Rpp (KI, KD, IPK) Sedangkan Dalam Kurikulum Merdeka ada ATP (alur tujuan Pembelajaran), Modul Ajar, (CP, TAPI dan IKTP)
3. Kurikulum yang dipelajari yang pasti itu adalah Materi pelajaran baik *in door* atau *out door*, yang mana materi pelajaran tersebut harus memenuhi syarat diantaranya, Relevan, Konsistensi dan Kecukupan
4. Kurikulum yang diujikan, ada beberapa jenis Ujian yang bisa dilakukan dalam Kurikulum K13 diantaranya ialah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dalam K13, sedangkan dalam Kurikulum Merdeka berbentuk Sumatif (Penilaian harian), STS (Sumatif Tengah Semester) dan STA (Sumatif Akhir Tahun)

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hidayat, Sholeh. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- I Komang Wahyu Wiguna, dkk. “Langkah Mempercepat

- Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 3, no. 1 (2022).
- Manalu, Juliati Boang. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar.” *Jurnal Mahesa* 1, no. 1 (2022).
- Nasutoin, S. *Kurikulum Dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Poerwanti, Loeloek Endah, and Sofan Amri. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015.
- Putri, Cindi Arjihan Desita. “Kesulitan Calon Pendidik Dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka.” *Jurnal Tindakan Kelas* 3, no. 1 (2022).
- Rahmadayanti, Dewi, and Agung Hartoyo. “Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 6, No. 4 (2022).





www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI ¹⁰⁶

PENDAHULUAN

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk kedalam tenaga kependidikan adalah: kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala satuan pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, figure, dan mediator. Istilah lain untuk kepala satuan pendidikan adalah: kepala sekolah, rector, direktur, serta istilah lainnya.¹⁰⁷

Kepala sekolah mempunyai peran penting yang sangat menentukan maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Karena ia merupakan pemimpin dan tokoh sentral di lembaga yang

¹⁰⁶ Khoirul Holis

¹⁰⁷ Loeloek Endah Poerwati dan Sofan Amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013), 233.

dipimpinnya. Seorang kepala sekolah harus mampu membawa lembaga yang dipimpinnya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ia juga harus mampu melihat adanya perubahan-perubahan yang terjadi dan perkembangan masa depan agar dapat mengembangkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 17 April 2007 telah menjelaskan tentang standar kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah meliputi lima kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Kompetensi Manajerial merupakan salah satu bagian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Kompetensi manajerial merupakan kompetensi yang penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan karena kompetensi manajerial menyangkut kegiatan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi dalam lembaga pendidikan.

Melihat dari peran dan fungsi kepala sekolah diatas, sangat wajar jika dalam sebuah lembaga tidak berjalan maksimal atau mengalami kemunduran, maka kepala sekolah yang banyak mendapat kritikan begitu pula sebaliknya, karena posisi pimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maju mundurnya sebuah lembaga. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang sekolah adalah

sebuah lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum sekolah atau lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran. Sebagai pemimpin pendidikan, dilihat dari status dan cara pengangkatannya tergolong pemimpin resmi, formal leader, atau status leader. Status leader bisa meningkat menjadi fungsional leader. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar.¹⁰⁸

Jabatan kepala sekolah bila dikaitkan dengan pengertian professional adalah suatu bentuk komitmen para anggota profesi untuk selalu meningkatkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas kinerjanya dalam menjalankan dan memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kinerja adalah proses dan hasil kerja dalam mengelola dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan.

Para ahli memiliki pandangan yang sama bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan tingkat kinerja yang memadai terutama bagi Kepala Sekolah sebagai pemimpin. Menjadi seorang kepala sekolah yang profesional tidaklah mudah, karena ada beberapa syarat dan criteria yang harus dipenuhi, misalnya saja seorang kepala sekolah harus memiliki standar tertentu seperti kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, serta harus mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar kepala sekolah nomor 13 tahun 2007. Dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah adalah, seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu Sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, dengan kriteria dan syarat tertentu untuk mengembangkan sekolah/lembaga mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

¹⁰⁸ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tujuan Teoritik Dan Permasalahannya* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), 83.

B. Syarat Kepala Sekolah

Seorang Kepala Sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Ia hendaknya memiliki sifat-sifat jujur, adil dan dapat dipercaya, suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan, bersifat supel dan ramah mempunyai sifat tegas dan konsekuen. Maka syarat seorang Kepala Sekolah menurut M. Daryanto dalam bukunya *Administrasi Pendidikan* adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya.
3. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan.
4. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang- bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya.
5. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya.¹⁰⁹

Muhaimin mengatakan, ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah agar bisa menjadi pemimpin yang baik antara lain:

1. Memiliki Visi; untuk memiliki visi yang baik, seorang Kepala Sekolah harus memiliki pikiran yang terbuka, agar ia mampu menerima berbagai hal baru yang mungkin saja selama ini bertentangan dengan apa yang telah diyakininya, sehingga pengalaman tersebut akan memperkaya persepektif pandang Kepala Sekolah tersebut terhadap sesuatu.
2. Keberanian; Kepala Sekolah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian yang tinggi, karena dengan kecintaan terhadap pekerjaannya tersebut berarti ia

¹⁰⁹ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 92.

mengerjakan dengan hati. Dengan keberanian tersebut, pemimpin akan dengan sukarela mengambil berbagai inisiatif untu mencari terobosan-terobosan baru yang kadang kala penuh resiko.

3. Kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistis. Kepala Sekolah harus mampu membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Jika kondisi sekolah masih belum memiliki sumber daya yang cukup, maka Kepala Sekolah harus mampu menggunakan fasilitas yang ada, dengan tetap mengupayakan perbaikan.
4. Mampu menjadi pemimpinyang tidak sekedar pemimpin legalitas adalah memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap manusia.¹¹⁰

C. Tugas dan Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum

1. Fungsi Kepala Sekolah

Soewadji Lazaruth menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai administrator pendidikan, supervisor pendidikan, dan pemimpin pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai administrator pendidikan berarti untuk meningkatkan mutu sekolahnya, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolahnya misalnya gedung, perlengkapan atau peralatan dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan.

Lalu jika kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru- guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan dan lain sebagainya. Dan kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru bersifat terbuka, kreatif dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian

¹¹⁰ Muhaimin, et al, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2011), 31-32.

ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah.¹¹¹

Senada dengan pendapat E. Mulyasa, kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu:¹¹²

a. Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik)

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.

b. Kepala Sekolah Sebagai Manajer

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti: MGMP/MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

¹¹¹ Soewadji Lazaruth, *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 20.

¹¹² E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), 98-122.

c. Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.

d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.

Sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapakan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik.

e. Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin)

Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru? Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai berikut : (1) jujur; (2) percaya diri; (3) tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) berjiwa besar; (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan.

f. Kepala Sekolah Sebagai Inovator

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan.

g. Kepala Sekolah Sebagai Motivator

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau (sebaliknya) kegagalan kebijakan public yang pertama adalah pemimpin.¹¹³ Oleh karenanya, kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran disekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 Th. 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.¹¹⁴

Menurut Dirawat, tugas dan tanggungjawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, yaitu:¹¹⁵

- a. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi enam bidang yaitu:
 - 1) Pengelolaan pengajaran. Pengelolaan pengajaran ini merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan ini antara lain:
 - (a) Pemimpin pendidikan hendaknya menguasai garis-garis besar program pengajaran untuk tiap bidang studi dan tiap kelas,
 - (b) Menyusun program sekolah untuk satu tahun,
 - (c) Menyusun jadwal pelajaran,
 - (d) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyusunan model satuan pengajaran,
 - (e) Mengatur kegiatan penilaian,
 - (f) Melaksanakan norma-norma kenaikan kelas,

¹¹³ Rian Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 151.

¹¹⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah.*, 25.

¹¹⁵ Dirawat, dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 80.

- (g) Mencatat dan melaporkan hasil kemampuan belajar murid,
 - (h) Mengkoordinir kegiatan bimbingan sekolah,
 - (i) Mengkoordinir program non kurikuler,
 - (j) Merencanakan pengadaan,
 - (k) Memelihara dan mengembangkan buku perpustakaan sekolah dan alat- alat pelajaran.
- 2) Pengelolaan kepegawaian. Termasuk dalam bidang ini yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan kenaikan pangkat, cuti, perpindahan dan pemberhentian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, penciptaan hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, masalah penerapan kode etik jabatan.
- 3) Pengelolaan kemuridan. Dalam bidang ini kegiatan yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas-kelas atau kelompok-kelompok (grouping), perpindahan dan keluar masuknya murid- murid (mutasi), penyelenggaraan pelayanan khusus (special services) bagi murid, mengatur penyelenggaraan dan aktivitas pengajaran, penyelenggaraan testing dan kegiatan evaluasi, mempersiapkan laporan tentang kemajuan masalah disiplin murid, pengaturan organisasi siswa, masalah absensi, dan sebagainya.
- 4) Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, rehabilitasi perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan serta kebersihan umum, usahamelengkapi yang berupa antara lain gedung (ruangan sekolah), lapangan tempat bermain, kebun dan halaman sekolah, meubel sekolah, alat-alat pelajaran klasikal dan alat peraga, perpustakaan sekolah, alat-alat permainan dan rekreasi, fasilitas pemeliharaan sekolah, perlengkapan bagi

penyelenggaraan khusus, transportasi sekolah, dan alat-alat komunikasi,

- 5) Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urus gaji guru-guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid-murid, usaha-usaha penyediaan biaya bagi penyelenggaraan pertemuan dan perayaan serta keramaian.
- 6) Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah-rumah- dan lembaga-lembaga sosial.

b. Tugas Kepala Sekolah Dalam Bidang Supervisi

Supervisi pada dasarnya pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakap/terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Supervisi adalah usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membantu guru-guru agar semakin mampu mewujudkan proses belajar mengajar.¹¹⁶ Kepala Sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas ini antara lain:

- 1) Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuantujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan.
- 2) Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid.

¹¹⁶ <http://massofa.wordpress.com/2011/02/09/fungsi-dan-tanggung-jawab-kepala-sekolah/> Diakses pada 01 Mei 2023, pukul 11:15 WIB.

- 3) Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan bakat masing-masing dan selanjutnya mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat, bakat dan kemampuannya.
- 4) Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar- standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai.

3. Peran Kepala Sekolah

Penelitian tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru- guru dan murid-murid. Pada umumnya kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plant, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah.

Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya, serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala sekolah di bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah. Menurut Purwanto, bahwa seorang kepala sekolah mempunyai sepuluh macam peranan, yaitu : “Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberiganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah”.¹¹⁷

¹¹⁷ Ngilim Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 65.

Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksana (executive) Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah ditetapkan bersama.
2. Sebagai perencana (planner) Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan, sehingga segala sesuatu yang akan diperbuatnya bukan secara sembarangan saja, tetapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan.
3. Sebagai seorang ahli (expert) Ia haruslah mempunyai keahlian terutama yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya.
4. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok (contoller of internal relationship) Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha mambangun hubungan yang harmonis.
5. Mewakili kelompok (group representative) Ia harus menyadari, bahwa baik buruk tindakannya di luar kelompoknya mencerminkan baik buruk kelompok yang dipimpinnya.
6. Bertindak sebagai pemberi ganjaran / pujian dan hukuman. Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak sumbangan terhadap kelompoknya.
7. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and modiator)
8. Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan antara anggota- anggotanya ia harus dapat bertindak tegas, tidak pilih kasih atau mementingkan salah satu anggotanya.
9. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya Ia haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya.

10. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist) Seorang pemimpin hendaknya mempunyai kosepsi yang baik dan realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis yang tegas menuju kearah yang dicita-citakan.
11. Bertindak sebagai ayah (father figure) Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya.

4. Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan utama yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara sekolah, orangtua, masyarakat, dan lembaga lain yang ada di masyarakat, 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing. 3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.¹¹⁸

Kepala sekolah profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya disekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan/kerja sama dengan masyarakat dalam rangka dalam membina pribadi peserta didik secara optimal. Peranan kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah sangatlah penting, maka dari itu ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut: a) Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. b) Kepala sekolah harus memahami tugas dan

¹¹⁸ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah.*, 187.

fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa.

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan unik, tugas dan fungsi kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat formal, sedangkan dari sisi yang lain seorang kepala sekolah dapat berperan sebagai menejer, pemimpin, pendidik dan yang tidak kalah penting seorang kepala sekolah juga berperan sebagai staf.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah di paparkan di atas, kiranya dapat penulis simpulkan menjadi beberapa poin penting, diantaranya:

1. Kepala Sekolah adalah, seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu Sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, dengan kriteria dan syarat tertentu untuk mengembangkan sekolah/lembaga mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.
2. Syarat yang harus dimiliki Kepala Sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Selain itu, juga harus memenuhi beberapa syarat akademis seperti Ijazah yang menunjang dengan profesionalisme dan hal-hal lain yang terkait.
3. Secara global tugas dan tanggung jawab Kepala sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi yang meliputi, pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawayan, pengelolaan kemuridan, gedung dan halaman, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat.
 - b. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervise yakni memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program

- dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar.
- c. Seorang kepala sekolah mempunyai sepuluh macam peranan, yaitu : “Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah.
 - d. Dalam pengembangan kurikulum kepala sekolah idealnya harus bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah sehingga dengan demikian akan berimplikasi bagi terbentuknya Sekolah yang unggul, dengan tetap memperhatikan warga sekolah sebagai basis pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirawat, et.al. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007
- Nugroho, Rian. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Daryanto, M. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Lazaruth, Soewadji. *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*. Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Muhaimin, et.al. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Poerwati, Loeloek Endah, dan Sofan Amri. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013
- Purwanto, Ngalm. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Sumidjo, Wahyu. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011

Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tjauan Teoritik Dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007. massofa.wordpress.com/2011/02/09/fungsi-dan-tanggung-jawab-kepala-sekolah/ Diakses pada 01 Mei 2023, pukul 11:15 WIB.



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI ¹¹⁹

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dalam proses pendidikan formal yang akan mengantarkan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Tidak mengherankan apabila kurikulum selalu dirombak atau ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Oleh sebab itu kurikulum juga harus selalu berkembang.

Menurut Muhaimin, istilah pengembangan dalam kurikulum dapat diartikan sebagai (1) suatu kegiatan menghasilkan suatu kurikulum, atau (2) proses yang mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, atau (3) atau kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum, dalam hal ini kurikulum PAI.¹²⁰ Bila setelah mengalami penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirilah kegiatan pengembangan tersebut. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu

¹¹⁹ Muhammad

¹²⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005): 10.

sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian intensif.

Berhubungan dengan perkembangan kurikulum, maka peran guru di dalam pengembangannya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan baik yang bersifat sentral maupun desentral, keduanya memerlukan penerapan dan pengembangan dari peran guru tersebut.

Guru memegang peranan yang sangat penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. sebagai perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri, konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang. Dialah yang mengolah, memperbaiki kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya. Karena guru juga merupakan barisan pengembangan kurikulum yang terdepan, guru yang harus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, sebagai pelaksana kurikulum maka guru pulalah yang menciptakan kegiatan belajar mengajar bagi murid-muridnya. Berkat keahlian keterampilan dan kemampuan dalam mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif yang menggairahkan yang penuh kesungguhan dan mampu mendorong kreatifitasnya anak.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyoroti peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di sini penulis akan memaparkan kondisi yang adadan perlunya dilakukan usaha untuk memperbaikinya.

PEMBAHASAN

A. Guru Dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional

Pendidik Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung-jawab adalah orangtua. Tanggung jawab itu disebabkan olehdua hal yaitu pertama, karena kodrat yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orangtua, dan karena itu ia

ditakdirkan pula bertanggung-jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orangtua yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya.

Dalam literatur kependidikan Islam, banyak istilah yang dipakai untuk menyebut seorang guru seperti ustadz, muallim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan muaddib, Semua istilah tersebut secara umum memiliki makna yang sama.

Dari hasil telaah terhadap literature pendidikan Islam, Muhaimin mengemukakan bahwa masing-masing istilah tersebut merupakan fungsi dan karaktersitik guru yang kemudian menjadi penyebutannya. Unutuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut: a. Ustadz b. Muallim c. Murabbi d. Mursyid e. Mudarris f. Muaddib.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka seorang guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang terkait dengan profesinya sebagai seorang guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah dijelaskan bahwa seseorang yang ingin menjadi guru atau pendidik, maka ia harus memiliki standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi.

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.¹²¹

Dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Tahun 2005 dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini”.¹²²

¹²¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007): 25.

¹²² SIKDIKNAS, *Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, PP RI No. 47 Tahun 2008, UU Guru Dan Dosen Tahun 2005* (Bandung: Rhusty Publisier, 2009): 77.

Sedangkan dalam PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi social.¹²³

Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan menjadi “*circle of instruction*” yaitu suatu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat di dalamnya.¹²⁴

Dalam kosa kata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj atau kurikulum berarti jalan terang yang dilalui pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka.¹²⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu adalah merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan keterampilan dan sikap mental. Ini berarti bahwa proses kependidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, akan tetapi hendaknya mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna, baik sebagai khalifah maupun abd melalui transformasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang harus tersusun dalam kurikulum pendidikan

¹²³ SIKDIKNAS: 77.

¹²⁴ Al-Rasyid and Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Press, 2005): 55.

¹²⁵ Omar Muhammad Al-Thoumy, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979): 478.

Islam.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan yang sistematis dan koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.¹²⁶ Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, definisi kurikulum sebagaimana disebutkan di atas dipandang sudah ketinggalan zaman. Saylor dan Alexander, mengatakan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi termasuk juga di dalamnya segala usaha lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik usaha tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.¹²⁷

a. Cakupan Kurikulum

Dengan demikian cakupan bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum pada masa sekarang nampak semakin luas. Berdasarkan pada perkembangan yang seperti ini, maka para perancang kurikulum meliputi empat bagian. Pertama, bagian yang berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh proses belajar mengajar. Kedua, bagian yang berisi pengetahuan, informasi-informasi, data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang merupakan bahan bagi penyusunan kurikulum yang isinya berupa mata pelajaran dalam silabus. Ketiga, bagian berisi metode penyampaian. Keempat, bagian yang berisi metode penilaian dan pengukuran atas hasil pengajaran tersebut.

b. Kriteria Kurikulum Pendidikan Islam

Berdasarkan pada asas-asas tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam menurut An Nahlawi¹²⁸ harus pula memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Sistem dan perkembangan kurikulum hendaknya selaras

¹²⁶ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997): 123.

¹²⁷ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, cet. iv (Bandung: Citra Adirya Nakti, 1991): 9.

¹²⁸ Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Dipenogoro, 1992): 273.

dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk mensucikannya, dan menjaganya dari penyimpangan dan menyelamatkannya.

- 2) Kurikulum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu ikhlas, taat beribadah kepada Allah, disamping merealisasikan tujuan aspek psikis, fisik, sosial, budaya maupun intelektual.
- 3) Pentahapan serta pengkhususan kurikulum hendaknya memperhatikan perodesasi perkembangan peserta didik maupun unisitas (kekhasan) terutama karakteristik anak-anak dan jenis kelamin.
- 4) Dalam berbagai pelaksanaan, aktivitas, contoh dan nash yang ada dalam kurikulum harus memelihara kebutuhan nyata kahidupan masyarakat dengan tatap bertopang pada cita ideal Islami, seperti rasa syukur dan harga diri sebagaiumat Islam.
- 5) Secara keseluruhan struktur dan organisasai kurikulum hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentngan dengan polah hidup Islami.
- 6) Hendaknya kurikulum bersifat realistik atau dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan negara tertentu.
- 7) Hendaknya metode pendidikan atau pembelajaran dalam kurikulum bersifat luwes sehingga dapat disesuaikan berbagai situasi dan kondisi serta perbedaan individual dalam menangkap dan mengolah bahan pelajaran.
- 8) Hendaknya kurikulum itu efektif dalam arti berisikan nilai edukatif yang dapat membentuk afektif (sikap) Islami dalam kepribadian anak.
- 9) Kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek tingkah laku amaliah Islami, seperti pendidikan untuk berjihad dan dakwah Islamiyah serta membangun masyarakat muslim dilingkungan sekolah.

c. Guru dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam

Guru dan kurikulum adalah komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Sertifikasi tenaga pendidikan dan pengembangan kurikulum yang belakangan ini tengah dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan melalui dua aspek di atas.¹²⁹

Pembuatan keputusan dalam pembinaan kurikulum bukan saja menjadi tanggung jawab para perencana kurikulum, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab para guru di sekolah. Para perencana kurikulum perlu membuat keputusan yang tepat, rasional, dan sistematis. Pembuatan keputusan tersebut tidak dapat dibuat secara acak-acakan dan tanpa pertimbangan, melainkan harus berdasarkan informasi dan data yang objektif terhadap kurikulum yang sedang berlaku. Evaluasi memegang peranan yang penting dalam membuat keputusan-keputusan yang kurikuler, sehingga dapat diketahui hasil-hasil kurikulum yang telah dilaksanakan, apakah kelemahan dan kekuatannya dan selanjutnya dapat dipikirkan mengenai perbaikan-perbaikan yang diperlukan.¹³⁰

Rahmat Raharjo mengatakan otonomi pengembangan kurikulum Pendidikan di sekolah-sekolah belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Para guru hanya mengadopsi contoh yang disusun BNSP. Pengembangan silabus sendiri masih bersifat hanya untuk memenuhi tuntutan administrasi, belum mampu mendorong terwujudnya kurikulum yang kontekstual pada setiap sekolah karena tidak adanya kesiapan yang matang dari sekolah-sekolah dan belum intensifnya bimbingan maupun pendampingan dari dinas terkait. Hal ini disebabkan keterbatasan kreatifitas SDM guru dalam mengembangkan pola-pola pembelajaran. Padahal pemberlakuan kurikulum telah diawali dengan uji coba yang intensif dan memadukannya dengan kurikulum berbasis kompetensi.

¹²⁹ Oemar Hamalik, *Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Mandar Maju, 1992): 57.

¹³⁰ Hamalik: 20.

Bagi para kepala sekolah diharapkan membenahi lagi persoalan-persoalan yang menyentuh akar permasalahan-permasalahan yang dihadapi para guru dan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah. Bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan hendaknya terus-menerus melakukan peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah, unsur-unsur terkait agar mereka kritis, enerjik, kreatif, berwawasan ke depan, dan mampu menjadi motifator, dan dinamisator pendidikan.

d. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam

Seorang guru tentunya sangat penting peranannya dalam pengembangan kurikulum, karena tanpa seorang guru, kurikulum tidak bisa diwujudkan. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya fasilitator, mediator, dan si penerima pesan. Sukses tidaknya suatu kurikulum, jelas akan ditentukan oleh kualitas dan profesionalisme seorang guru.

Pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral desentral.¹³¹

e. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi.

Disini guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan, dan evaluasi yang bersifat makro, mereka berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus, guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun, atau 1 semester. Menjadi tugas guru untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat memilih dan menyusun bahan pelajaran sesuai kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, kurikulum yang tersusun sistematis dan rinci akan memudahkan guru dalam implementasinya.

¹³¹ Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005): 200.

B. Peranan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Desentralisasi.

Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Pengembangan ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Jadi kurikulum terutama isinya sangat beragam, tiap sekolah punya kurikulum sendiri. Peranan guru lebih besar daripada dikelola secara sentralisasi, guru-guru turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran dalam program tahunan/semester/satuan pengajaran, tetapi didalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Disini guru juga bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum.

Karena guru-guru sejak awal penyusunan kurikulum telah diikuti sertakan, mereka memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya, dengan demikian pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum.

Terkait dengan peran guru dalam Kurikulum PAI, ada ketimpangan antara idealitas dengan realitas. Dalam kurikulum, mulai dari perumusan sampai pelaksanaannya, guru mempunyai peran sentral bahkan menjadi ujung tombak (*avant garde*). Bahkan, berhasil tidaknya pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada guru, sebab di tangan gurulah kompetensi minimal yang telah ditetapkan harus dijabarkan ke dalam bentuk silabus dan bahan ajar. Dengan demikian, dalam konteks KBK sebenarnya pihak yang paling berhak untuk membuat bahan ajar adalah para guru itu sendiri. Sebab, yang paling mengenal karakter peserta didik dengan segala keunikannya dan yang paling memahami konteks sosial-budaya masyarakat tempat sekolah berada adalah guru itu sendiri. Jika hal ini dilakukan, ekstrimnya buku ajar yang digunakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda, sebab muatan bahan ajarnya sangat dipengaruhi oleh

kebutuhan khas tiap sekolah.¹³²

Namun, realitasnya banyak sekolah yang lebih bersikap pragmatis dengancara membeli buku ajar yang dibuat oleh penerbit yang boleh jadi penulisnya sama sekali tidak memahami kekhasan sekolah di tiap wilayah. Berbagai alasan muncul, mulai dari biaya membuat buku mahal sampai guru tidak siap menulis. Ironis memang, buku ajar yang digunakan di luar Jawa, misalnya, tetapi yang membuatoreng Jawa.

Peran sentral guru yang lain adalah bahwa mereka yang harus menyelenggarakan pembelajaran aktif, mengkondisikan peserta didik mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan mengevaluasi peserta didik secara holistik dengan mempertimbangkan kinerja di kelas maupun di luar kelas. Tugas guru tidak hanya sebatas di ruang kelas ketika mengajar saja, namun juga di luar kelas bahkan luar sekolah. Karena begitu banyaknya perhatian yang harus dicurahkan guru dalam menjabarkan sebuah kurikulum, maka ibaratnya diperlukan sosok guru dengan dua karakter sekaligus, yaitu Superman dan Doraemon.

Tipe Superman mengindikasikan bahwa diperlukan kekuatan luar biasa dari guru untuk mendidikanak dengan berbagai keunikannya. Idealnya, tidak ada hal yang terlewatkan guru dari perilaku peserta didik. Seharusnya, guru hanya menghadapi 20 orang siswasaja, namun realitasnya dia harus mengajar di banyak kelas dan lebih dari satu mata pelajaran karena keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, tipe Doraemon menggambarkan bahwa seorang guru harus mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi siswa, dia harus mampu mengidentifikasi masalah, mendiagnosa, dan memberikan solusinya.

Pentingnya peranan guru dan ber tugas serta tanggung jawab-nya, terutama tanggung jawab moral untuk “dicontoh dan ditiru”, yaitu digugu kata-katanya dan ditiru perbuatan atau tingkah lakunya. Di sekolah, sebenarnya tugas dan peranan

¹³² Ali Muhammad, *Guru Dan Kurikulum* (Bandung: Sinar Baru, 2007): 7.

seorang guru bukanlah sebagai pemegang kekuasaan, tukang perintah melarang dan menghukum anak- anak/murid-muridnya, tetapi sebagai pembimbing dan pengabdian anak-anak, artinya, guru harus selalu siap sedia memenuhi kebutuhan jasmani-rohani anak dalam pertumbuhannya.¹³³

C. Hal-Hal Yang Harus dikuasai Seorang Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.

Guru adalah komponen penting dalam pendidikan. Di pundaknya siswa menggantungkan harapan terhadap pelajaran yang diajarkannya. Benci atau sukanya siswa terhadap suatu pelajaran bergantung pada bagaimana guru mengajar. Dikatakan bahwa guru adalah ujung tombak dalam sistem pendidikan. Sebagai ujung tombak, tentu sangat diharapkan kepada peran guru dan kharismanya di hadapan siswa.

Proses dan hasil pendidikan bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mendidik dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan keperibadiannya. Guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan intelektual yang luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh siswa.

Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya tersebut secara efektif dan efisien, para guru harus memiliki kompetensi tertentu. Di Indonesia telah ditetapkan sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai *instructional leader*, yaitu: (1) memiliki kepribadian ideal sebagai guru, (2) menguasai landasan kependidikan, (3) menguasai materi pembelajaran, (4) mampu

¹³³ Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya, *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum* (Jakarta: Rajawali, 1989): 11-13.

menyusun program pembelajaran, (5) mampu melaksanakan program pembelajaran, (6) mampu menilai proses dan hasil pembelajaran, (7) mampu menyelenggarakan program bimbingan, (8) mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, (9) mampu bekerjasama dengan sejawat dan masyarakat, dan (10) mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pembelajaran.¹³⁴

Untuk menjadi guru yang baik dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, seorang guru dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa ketrampilan yang harus dikuasai guru antara lain: 1. Keterampilan menjelaskan 2. Keterampilan bertanya 3. Mempunyai visi dan misi. 4. Mampu secara akademik 5. Beretika 6. Adaptif 7. Menguasai Manajemen 8. Menguasai Administrasi Keguruan Kompetitif dan Komparatif.

Guru yang ideal harus mempunyai daya saing sekaligus daya pembeda, semacam spesialisasi yang membedakan dengan guru lain. Daya komparatif akan memberi kekayaan intelektual bagi institusi yang bersangkutan sehingga kaya akan inovasi dan kras. Daya kompetitif akan meningkatkan bargaining position dalam lingkup yang sejajar sehingga memberi daya tarik karena kualitas yang menjanjikan.¹³⁵

KESIMPULAN

Kurikulum merupakan komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Sertifikasi tenaga pendidikan dan pengembangan kurikulum yang belakangan ini tengah dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan melalui dua aspek di atas. Guru adalah komponen

¹³⁴ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006): 199.

¹³⁵ Khoerotun Ni'mah, "Konsep Kompetensi Kepribadian Guru Pai," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2014): 79–94.

penting dalam Pendidikan sebagai ujung tombak dalam sistem pendidikan.

Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan keperibadiannya. Guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan intelektual yang luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyid, and Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Al-Thoumy, Omar Muhammad. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Dipenogoro, 1992.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hamalik, Oemar. *Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Ali. *Guru Dan Kurikulum*. Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*. Cet. iv. Bandung: Citra Adirya Nakti, 1991.
- Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ni'mah, Khoerotun. "Konsep Kompetensi Kepribadian Guru Pai." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2014): 79–94.

SIKDIKNAS. *Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, PP RI No. 47 Tahun 2008, UU Guru Dan Dosen Tahun 2005*. Bandung: Rhusty Publisier, 2009.

Syaodih, Nana. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya. *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum*. Jakarta: Rajawali, 1989.



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



EVALUASI KURIKULUM¹³⁶

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilaksanakan oleh seorang guru kepada siswanya dalam mencapai tujuan pembelajaran baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam kehidupan setiap insane harus memiliki kewajiban dalam mencari ilmu agar tidak bergelumur sebuah kebodohan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat, lebih – lebih terhadap ilmu agama islam. Pendidikan Islam adalah suatu kajian yang telah lama ada sehingga memiliki revitalisasi yang di tekuni oleh beberapa pihak. Pendidikan Islam telah mendominasi kajian dalam pengulasan ilmu pengetahuan, baik dari konsep, proses sehingga terdapat lembaga - lembaga pendidikan islam baik dari pesantren, madrasah hingga perguruan tinggi Islam.¹³⁷

Dalam sebuah pendidikan tidak akan lepas dengan sebuah evaluasi yang menjadi sebuah bagian penting dalam sebuah

¹³⁶ Mahfida Inayati

¹³⁷ Mulyadi, Mahfida Inayati, and Nor Hasan, "Revitalisasi Pendidikan Islam Tradisional Dalam Era Transformasi Digital," *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 487, doi.org/10.53515/qodiri.2023.20.3.486-500.

system manajemen mutu lembaga. Baik melalui perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Disamping adanya sebuah evaluasi maka sangat penting adanya kurikulum yang dirancang melalui tahap perencanaan, organisasi, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. kurikulum tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi rancangan, pelaksanaan dan hasil dari kurikulum tersebut.¹³⁸

Kurikulum wajib terdapat manajemen yang terancang dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam proses pelaksanaan kurikulum harus menyesuaikan dengan sebuah perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi, mulai dari sebuah metode, media, bahkan materi pembelajaran.¹³⁹ Disamping hal tersebut kurikulum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu proses pendidikan dan dipandang sebagai sebuah sistem inti.¹⁴⁰

Evaluasi kurikulum dapat diartikan sebagai sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau juga dapat dimaknai sebagai proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan.¹⁴¹ Dalam makalah ini, penulis akan mengkaji lebih luas untuk memahami pembahasan evaluasi kurikulum dalam pendidikan agama islam baik dari segi model maupun criteria evaluasi kurikulum.

¹³⁸ Tio Ari Laksono and Imania Fatwa Izzulka, "Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 3 (2022): 4083, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2776>.

¹³⁹ Razali M. Thaib and Irman Siswanto, "Inovasi Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif)," *Jurnal Edukasi Media Kajian Bimbingan Konseling* 1, no. 2 (2015): 216–217, <http://dx.doi.org/10.22373/je.v1i2.3231>.

¹⁴⁰ Rosmiaty Azis, "Implementasi Pengembangan Kurikulum," *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 7, no. 1 (2018): 44, <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4932>.

¹⁴¹ Eli Fitrotul Arofah, "Evaluasi Kurikulum Pendidikan," *Jurnal Tawadhu* 5, no. 2 (2021): 220, <https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.236>.

PEMBAHASAN

A. Model Evaluasi Kurikulum PAI Dalam Pembelajaran

Evaluasi adalah suatu proses dalam menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam sebuah pendidikan dapat diartikan sebuah proses atau usaha dalam mengumpulkan informasi yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki system pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan di tetapkan.¹⁴²

Secara fungsional evaluasi kurikulum adalah sebuah system kurikulum yang memiliki sisi bagian tersendiri dari evaluasi kurikulum. Maka dapat diketahui bahwa fungsi kurikulum terdapat tiga fungsi pokok diantaranya ialah pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi efek sistem kurikulum.¹⁴³ dalam pengembangan kurikulum terapat sebuah proses kegiatan dalam melaksanakan percobaan evaluasi, sehingga jika terdapat penemuan tentang kekurangan dapat diperbaiki untuk lebih baik.

Evaluasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting. Umumnya mulai pada penentuan kebijaksanaan pendidikan atau dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil dari sebuah evaluasi kurikulum dapat di manfaatkan oleh pemegang kebijaksanaan dan pengembang kurikulum pendidikan dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem dan pengembangan model kurikulum yang digunakan.

Evaluasi kurikulum pendidikan sangatlah penting dalam dunia pendidikan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa banyak sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik yang diberikan oleh serang pendidik. Evaluasi kurikulum pendidikan agama

¹⁴² Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi Dan Inovasi* (Yogyakarta, 2009) 104.

¹⁴³ Mohammad Adnan, "Evaluasi Kurikulum Sebagai Kerangka Acuan Pengembangan Pendidikan Islam," *Al Idaroh Jurnal Study Manajemen Islam* 1, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v1i2.25>

Islam mencakup hasil dan proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang banyaknya perolehan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan.¹⁴⁴ Agar evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam tidak memiliki kesulitan dalam perencanaan dan penyusunan. Maka perlulah menggunakan model – model evaluasi kurikulum dalam menyelesaikannya.

Model evaluasi kurikulum merupakan struktur konseptual dan operasional yang dipakai untuk mengevaluasi instrument, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring yang menjamin jalannya pelaksanaan pembelajaran. Model evaluasi kurikulum berdasarkan model evaluasi yang dikembangkan di negara AS, Inggris, dan Australia, dibedakan menjadi tiga, yaitu:¹⁴⁵

1. Model Evaluasi Kuantitatif

Ciri-ciri dari evaluasi ini sangat terlihat menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan menggunakan sebuah pendekatan proses dalam mengembangkan kriteria evaluasi namun lebih condong kepada metodologi kuantitatif dan penggunaan tes.

2. Model Evaluasi Kualitatif

Model evaluasi ini berlawanan arah dengan model evaluasi kuantitatif, dimana model ini mengedepankan suatu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, maka dalam proses kegiatan lebih memperhatikan suatu kefokuskan terhadap pelaksanaan atau proses. Baik secara tersendiri maupun dari sisi dimensi lainnya

¹⁴⁴ Nurul Anam, "Manajemen Kurikulum Pembelajaran PAI," *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 1, no. 2 (2021): 139, <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v1i2.10>.

¹⁴⁵ Nilna Zahril Hayati, "Tugas Esai Pengembangan Kurikulum Macam-Macam Model Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Yang Dapat Digunakan Pada Pendidikan Dasar Tugas Esai Pengembangan Kurikulum," *Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* 1, no. 1 (2022): 1.

3. Model-model Ekonomi Mikro

Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model yang menggunakan model evaluasi kuantitatif yang memiliki fokus utama pada hasil. Pertanyaan besar dari model ini adalah apakah hasil belajar yang diperoleh siswa sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan.

Disamping hal tersebut secara umum model evaluasi kurikulum memiliki beberapa model diantaranya ialah :¹⁴⁶

4. Evaluasi kurikulum model penelitian (research evaluation model).

Model ini menggunakan penelitian berdasarkan atas teori dan metode psikologi serta eksperimen lapangan. Dalam pendekatan ini menggunakan eksperimen lapangan adalah comparative approach, yakni mengadakan perbandingan anatar dua macam kelompok.¹⁴⁷ sehingga kurikulum PAI dalam pembelajaran menfokuskan kepada sebuah eskperimen lapangan dengan mengadakan perbandingan antara mata pelajaran PAI dan lainnya. Maka terdapatlah hasil dari evaluasi model penelitian ini.

5. Model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan (goal/objective oriented evaluation model).

Model evaluasi ini dianggap lebih praktis untuk mendesain dan mengembangkan suatu kurikulum karena menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Sehingga terdapat hubungan yang logis antara kegiatan, hasil dan prosedur pengukuran hasil. Model ini diciptakan oleh Tyler. Model ini dengan serius menekankan kehadiran siklus penilaian yang secara langsung bergantung pada tujuan pendidikan yang sudah ditentukan bersama-sama sehingga dapat menunjukkan kesiapan, pada saat seseorang instruktur

¹⁴⁶ Muhammad Edy Muttaqin, "Evaluasi Kurikulum Pendidikan Islam," *Prosiding Nasional* 3, no. 1 (2020): 174-175, iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/index.

¹⁴⁷ Ummi Latifah, "Fungsi Dan Model Evaluasi Kurikulum Dalam Pendidikan," *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. 1, no. 1 (2020): 1–2, eprints.umsida.ac.id/id/eprint/10889.

berkomunikasi bersama pelajarnya berubah untuk fokus utama dalam sistem pembelajaran.¹⁴⁸

Model ini terdapat model yang tampaknya paling cepat. Sebuah penilaian evaluasi pada penilaian ini adalah alasan untuk evaluasi yang baik dibentuk beberapa waktu ketika penilaian belum dilakukan. Penilaian selesai tidak berhenti, berkelanjutan, memevaluasi sebagian dari pertujuan yang selesai dilaksanakan selama waktu yang dihabiskan melaksanakan program

6. Model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan (goal free evaluation model).

Penilaian dibuat Michael Scriven bisa dianggap bertentangan sama penilaian utama yang dibuat oleh Tyler, evaluator terus-menerus menyaring tujuan, untuk menjadi spesifik dari awal cara yang paling umum untuk melanjutkan, dalam model penilaian bebas obyektif benar-benar mendapat beberapa jarak dari tujuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Michael Scriven, dalam menyelesaikan penilaian program evaluator tidak ada alasan kuat untuk fokus pada apa motivasi di balik program. Apa yang harus dipertimbangkan pada pembelajaran ini yaitu kinerja penilaian yang membedakan penampilan.

Model evaluasi lepas tujuan dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini bertentangan dengan model yang pertama dimana perbedaannya terletak pada orientasi tujuan. Sedangkan Model evaluasi lepas tujuan adalah model yang lepas dari tujuan spesifik, tidak lepas dari tujuan global. Model ini tetap memperkirakan tujuan global dari suatu program.¹⁴⁹ Adapun alasan kenapa tujuan program tidak harus diperhitungkan karena ada taksiran pada evaluator lebih lengkap mengamati setiap

¹⁴⁸ Meila Yufriana Devi, Rahma Hidayanthi, and Yanti Fitria, "Model-Model Evaluasi Pendidikan Dan Model Sepuluh Langkah Dalam Penilaian," *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2022): 678, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1934>.

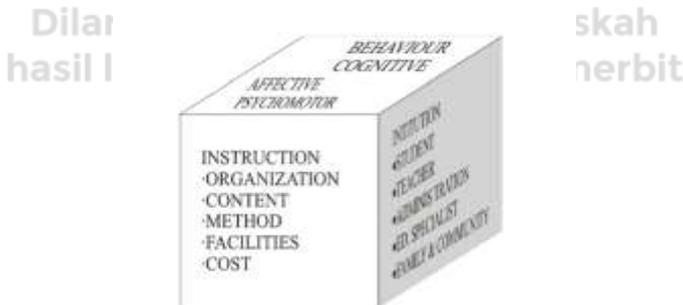
¹⁴⁹ Meila Yufriana Devi, Rahma Hidayanthi, and Yanti Fitria, "Model-Model Evaluasi Pendidikan Dan Model Sepuluh Langkah Dalam Penilaian," *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2022): 679, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1934>; Devi, Hidayanthi, and Fitria, "Model-Model Evaluasi Pendidikan Dan Model Sepuluh Langkah Dalam Penilaian," 2022.

tujuan spesifik. Jika setiap tujuan spesifik tercapai, maka akan tercapai penilaian, namun evaluator tertinggal melihat sejauh mana setiap penilaian tersebut mendukung penilaian terakhir yg diperlukan oleh tujuan universal maka hasilnya jumlah penampilan spesifik tidak memiliki banyak faedah.

7. Model evaluation program for innovate curriculumbs (EPIC)

Model EPIC atau evaluation program innovative curriculum menggambarkan keseluruhan program evaluasi dalam sebuah kubus. Menurut Nana jika dipandang bentuk evaluasi model ini dalam sebuah kubus, maka yang akan tampak adalah tiga bidang kubus. Bidang pertama adalah behavior atau perilaku yang menjadi sasaran pendidikan yang meliputi perilaku cognitive, affective, dan psychomotor. Bidang kedua adalah instruction atau pengajaran, yang meliputi organization, content, method, facilities and cost, dan bidang ketiga adalah kelembagaan yang meliputi student, teacher, administrator, educational specialist, family and community¹⁵⁰

Evaluasi dengan model EPIC dapat digambarkan sebagai berikut:

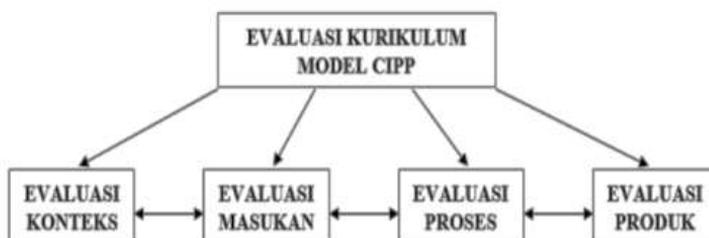


Gambar 1. Model evaluation program for innovate curriculumbs (EPIC)

¹⁵⁰ Pandomuan N.J.M Sinambela, "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kajian Teoritis Tentang Evaluasi Kurikulum Dalam Pembelajaran)," *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional* 3, no. 1 (2006): 26, jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6988/5982.

8. Model CIPP (Context, Input, Process, and Product).

Evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, and Product) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam. Dan kemudian dikembangkan pada tahun 1966. Model evaluasi CIPP merupakan sebuah struktur yang komprehensif untuk mengarahkan proses pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap suatu program, proyek, personalia, produk, institusi dan system. Stufflebeam dalam bukunya *Education Evaluation and Decision Making*, yang dikutip daryanto, menggolongkan system pendidikan atas empat ruang lingkup yaitu context, input, process and product atau disebut juga dengan model CIPP.¹⁵¹



Gambar 2. Model evaluasi kurikulum CIPP

Adapun jenisnya dijelaskan oleh Stufflebeam sebagai berikut:¹⁵²

- a. Evaluasi context: evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum PAI dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki kurikulum PAI. Tujuan pokok dari evaluasi konteks kurikulum PAI ialah menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang

¹⁵¹ Hery Noer Aly Vina Putri Rahayu, "Evaluasi Kurikulum Pendidikan," *Jurnal on Education* 15, no. 2 (2023): 1–23, www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1328/1050.

¹⁵² Esti Wahyu Kurniawati, "Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model CIPP (Context, Input, Process, Product)," *Jurnal GHAITSA Islamic Education Jurnal* 2, no. 1 (2021): 24, <https://siducat.org/index.php/ghaitsa/article/view/168>.

telah ditetapkan memenuhi kebutuhan- kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran kurikulum pendidikan khususnya pada kurikulum PAI.

- b. Evaluasi input: pada evaluasi ini yang sangat penting ialah dalam membantu menentukan program untuk melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membantu klien mengkaji alternatif-alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan- kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Dengan perkataan lain, evaluasi input berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur-hamburkan sumber daya.
- c. Evaluasi product: evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program.

Dari deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi model CIPP yang dikemukakan oleh Sufflebeam tidak hanya mengevaluasi hasil saja, melainkan dari seluruh aspek antara lain aspek context, input, process dan product (prodak yang dihasilkan). Sehingga penilaian yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh.

9. Model Pendekatan Proses

Dalam model ini mengemukakan adanya tiga tahap evaluasi kurikulum yaitu: tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan tahap penilaian.¹⁵³ Maka dalam evaluasi kurikulum PAI dalam sebuah pelajaran harus melaksanakan sebuah proses yang harus dirancang sebelumnya dengan tiga tahap yang penting, tahap persiapan, dimana seorang pendidik harus menyiapkan sebuah pembelajaran. Tahap pengumpulan data juga dapat

¹⁵³ Umami Latifah, "Fungsi Dan Model Evaluasi Kurikulum Dalam Pendidikan."3.

mengumpulkan data- data yang valid mengenai kurikulum PAI dalam sebuah pengajaran dan yang terakhir ialah tahap penilaian dimana pada tahap ini adalah tahap terakhir yang mana dengan persiapan dan juga pengumpulan data yang valid dapat di nilai dan menghasilkan nilai akhir.

10. Model Measurement

Model evaluasi kurikulum ini dikembangkan Thorndike dan Ebel. Mereka menyatakan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah sebagai pengukuran perilaku peserta didik untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok.¹⁵⁴

Hasil evaluasi digunakan untuk kepentingan evaluasi/seleksi peserta didik untuk membandingkan efektivitas antara dua atau lebih program atau kurikulum. Objek evaluasi mencakup hasil belajar peserta didik, terutama yang dapat diukur melalui “paper and pencil test”. Dengan demikian, data yang dipergunakan dalam model ini hanya terbatas pada data objektif, khususnya skor hasil test. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini terdiri dari :

- a. Penentuan kedudukan individu dalam kelompok
- b. Perbandingan hasil belajar antara dua atau lebih dari kelompok yang menggunakan program kurikulum yang berbeda, dengan teknik penilaian yang digunakan dengan tes, khususnya tes objektif

B. Kriteria Dan Pendekatan Evaluasi Kurikulum PAI

Evaluasi kurikulum PAI terdapat sebuah kriteria yang mengharuskan bagi sebuah proses pembelajaran. Dengan adanya fungsi dan kedudukan evaluasi kurikulum dalam Pendidikan PAI sangat perlu dalam sebuah proses pembelajaran. Maka hal tersebut berkenaan dengan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁴ Sinambela, “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kajian Teoritis Tentang Evaluasi Kurikulum Dalam Pembelajaran).”30.

- Konsep sebagai moral judgement Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai.
- Evaluasi dan penentuan keputusan Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan.
- Evaluasi dan konsensus nilai Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Ada dua kriteria dalam penilaian kurikulum:
 - Kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut kriteria patokan
 - Kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana adanya¹⁵⁵

Dengan hal tersebut tersebut dapat di simpulkan bahwa setiap melaksanakan evaluasi harus mengetahui tentang kriteria – kriteria evaluasi lebih – lebih pada evaluasi kurikulum PAI. Disamping adanya sebuah criteria maka juga terdapat pendekatan evaluasi kurikulum PAI yang dapat diartikan sebagai cara kerja melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan evaluasi kurikulum.¹⁵⁶

Adapun pendekatan-pendekatan dalam pengembangan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:¹⁵⁷

- Pendekatan Berorientasi pada Bahan Pelajaran
- Pendekatan Berorientasi pada Tujuan Sementara
- Pendekatan dengan Pola Organisasi Bahan

¹⁵⁵ Edy Muttaqin, "Evaluasi Kurikulum Pendidikan Islam."174.

¹⁵⁶ Nurul Huda, "Pendekatan–Pendekatan Pengembangan Kurikulum," *Jurnal Qudwatuna* II, no. September (2019): 176, ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/qudwatuna/article/view/21.

¹⁵⁷Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teori Dan Praktek*, Aswaja Pressindo, 2014.65.

Sedangkan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama islam (PAI) menurut Muhaimin dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Pendekatan Subjek Akademis (SA)

Pendekatan ini dalam proses penyusunan kurikulum berdasarkan pada system disiplin ilmu masing – masing dalam pembelajaran PAI, yang mana pembelajaran PAI terpecah – pecah menjadi beberapa bagian diantaranya: Fikih, Akidah Akhlak, Qurdis dan juga Sejarah Kebudayaan Islam dan lain sebagainya. Proses pengembangan pendekatan SA dengan cara menetapkan mata pelajaran menjadi acuan utama untuk dipelajari oleh peserta didik. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan Subandijah yang mana pendekatan tersebut berpusat pada bahan. Pendekatan ini memprioritaskan sifat perencanaan program dan juga mengedepankan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu.¹⁵⁹ Ada tiga pendekatan dalam pendekatan ini untuk pengembangan kurikulum SA diantaranya:¹⁶⁰

Pendekatan Pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. peserta didik belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekadar mengingat-ingatnya.

Pendekatan kedua, adalah studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif-terpadu. Pelajaran tersusun atas satuan-satuan pelajaran, dalam satuan-satuan pelajaran tersebut batas-batas ilmu menjadi hilang. Pengorganisasian tema-tema pengajaran didasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah dan problemproblem yang ada.

¹⁵⁸ Muhaimin, Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 140.

¹⁵⁹ Abdillah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktiki* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 140.

¹⁶⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 83 -84.

Pendekatan ketiga, adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan matamata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.

2. Pendekatan Humanistis

Pendekatan humanitis dalam pengembangan kurikulum PAI bertolak dari ide “memanusiakan manusia” Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia menjadi lebih manusiawi (human), disamping itu bertujuan untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalifah fi al ardh). Serta mencoba untuk melihat dalam spectrum yang luas mengenai perilaku manusia.¹⁶¹ Manusia mengemban dua tugas mulia, yaitu sebagai hamba Allah (‘abdullah) dan sebagai khalifah Allah (khalifatullah).

Dalam evaluasi, kurikulum humanistic memiliki pendekatan yang condong pada proses dari pada hasil. Ahli humanis lebih tertarik dalam pertumbuhan tanpa memperhatikan tentang bagaimana pertumbuhan itu diukur atau ditentukan. Sasaran mereka merupakan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka, lebih berdiri sendiri.¹⁶²

Pada pendekatan humanistik berpusat pada siswa, jadi *student centered*, dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. menurut somantrie dalam abdullah idi, bahwa pada pendekatan humanistik prioritasnya adalah pengalaman belajar yang

¹⁶¹ Musyarrafah Sulaiman Kurdi, “Evaluasi Implementasi Desain Pendidikan Karakter Berbasis Pendekatan Humanistik,” *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2018): 128, <https://doi.org/10.32332/elementary.v4i2.1243>.

¹⁶² Fahmi Khumaini, Farida Isroani, and Mamlu’ah Aya, “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam : Kurikulum Dan Pendekatan Humanistik Di Era Digital,” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 691, <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.291>.

diarahkan terhadap tanggapan minat, kebutuhan dan kemampuan anak.¹⁶³

3. Pendekatan Teknologis

Pendekatan yang ketiga, ialah pendekatan teknologis dalam pengembangan kurikulum berbeda dengan menganalisis kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan analisis yang akan dihadapi. Kriteria pendekatan ini mengacu kepada hasil kurikulum diharuskan untuk diukur atau dievaluasi, oleh karena itu tujuan berupa sebuah indikator yang mengharuskan menggunakan kata –kata fungsional dan oprasional. Dalam penyusunan kurikulum atau suatu program yang ada pada pendidikan dalam pendekatan ini berbeda dengan analisis kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Oleh karena itu materi yang akan diajarkan, kriteria penilaian keberhasilan dan strategi pembelajaran ditentukan sesuai dengan analisis pekerjaan.¹⁶⁴

4. Pendekatan Rekonstruksi Sosial (RS)

Pada pendekatan ini, proses penyusunan kurikulum berpusat pada masalah sosial yang ada pada lingkungan masyarakat. Sehingga pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan cara kooperatif dan kolaborati. Maka dengan hal tersebut dapat menyelesaikan dengan tatanan masyarakat semakin baik. Maka fungsi dari adanya pendidikan memiliki upaya dalam mewujudkan suatu masyarakat yang lebih baik. Sehingga dalam materi pelajaran pendidikan islam terdiri dari isu – isu yang sebenarnya di hadapi oleh orang – orang pada umumnya di masyarakat.¹⁶⁵

Dari keempat paparan diatas tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pengembangan kurikulum PAI agar hasil yang di dapatkan sesuai dan benar – benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pengelola. Pengembangan kurikulum dalam

¹⁶³ Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Prakteki*, 130.

¹⁶⁴ Huda, "Pendekatan–Pendekatan Pengembangan Kurikulum.", 182.

¹⁶⁵ Khairuddin Bangun and Tasman Hamami, "Pendekatan Rekonstruksi Sosial Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Raudhah* 7, no. 2 (2022): 112, <http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/206>.

kurikulum pendidikan agama islam dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan menganalisis terlebih dahulu karakteristik atau kriteria serta pendekatan evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama islam.

KESIMPULAN

Evaluasi kurikulum pendidikan agama islam (PAI) sangat penting dalam lembaga pendidikan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa banyak sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik yang diberikan oleh seorang pendidik. Ada beberapa model evaluasi kurikulum dalam menyelesaikannya Model evaluasi kurikulum yang dikembangkan di negara AS, Inggris, dan Australia, dibedakan menjadi tiga, model evaluasi kuantitatif, model evaluasi kualitatif dan model-model ekonomi mikro sedangkan secara umum diantaranya ialah : evaluasi kurikulum model penelitian (research evaluation model), model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan (goal/objective oriented evaluation model), model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan (goal free evaluation model), model evaluation program for innovate curriculum (epic), model cipp (context, input, process, and product), model pendekatan proses dan model measurement.

Evaluasi kurikulum PAI terdapat sebuah kriteria yang mengharuskan bagi sebuah proses pembelajaran dan pendekatan evaluasi kurikulum PAI diantaranya: Pendekatan berorientasi pada bahan pelajaran, pendekatan berorientasi pada tujuan sementara dan pendekatan dengan pola organisasi bahan. Sedangkan menurut Muhaimin bahwa pendekatan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) diantaranya : Pendekatan subjek akademis (SA), pendekatan humanistik, pendekatan teknologis dan pendekatan rekonstruksi sosial (RS).Keempat pendekatan yang di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kurikulum PAI yang pada akhirnya akan menghasilkan kurikulum PAI yang benar-benar sesuai dengan harapan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohammad. "Evaluasi Kurikulum Sebagai Kerangka Acuan Pengembangan Pendidikan Islam." *Al Idaroh Jurnal Study Manajemen Islam* 1, no. 2 (2017).
- Anam, Nurul. "Manajemen Kurikulum Pembelajaran PAI." *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v1i2.10>.
- Arofah, Eli Fitrotul. "Evaluasi Kurikulum Pendidikan." *Jurnal Tawadhu* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.236>.
- Azis, Rosmiaty. "Implementasi Pengembangan Kurikulum." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4932>.
- Devi, Meila Yufriana, Rahma Hidayanthi, and Yanti Fitria. "Model-Model Evaluasi Pendidikan Dan Model Sepuluh Langkah Dalam Penilaian." *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1934>.
- . "Model-Model Evaluasi Pendidikan Dan Model Sepuluh Langkah Dalam Penilaian." *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1934>.
- Edy Muttaqin, Muhammad. "Evaluasi Kurikulum Pendidikan Islam." *Prosiding Nasional* 3, no. 1 (2020). iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/index.
- Hamdan. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teori Dan Praktek*. Aswaja Pressindo, 2014.
- Hayati, Nilna Zahril. "Tugas Esai Pengembangan Kurikulum Macam-Macam Model Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Yang Dapat Digunakan Pada Pendidikan Dasar Tugas Esai Pengembangan Kurikulum." *Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* 1, no. 1 (2022).
- Huda, Nurul. "Pendekatan–Pendekatan Pengembangan Kurikulum." *Jurnal Qudwatuna II*, no. September (2019).

<http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/qudwatuna/article/view/21>.

Idi, Abdillah. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktiki*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

Khairuddin Bangun, and Tasman Hamami. "Pendekatan Rekonstruksi Sosial Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Raudhah* 7, no. 2 (2022). <http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/206>.

Khumaini, Fahmi, Farida Isroani, and Mamlu'ah Aya. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam : Kurikulum Dan Pendekatan Humanistik Di Era Digital." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022):. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.291>.

Kurdi, Musyarrafah Sulaiman. "Evaluasi Implementasi Desain Pendidikan Karakter Berbasis Pendekatan Humanistik." *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32332/elementary.v4i2.1243>.

Kurniawati, Esti Wahyu. "Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model CIPP (Context, Input, Process, Product)." *Jurnal GHAITSA Islamic Education Jurnal* 2, no. 1 (2021). <https://siducat.org/index.php/ghaitsa/article/view/168>.

Laksono, Tio Ari, and Imania Fatwa Izzulka. "Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 3 (2022):. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2776>.

Muhaimin. *Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah Dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Mulyadi, Mahfida Inayati, and Nor Hasan. "Revitalisasi Pendidikan Islam Tradisional Dalam Era Transformasi Digital." *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.20.3.486-500>.

- Sinambela, Pandomuan N.J.M. “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kajian Teoritis Tentang Evaluasi Kurikulum Dalam Pembelajaran).” *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional* 3, no. 1 (2006). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6988/5982>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Thaib, Razali M., and Irman Siswanto. “Inovasi Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif).” *Jurnal Edukasi Media Kajian Bimbingan Konseling* 1, no. 2 (2015). <http://dx.doi.org/10.22373/je.v1i2.3231>.
- Ummi Latifah. “Fungsi Dan Model Evaluasi Kurikulum Dalam Pendidikan.” *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. 1, no. 1 (2020). <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/10889>.
- Vina Putri Rahayu, Hery Noer Aly. “Evaluasi Kurikulum Pendidikan.” *Jurnal on Education* 15, no. 2 (2023). <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/1328/1050>.
- Zaini, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi Dan Inovasi*. Yogyakarta, 2009.

INDONESIA
www.penerbitanmurah.com
Bintang Keras, Mencetak Paskal
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



PERKEMBANGAN KURIKULUM PAI DI SEKOLAH INDONESIA¹⁶⁶

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum harus berdasarkan dari landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula pada kegagalan proses pembentukan karakter serta perkembangan manusia.¹⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut, program Pendidikan merupakan cara peserta didik melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.

¹⁶⁶ Sherly Quraisy

¹⁶⁷ Firmansyah, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 2 (2020): 165, <https://doi.org/10.24114/antro.v5i2.14384>.

Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, akan tetapi kurikulum meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, seperti halnya bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain.¹⁶⁸

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, kurikulum terdiri dari seperangkat rencana, peraturan mengenai isi bahan pelajaran, serta cara yang tepat sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada kurikulum terdapat seperangkat rencana pembelajaran, isi materi, bahan serta proses belajar mengajar, hal ini merupakan bagian terpenting dalam tujuan pendidikan. Kurikulum juga mengatur model-model evaluasi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan belajar peserta didik. Kurikulum mengatur standar yang tepat dalam memberikan penilaian bagi pendidik maupun peserta didik. Sehingga pendidikan berlangsung secara tertib dan terstruktur dengan kurikulum.¹⁶⁹

Dalam mewujudkan kurikulum tersebut maka perlu dikaji kembali dan berkelanjutan bagaimana menentukan kurikulum yang tepat untuk digunakan pada satuan pendidikan, yang mana diperlukan pengembangannya. Seiring berjalannya masa ke masa, kebutuhan manusia akan pengetahuan akan semakin berkembang dan berubah, dan sesuatu yang sangat tampak adalah perkembangan teknologi. Hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kurikulum, maka dalam pengembangannya perlu adanya landasan atau dasar yang tepat sebagai pondasi bagi pengembangan kurikulum.

Maka dari itu, dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan terkait perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam yaitu, mulai dari sejarah perkembangan kurikulum dari pra kemerdekaan hingga masa reformasi atau hingga saat ini.

¹⁶⁸ Ahmad Taufik, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2019): 81, <http://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/al-munadzomah/article/view/320>.

¹⁶⁹ Satria Kharimul Qolbi and Tasman Hamami, "Implementasi Asas-Asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 1121.

PEMBAHASAN

Sejarah mencatat bahwasanya pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan masuknya Islam ke Indonesia yang mana menurut teori Makkah dan teori Maritim terjadi pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M. Pendidikan yang berkembang di Indonesia, sudah memberikan perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang terkait perjalanan kebijakan pendidikan, mulai dari masa pra kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Dengan strategi penataan kurikulum pendidikan, diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan, baik nasional maupun daerah.¹⁷⁰

Pada masa pra kemerdekaan, kebijakan pemerintah Belanda atau Jepang terhadap Pendidikan bersifat diskriminatif. Pemberlakuan kebijakan ini tidak lepas dari kepentingan mereka sebagai bangsa penjajah yang merupakan bagian dari politik kolonial. Diskriminasi terhadap Pendidikan juga tidak lepas dari kekhawatiran penjajah terhadap bangsa yang merupakan penduduk mayoritas beragama Islam di Indonesia. Sebagai halnya dapat terlihat dari sejarah, umat Islam yang sangat menentang penjajahan Belanda ataupun Jepang.

Berakhirnya masa penjajahan Belanda dan Jepang, menjadi babak baru kebijakan pendidikan terutama pendidikan agama Islam dalam sejarah bangsa Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Pemerintahan yang dikenal dengan istilah orde lama ini menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam menyusun sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya adalah kebijakan pendidikan Islam.¹⁷¹

¹⁷⁰ Muhammad Sholeh Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (2020): 16, <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.

¹⁷¹ Hoddin: 17.

A. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia Pra Kemerdekaan

Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa yaitu pada masa kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia, pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis.

Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia yaitu terjadinya keruntuhan system pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang. Pada masa ini munculah sekolah rakyat yang disebut *Kokumin Gako* selama 6 tahun lamanya. Setelah itu pelajaran yang berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.¹⁷²

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam pada masa pra kemerdekaan tidak begitu diperhatikan, pendidikan pada pra kemerdekaan ini dipengaruhi oleh kolonialisme yang berpusat pada agama mereka sendiri (Penjajah), selain itu dari segi kelas hanya disediakan untuk kalangan atas, yaitu anak-anak priyai. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang dapat menciptakan para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi, serta menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan colonial.

¹⁷² Fitri Wahyuni, "Kurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia)," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 10, No. 2 (2015): 233.

B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia Pada Masa Orde Lama

Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya kurikulum pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perubahan. Kurikulum pada masa Orde Lama dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁷³

1. Kurikulum 1947

Adanya kurikulum ini karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam penerapannya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh karena itu, banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Keberadaan pendidikan agama Islam sudah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama) tahun 1946. Kurikulum 1947 ini masih begitu kental dan mirip dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Menurut Sutrisno (2012), hal ini terjadi disebabkan karena negara Indonesia baru saja merdeka. Sehingga proses Pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta negara, berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.

2. Kurikulum 1952-1964

Muatan dalam kurikulum ini adalah pengajaran yang harus disampaikan pada siswa, dalam bentuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan Sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajarannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam perminggu.

Selain itu juga, DEPAG telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang dikepalai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama, lalu

¹⁷³ Amirah Mawardi, "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *Jurnal Tarbawi* 1, no. 1 (2016): 31-32.

disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah selama satu minggu.

C. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Indonesia Pada Masa Orde Baru

Jika ditapaki kembali ke belakang, sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik.¹⁷⁴ Masa Orde Baru ini dipahami bahwa terjadinya peralihan kepemimpinan Indonesia dari Soekarno ke Soeharto yang biasa dikenal dengan peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru, yang memberikan dampak pada seluruh tatanan negara di Indonesia, tidak terkecuali pada sistem pendidikan. Dampak yang dimunculkan akibat peralihan kekuasaan tersebut berimbas juga pada kurikulum yang ikut berganti. Berikut ini paparan kurikulum yang diberlakukan pada masa Orde Baru di antaranya:¹⁷⁵

1. Kurikulum 1968

Kurikulum yang lahir pada tahun ini adalah satu kesatuan dari kurikulum 1964, yang mana kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum 1964 yang telah dirancang 4 tahun sebelumnya. Kurikulum 1968 adalah salah satu integrasi kurikulum di era Orde Baru. Pemberlakuan pendidikan agama masih berdasarkan pada kurikulum 1964. Kurikulum 1968 memberlakukan pendidikan agama masih sama dengan kurikulum sebelumnya yaitu sebanyak 2 jam dalam satu minggu. Kurikulum ini mengintegrasikan antara pendidikan kurikulum sebelumnya dan menjadi penyempurnaannya. Oleh sebab itu, kurikulum ini menjadi *icon* Indonesia di masa itu.

¹⁷⁴ Yuyun Yunita, "Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Umum," *Jurnal Dewantara* 2, no. 02 (2016): 170.

¹⁷⁵ Nurhasanah and Arief Sukino, "Perkembangan Dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 147-148, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1517>.

2. Kurikulum Orde Baru Tahun 1975

Kurikulum ini berorientasikan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam Pendidikan pada proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Pada masa ini juga, muncul dan dikenalnya istilah satuan pembelajaran yang biasa kita kenal dengan satuan pembelajaran perencanaan pembelajaran di setiap pembahasan. Terbitnya SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri P&K. Selain itu, telah disusun juga kurikulum madrasah. Kurikulum tersebut membuat lega para orang tua, yaitu bagian pendidikan agama naik menjadi 30% yang semula 25%, dan 70% untuk pendidikan umum. Pada masa itu, ijazah lulusan madrasah mulai diakui dan diperbolehkan perpindahan dari sekolah madrasah untuk mutasi ke sekolah umum lainnya.

3. Kurikulum 1984

Peran siswa dalam mencermati sesuatu menjadi ciri dari kurikulum ini, yang mana merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Ciri khas dari kurikulum ini tidak hanya mencermati melainkan mengelompokkan, mendiskusikan, serta melaporkan. Kurikulum ini memunculkan model belajar yang bermacam-macam di antaranya adalah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), yang mana dalam model belajarnya guru hanyalah fasilitator, sehingga yang kita lihat dalam model pembelajaran seperti ini siswanya saja yang aktif. Metode ceramah yang biasa digunakan oleh para guru sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit dengan adanya model pembelajaran ini.

Dalam kurikulum ini, pendidikan agama diberikan porsi yang sama pada kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, diperkuat dengan SKB 2 Menteri yang menegaskan bahwa lulusan dari madrasah boleh melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum. Hal ini membuat para orang tua tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah. Di antara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategis, di antaranya: (1) Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan.

(2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserlarasannya antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya. (3) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

4. Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999

Kurikulum ini tidak serta-merta lahir dengan begitu, kurikulum ini adalah hasil dari upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya yaitu kurikulum tahun 1975 serta kurikulum tahun 1984. Pada periode ini, telah muncul UU SISDIKNAS No. 02 tahun 1989 yang berisikan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang bercorak islami. Hal ini tidak lahir dengan begitu saja melainkan sudah dipersiapkan pada masa-masa sebelumnya.

Pada tahun 1994, kebijakan mengenai kurikulum pendidikan agama juga diterapkan pada setiap jenjang pendidikan yakni sebagai mata pelajaran wajib mulai jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Pada tingkat SD, terdapat sembilan mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Pada jenjang SMP, struktur kurikulumnya juga sama, yakni pendidikan agama dimasukkan ke dalam kelompok program pendidikan umum. Begitu pula pada jenjang SMU, pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama mata pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Biologi, Kimia, dan Fisika), IPS (Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi) dan Pendidikan Seni.

Bagi kurikulum pendidikan agama, kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang ada tidak memengaruhi jumlah jam mata pelajaran, serta karakter atau muatan pendidikan keagamaan siswa. Hingga tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan Kurikulum 1994. Jatuhnya rezim Orde Baru memberikan gagasan reformasi sekitar tahun 1998, yang salah

satu agendanya adalah perubahan dan pembaharuan dalam bidang pendidikan.

D. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Indonesia pada Masa Reformasi

Prinsip mengedepankan transparansi dan keterbukaan yang membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan nasional ini berada pada masa reformasi. Adanya integrasi atau pembaharuan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menguatkan keberadaan pendidikan Islam untuk semakin diakui pada masa reformasi ini.¹⁷⁶

1. Kurikulum KBK atau Kurikulum 2004

Masa reformasi telah memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Masa ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Sebagai salah satu dampak dari laju reformasi adalah dibuatnya system “Kurikulum Berbasis Kompetensi” atau yang kerap disebut kurikulum KBK. Dengan diterapkannya Kurikulum 2004 ini, maka berimplikasi langsung pada pelaksanaan pendidikan agama Islam, akhirnya madrasah pun menjadikan “kompetensi” sebagai landasannya.

Adapun beberapa karakteristik utama dari Kurikulum KBK, yaitu:¹⁷⁷

- a. Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi
- b. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang dan tinggi)
- c. Berpusat pada siswa

¹⁷⁶ Selamat, Supiana, and Yuliati Zaqiah Qiqi, “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam,” *Al-Munadhomah: Jurnal Mahajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 104, <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>.

¹⁷⁷ Ahmad Dhaifi, “Perkembangan Kurikulum PAI Di Indonesia,” *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2018): 82, <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.47>.

- d. Orientasi pada proses dan hasil
- e. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual
- f. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan
- g. Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar
- h. Belajar sepanjang hidup
- i. Belajar mengetahui (learning how to know)
- j. Belajar melakukan (learning how to do)
- k. Belajar menjadi diri sendiri (learning how to be)
- l. Belajar hidup dalam keberagaman (learning how to live together)

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih memotivasi pada lokalitas pendidikan. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah, dijelaskan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG.

3. Kurikulum 2013

Kurikulum ini adalah kurikulum terbaru yang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2013-2014. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan serta menciptakan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas, akan tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pembelajaran sikap tidak hanya

diajarkan secara verbal, namun melalui contoh dan teladan dari pendidik itu sendiri.¹⁷⁸

Pada masa reformasi ini dikembangkan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) antara lain untuk pembuatan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional (Sisdiknas) yang dirangkum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mencerminkan karakter kebijakan pembelajaran yang revolusioner dan reformis. *Contextual Teaching and Learning* adalah metode yang digunakan dalam pendidikan (CTL). Akibatnya, kurikulum 2004 dan kurikulum KTSP 2006 digunakan dalam pendidikan agama Islam di sekolah ataupun pesantren. Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi Kurikulum Pembelajaran Agama Islam tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008, yang langsung ditandatangani oleh Menag pada Mei 2008. Sampai dengan tahun 2013, Kurikulum Pembelajaran Tingkat Guru (KTSP) masih dipertahankan untuk digunakan.¹⁷⁹

E. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Masa New Normal

Masa *new normal* adalah di mana masa pasca *Covid-19*, yang mana pada masa ini membuka peluang untuk memikirkan kembali tujuan pendidikan. Salah satu tujuan agar kurikulum menjadi relevan kembali, tepat, dan responsif merupakan perkembangan kesiapsiagaan pada saat bencana, penyakit, dan keadaan darurat.

Sebagian besar instansi atau Lembaga pendidikan di Indonesia melakukan kegiatan di rumah uapaya menghindari penyebaran virus *Covid-19*, yang sangat dirugikan, termasuk segenap civitas perguruan, jika instansi atau lembaga melakukan kegiatan belajar di rumah. Namun jika diperhatikan dengan

¹⁷⁸ Kusmiran, Khairunnas Rajab, and Muhammad Faishal, "Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (2022): 370, jptam.org/index.php/jptam/article/view/3905/3257.

¹⁷⁹ Rina Nirwana and Qolbi Khoiri, "Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1266>.

seksama, peserta didik merupakan pihak yang sangat terkena dampak negatifnya. Permasalahannya apabila proses pembelajaran tatap muka dihentikan hingga waktu penerapan aktifitas belajar sepanjang tahun hendak mundur hingga batasan waktu yang tidak ditetapkan. Maka dari itu sangat dibutuhkan proses pembelajaran yang berorientasi pada *Global Relevant Need* yaitu pembelajaran yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi saat ini.¹⁸⁰

Dengan segala keterbatasan yang dibawa oleh *Covid-19*, kurikulum normal baru juga dapat mengadopsi integrasi konten. Pada masa ini, hampir semua lembaga pendidikan melakukan pembelajaran yang pada saat ini kita kenal dengan pembelajaran daring (dalam jaringan). Sehingga semua peserta didik atau siswa dituntut untuk mempelajari TIK, karena beberapa komponen pembelajaran, baik dari metode, media bahkan strategi guru semuanya terbungkus dalam teknologi.

Seiring berjalannya waktu, pada masa sekarang yang mana disebut dengan masa *new normal*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI (Kemendikbud RI) beberapa bulan lalu menegaskan bahwa terdapat kebijakan baru dalam dunia pendidikan, kebijakan tersebut adalah kurikulum “**Merdeka Belajar**”. Merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang dicetuskan oleh Bapak menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju, Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar terlahir dan terbentuk dari beberapa problem yang terjadi dalam pendidikan, terutama setelah melalui masa *covid-19* yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya.

Kurikulum merdeka ini, menekankan pada keaktifan peserta didik ketika proses pembelajaran, guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator, pemantau dan penasehat ketika terjadi kesalah pahaman. Setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, nantinya akan terjadi banyak perubahan terutama pada sistem pembelajaran. Yang mana sistem pembelajaran sekarang

¹⁸⁰ Ossi Marga Ramadhan, Acep Heris Hermawan, and Mohamad Erihadiana, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era New Normal,” *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 11, no. 1 (2021): 40, <https://doi.org/10.33367/ji.v11i1.1588>.

hanya dilaksanakan di dalam kelas, akan berubah dan dibuat semenarik mungkin agar mempermudah interaksi antara peserta didik dan guru. Salah satunya yaitu belajar dengan *outing class*, dimana *outing class* ini merupakan salah satu program pembelajaran yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik agar memiliki keterampilan keahlian tertentu. *Outing class* juga merupakan metode belajar yang menyenangkan, mengajarkan peserta didik untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar.¹⁸¹

Dari beberapa paparan di atas dapat penulis pahami, terkait pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, bahwa perkembangan kurikulum dari awal masa pra kemerdekaan hingga saat ini adalah sebagai penyempurna dan pelengkap dari pada kurikulum-kurikulum yang sudah diberlakukan terlebih dahulu. Hal ini merupakan upaya mengembangkan sistem pendidikan dan proses pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, tidak monoton dan stagnan, khususnya bagi peserta didik yang merupakan salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan, sehingga sistem pendidikan bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan kebutuhan peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Karena hal tersebut tidak akan sama dari tahun ke tahun.

KESIMPULAN

Kurikulum pendidikan agama Islam pada masa pra kemerdekaan tidak begitu diperhatikan, pendidikan pada pra kemerdekaan ini dipengaruhi oleh kolonialisme yang berpusat pada agama mereka sendiri (Penjajah), selain itu dari segi kelas hanya disediakan untuk kalangan atas, yaitu anak-anak priyai. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang dapat menciptakan para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula.

Pada masa Orde Lama kurikulum 1947 masih kental dengan corak system pendidikan Jepang ataupun Belanda, adapun

¹⁸¹ Siti Baro'ah, "Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan," *Jurnal Tawadhu* 4, no. 1 (2020).

Kurikulum tahun 1952-1964 diprakarsai oleh DEPAG dengan membentuk tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama satu minggu.

Sedangkan pada masa Orde Baru, Kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, 1994 dan suplemen kurikulum 1999, Pendidikan agama Islam berjalan satu paket dengan sistem pendidikan Nasional.

Kurikulum pada era reformasi menekankan pada prinsip mengedepankan transparansi dan keterbukaan yang membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan nasional. Adanya integrasi atau pembaharuan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menguatkan keberadaan pendidikan Islam untuk semakin diakui pada masa reformasi ini.

Kemudian pada masa sekarang atau masa *new normal*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI beberapa bulan lalu menegaskan bahwa terdapat kebijakan baru dalam dunia pendidikan, kebijakan tersebut adalah kurikulum “Merdeka Belajar”. Merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang dicetuskan oleh Bapak menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju, Nadiem Anwar Makarim.

Demikianlah tulisan ini dibuat, penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan makalah ini dan berikutnya besar harapan kami, sehingga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan pemakalah pada khususnya, Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

- Baro'ah, Siti. "Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Tawadhu* 4, no. 1 (2020): 1063–1073.
- Dhaifi, Ahmad. "Perkembangan Kurikulum PAI Di Indonesia." *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2018): 76–88. doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.47.
- Firmansyah. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 2 (2020): 164–169. <https://doi.org/10.24114/antro.v5i2.14384>.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (2020): 15–30. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Kusmiran, Khairunnas Rajab, and Muhammad Faishal. "Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (2022): 366–372. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3905/3257>.
- Mawardi, Amirah. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Jurnal Tarbawi* 1, no. 1 (2016): 29–36.
- Nirwana, Rina, and Qolbi Khoiri. "Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 5266–5278. doi.org/10.31004/joe.v5i2.1266.
- Nurhasanah, and Arief Sukino. "Perkembangan Dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 142–155. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1517>.

- Ramadhan, Ossi Marga, Acep Heris Hermawan, and Mohamad Erihadiana. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era New Normal." *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 11, no. 1 (2021): 32–45. <https://doi.org/10.33367/ji.v11i1.1588>.
- Satria Kharimul Qolbi, and Tasman Hamami. "Implementasi Asas-Asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 1120–1132.
- Selamet, Supiana, and Yuliati Zaqiah Qiqi. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam." *Al-Munadhomah: Jurnal Mahajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 97–111. <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>.
- Taufik, Ahmad. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2019): 81–101. jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/al-munadzomah/article/view/320.
- Wahyuni, Fitri. "KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia)." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2015).
- Yunita, Yuyun. "Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Umum." *Jurnal Dewantara* 2, no. 02 (2016): 162–178.



PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA¹⁸²

PENDAHULUAN

Madrasah sebagaimana sekolah merupakan bentuk lembaga pendidikan berbasis agama yang sudah lama ada di negara Indonesia yang berupaya untuk mewujudkan kegiatan belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar para peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dalam dirinya agar memiliki life skill dengan bekal spiritual, intelektual, kecerdasan emosional dan akhlak mulia, serta segala keterampilan yang mungkin diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, pendidikan madrasah perlu diperhatikan dan diteliti lebih lanjut agar pendidikan di Indonesia semakin lebih baik.¹⁸³

Dalam sejarahnya, madrasah mengalami berbagai macam perkembangan khususnya dari segi kurikulumnya dari awal berdirinya sistem pendidikan semacam madrasah ini hingga

¹⁸² Zainab Nurlaili

¹⁸³ H Fathoni, "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia," *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri*, no. 51 (2020): 73–98, prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/41.

sekarang. Bagaimanapun juga, kurikulum merupakan pedoman utama pelaksanaan kegiatan pelajaran dan pembelajaran yang memiliki peran cukup signifikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang direncanakan dan dikembangkan dengan baik akan menghasilkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Demikian pula kurikulum yang dikembangkan oleh madrasah ataupun sekolah semestinya juga relevan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁸⁴

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kurikulum Madrasah Sebelum Kemerdekaan

Pada awal mula masuk dan berkembangnya agama Islam, pendidikan Islam di Indonesia masih berlangsung secara informal dengan beberapa institusi pendidikan Islam seperti masjid, pesantren, meunasah, rangkang, dayah dan surau.. Sementara pada masa berikutnya, telah muncul institusi baru seperti madrasah, sekolah dinas dan Pendidikan Tinggi Islam.¹⁸⁵ Beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebut dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu kolonialisme Belanda dan gerakan pembaharuan Islam.¹⁸⁶

Selama menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminatif terhadap umat Islam. Kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda memunculkan reaksi umat Islam, baik secara defensif maupun progresif. Reaksi defensif ditunjukkan, terutama oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat pada sistem

¹⁸⁴ Fathoni.

¹⁸⁵ Muhammad Nasir, "Kurikulum Madrasah : Studi Perbandingan Madrasah Di Asia," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2015): 145–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/nw.2015.9.2.524>.

¹⁸⁶ Mohammad Kosim, "Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan)," *Tadris* 2, no. 1 (2007): 41–57, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/209/200>.

pendidikan tradisional pesantren yang mengambil tempat di daerah-daerah pedalaman untuk menjauh/menghindar dari pengaruh dan pantauan Belanda.¹⁸⁷ Reaksi progresif dilakukan dengan pertimbangan bahwa dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modern yang sekuler harus dilawan dengan pendirian lembaga-lembaga modern ala mereka tapi berbasis Islam. Dengan demikian, cara progresif ini dilakukan umat Islam dengan cara “menolak sambil meniru”. Reaksi progresif ini terutama dipelopori sejumlah ulama pembaharu, yaitu mereka yang mulai bersentuhan dengan gerakan pembaharuan yang telah menggema di Timur Tengah sejak awal abad ke 19.¹⁸⁸

Senada dengan hal di atas Muhaimin menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah. Senada dengan hal di atas Muhaimin menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:
3. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
4. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah.¹⁸⁹

Menurut Daulay, munculnya madrasah dimulai pada tahun 1909 dengan munculnya Adabiyah School (sekolah adab) di Sumatra Barat oleh H. Abdullah Ahmad yang menurut Mahmud Yunus merupakan sekolah agama (madrasah) pertama yang menggunakan sistem klasikal yang berbeda dengan sistem pendidikan di surau-surau, meunasah dan sebagainya yang tidak memiliki jenjang kelas, meja, bangku, papan tulis dan kurikulum yang baku. Kemudian muncullah Madrasah Diniyah (Diniyah

¹⁸⁷ Kosim.

¹⁸⁸ Kosim.

¹⁸⁹ Hilmi Mizani, “Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia),” *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2013): 29–50, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1856/1378>.

School) yang didirikan oleh Zainuddin Laday el-Yunusi pada tahun 1915 di Padang Panjang.¹⁹⁰ Madrasah Diniyah Zainuddin Labai dilakukan secara perkelas dengan susunan pelajaran yang terpadu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Setelah itu Madrasah Diniyah hampir berkembang di seluruh Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, atau berdiri di luarnya. Pada tahun 1916 di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah Salafiyah oleh KH. Hasyim Asy'ari, sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran ke pesantren. Pada tahun 1929 atas usaha Kyai Ilyas, diadakan pembaharuan dengan memasukan pengetahuan umum pada madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah (Kweekhschool Muhammadiyah) yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi dari cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang diperoleh oleh K. H. Ahmad Dahlan.¹⁹¹

Perkembangan lebih lanjut ketika Mahmud Yunus mendirikan sekolah al-Jami'ah al-Islamiyah di Batusangkar pada tahun 1931 yang mempunyai 3 tingkatan yaitu: (1). Madrasah Ibtidaiyah dengan jenjang 4 tahun; (2). Madrasah Tsanawiyah dengan jenjang 4 tahun; (3). Madrasah Aliyah dengan jenjang 4 tahun. Diantara materi utama pada madrasah tersebut adalah ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu pengetahuan umum.

Adapun contoh dari alokasi waktu dan mata pelajaran pada kurikulum madrasah al-Jami'ah al-Islamiyah adalah sebagai berikut:

¹⁹⁰ Fathoni, "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia."

¹⁹¹ Mizani, "Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia)."

Tabel 1. Rencana pelajaran tsanawiyah aljami'ah al-islamiyah Tahun 1931

No	Mata Pelajaran	Kelas			
		Kls 1	Kls 2	Kls 3	Kls 4
1	Agama	9	9	9	9
	a. Tafsir	2	2	2	2
	b. Mustalah Hadist	1	1	1	1
	c. Tauhid	1	1	1	1
	d. Fiqh/ Hikmah Tasyri'	4	4	4	4
	e. Ushul Fiqh	1	1	1	1
2	Bahasa Arab:	7	7	7	7
	a. Membaca	2	2	2	2
	b. Bercakap-cakap/Mengarang	1	1	1	1
	c. Hafalan	1	1	1	1
	d. Qawaid (Nahwu & Sharf)	3	3	3	3
3	Tarikh Islam	1	1	1	1
4	Sejarah Indonesia	2	2	2	2
5	Ilmu Bumi/Falak	2	2	2	2
6	Ilmu Alam	2	2	2	2
7	Ilmu Tumbuh-tumbuhan	1	1	-	-
8	Ilmu hewan	-	-	1	1
9	Ilmu Tubuh Manusia	-	-	1	1
10	Ilmu Berhitung	2	2	2	2
11	Bahasa Inggris	2	2	2	2
12	Gerak Badan	1	1	1	1
Total		29	29	29	29

Tabel 2. Rencana Pelajaran Normal Islam Padang Tahun 1931

No	Mata Pelajaran	Kelas			
		Kls 1	Kls 2	Kls 3	Kls 4
1	Agama	6	6	5	4
2	Bahasa Arab:	8	8	8	8
	a. Mengarang/Pidato	2	2	2	2
	b. Muthala'ah	2	2	2	2
	c. Mahfudzat	1	1	1	1

	d. Qawaid	2	2	2	2
	e. Adabul Lughah	1	1	1	1
3	Aljabar	1	1	1	1
4	Ilmu ukur	2	2	2	2
5	Ilmu alam /kimia	2	2	2	2
6	Ilmu hayat/ geologi	2	2	2	2
7	Ekonomi	1	1	-	-
8	Tarikh islam	-	-	1	1
9	Sejarah Indonesia/ dunia	-	-	1	1
10	Ilmu bumi/ falak	2	2	2	2
11	Tata Negara	2	2	2	2
12	Bahasa inggris/ belanda	1	1	1	1
13	Gerak badan	1	1	1	1
14	Ilmu pendidikan	2	3	3	4
15	Ilmu jiwa	-	-	1	1
16	Ilmu kesehatan	1	1	-	-
17	Khat/menggambar	1	1	1	1
Total		34	34	34	34

Banyak madrasah-madrasah diniyah pada waktu itu memiliki kurikulum seperti tersebut di atas pada rata-rata madrasah di Sumatera.¹⁹² Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, madrasah mendapat bantuan dana. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari ummat Islam. Bahkan Jepang membiarkan kembali dibukanya madrasah-madrasah yang pernah ditutup pemerintah Hindia Belanda.¹⁹³ pada akhir tahun 1942 Jepang mendirikan Shumubu (semcam Kantor Urusan Agama).Diantara hal yang dilakukan oleh badan ini adalah pencatatan santri madrasah, dan pesantren yang berjumlah 139.415 orang. Badan ini dipimpin oleh ulama terkemuka pada waktu itu yaitu KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang.¹⁹⁴ Selain itu, Kantor Urusan Agama bertugas antara lain mengkoordinasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Meskipun dengan

¹⁹² Fathoni, "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia."

¹⁹³ Mizani, "Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia)."

¹⁹⁴ Fathoni, "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia."

alasan pembinaan kecakapan, tetapi usaha ini pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam baik di madrasah ataupun di pesantren tetap dalam kontrol pemerintah.¹⁹⁵

B. Perkembangan Kurikulum Madrasah Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah RI. UUD 1945 mengamanatkan, agar mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional yang diatur undang-undang. Untuk melaksanakan amanat tersebut, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa itu, merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 10 pasal. Pada pasal 5 (b) sebagaimana dikutip oleh Hasbullah, menetapkan bahwa “madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya juga mendapat perhatian dan bantuan materil dari pemerintah.”¹⁹⁶ lembaga ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen Agama¹⁹⁷

Departemen Agama berdiri (3 Januari 1946), pembinaan madrasah menjadi tanggung jawab departemen ini. Sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah yang beragam tersebut, sebagaimana yang ada sekarang. Berdasarkan komposisi mata pelajaran, madrasah terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pelajaran umum

¹⁹⁵ Mizani, “Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia).”

¹⁹⁶ Nur Syarifuddin, “Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Al-Ibroh* 2, no. 2 (2017): 25–54, ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/29/24.

¹⁹⁷ Sudarsono Sudarsono, “Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003),” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2018): 10–24, <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/17>.

70%.¹⁹⁸ Pengetahuan umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung (untuk tingkat dasar). Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam (untuk tingkat lanjutan).¹⁹⁹ Statusnya ada yang negeri dan dikelola oleh Depag, dan ada yang swasta dan dikelola oleh masyarakat. Jenjang pendidikannya adalah:

1. Raudlatul Athfal atau Bustanulathfal (Tingkat Taman Kanak-Kanak);
2. Madrasah Ibtidaiyah (Tingkat Dasar);
3. Madrasah Tsanawiyah(Tingkat Menengah Pertama), Dan
4. Madrasah Aliyah (Tingkat Menengah Atas).

Kedua, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan model seluruh mata pelajarannya adalah materi agama,yang sering dikenal dengan madrasah diniyah. Jenjang pendidikannya; madrasah diniyah awwaliyyah (tingkat dasar), madrasah diniyah wustha (tingkat menengah pertama), dan madrasah diniyah ‘ulya (tingkat menengah atas). Madrasah diniyah ini pada umumnya berada di masjid dan pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan didirikan madrasah diniyah ini selain untuk memberikan kesempatan kepada siswa sekolah umum yang ingin memperdalam ilmu agama, juga untuk mempersiapkan kader-kader ulama.²⁰⁰

Keberadaan madrasah lebih diperkokoh lagi karena dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 tahun 1950, pada pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar, harus terdaftar pada

¹⁹⁸ Syarifuddin, *"Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia."*

¹⁹⁹ Kosim, *"Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan)."*

²⁰⁰ Syarifuddin, *"Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia."*

Kementerian Agama, dengan syarat madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur disamping mata pelajaran umum.²⁰¹

Untuk melaksanakan amanat UU Nomor 4/1950, khususnya tentang wajib belajar, pada tahun 1958 Departemen Agama memelopori berdirinya Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan lama belajar 8 tahun. MWB diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi. Materi pelajaran meliputi : pendidikan agama, umum, dan keterampilan untuk mendukung kesiapan anak untuk memproduksi atau bertransmigrasi dengan swadaya. Kurikulum MWB merupakan gabungan dari tiga perkembangan; akal, hati nurani, dan keterampilan.²⁰²

Sedangkan untuk pengorganisasian dan pengaturan kurikulum serta penyelenggaraan MWB, diatur sebagai berikut: a) MWB adalah tanggung jawab pemerintah. b) MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6-14 tahun. c) Lama belajar MWB adalah 8 tahun. d) Pelajaran yang dibelikan pada MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran ketrampilan dan kerajinan tangan. e). 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk agama, sedangkan 75% untuk pengetahuan umum, ketrampilan dan kerajinan tangan.²⁰³

Pada dekade 60-an, madrasah sudah tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia, dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat Ibtida'iyah pada waktu itu sudah mencapai 13. 057. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah 776, dan Madrasah Aliyah 1.188.²⁰⁴ Walaupun demikian keberadaan madrasah belum diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan di madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama,

²⁰¹ Mizani, "Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia)."

²⁰² Kosim, "Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan)."

²⁰³ Sudarsono, "Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003)."

²⁰⁴ Sudarsono.

menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.²⁰⁵

Saat dilangsungkan pertemuan di Cibogo, Bogor, Jawa Barat Pada tanggal 10-20 Agustus 1970 untuk menyusun kurikulum madrasah secara nasional dari semua tingkat. Kurikulum Madrasah yang dihasilkan dan dirumuskan dalam pertemuan di Cibogo diberlakukan secara nasional berdasarkan, Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan kurikulum 1973. Setelah penyusunan kurikulum madrasah yang sama secara nasional, kurikulum madrasah sudah menjadi seragam, meskipun tetap diperbolehkan menambah yang menyesuaikan dengan ciri khas lembaga yang didirikan. Isu utamanya kurikulum madrasah adalah masuknya pengetahuan umum ke madrasah yang lebih dominan dibanding pengetahuan agama. sehingga pengetahuan agama berkurang. Bekal kurikulum madrasah yang bersifat nasional (seragam) ternyata tidaklah cukup bagi madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia, eksistensi madrasah secara politis –akan ada di bawah otoritas Depdikbud. Hal itu, tidak disetujui oleh Masyarakat Muslim, mereka menghendaki madrasah ada di bawah naungan Departemen Agama.²⁰⁶

Madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan dengan sekolah umum yang setingkat diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.²⁰⁷ Pada tahun 1976, berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut, Departemen Agama membuat ketetapan standarisasi program dan kurikulum madrasah yang berimplikasi pada persamaan nilai ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum sehingga ijazah madrasah dapat digunakan untuk melanjutkan studi maupun pindah di sekolah umum yang setingkat. Langkah ini berakibat pula kepada perubahan kurikulum madrasah yang sebelumnya

²⁰⁵ Mizani, "Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia)."

²⁰⁶ Mizani.

²⁰⁷ Mizani.

60% agama dan 40% pengetahuan umum berubah menjadi 30% agama dan 70% pengetahuan umum.

Pasca dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tersebut, madrasah tidak dianggap lagi sebagai lembaga pendidikan keagamaan saja namun juga setara dengan sekolah umum yang mengkhususkan mata pelajaran agama sebagai pendidikan dasar. Akan tetapi, prosentase kurikulum dengan perbandingan pada kurikulum madrasah 70:30 tersebut menuai berbagai macam reaksi dan kritik dari masyarakat, sehingga membutuhkan perubahan lebih lanjut. Tindak lanjut dari pengembangan pendidikan madrasah setelah itu adalah dikeluarkannya SKB Dua Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1984 tentang Pengaturan Standarisasi Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah yang berisi perubahan dan penyempurnaan kurikulum sekolah umum dan madrasah. Diantara pengembangan kurikulum madrasah khususnya pada tingkat MA adalah pemakaian sistem semester dengan alokasi waktu untuk masing-masing pelajaran 45 menit, dan membagi 2 jenis program pendidikan yang terdiri dari program inti dan program peminatan atau pilihan. Dua jenis program itu yaitu: (1) Pendidikan agama, termasuk di dalamnya al-Quran, Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab; (2) Pendidikan dasar umum yang terdiri dari Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Olahraga dan Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris untuk MTs dan MA. Dimasukkan juga beberapa materi pelajaran umum untuk program aliyah seperti Geografi, Biologi, Fisika, Kimia dan Ekonomi.

Dengan kata lain, kurikulum 1984 merupakan kurikulum implementasi dari SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri dari segi program, tujuan, materi dan pelajarannya yang memuat 3 indikator strategis yaitu: 1). Program kurikulum madrasah tahun 1984 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler dalam muatan inti dan program pilihannya; 2). Proses KBM dilaksanakan dengan melihat kecocokan peserta didik dengan materi pelajarannya; 3). Penilaian

bersifat continue dan menyeluruh dalam proses belajar dan hasil belajar.²⁰⁸

Selain itu, untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada madrasah versi SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri, dimana banyak lulusannya yang tidak terlalu menguasai pengetahuan agama, pemerintah mendirikan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) pada tahun 1987 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 ketika Bapak Munawir Sadzali, M.A menjabat sebagai Menteri Agama.²⁰⁹ Muatan kurikulum program MAPK didominasi materi agama dengan perimbangan 70% pendidikan agama (meliputi Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan lain-lain), dan 30% pendidikan umum (seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan lain-lain). Tujuan dibukanya MAPK ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah.²¹⁰

Pemberlakuan Undang-Undang NO 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Dengan demikian, kurikulumnya adalah kurikulum sekolah di tambah dengan kurikulum ilmu agama sebagai ciri khasnya. Pendidikan Islam dilaksanakan untuk menghasilkan keterampilan yang berbasis kompetensi-kompetensi tertentu.²¹¹

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 PP nomor 28 tahun 1990 disebutkan bahwa MI dan MTs dinyatakan sebagai Pendidikan Dasar yaitu SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam. Sedangkan Madrasah Aliyah disebut sebagai SMU yang berciri khas agama Islam.²⁶ Sebagai konsekuensi dari statusnya yang disamakan sekolah umum yang diasuh oleh Kementerian

²⁰⁸ Fathoni, "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia."

²⁰⁹ Fathoni.

²¹⁰ Munif Rofi'atur Rohmah and Zainal Arifin, "Eksistensi Dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta," *Jurnal Pendidikan Madrasah* 2, no. 2 (2017): 369–84, doi.org/10.14421/jpm.2017.22-11.

²¹¹ Nasir, "Kurikulum Madrasah : Studi Perbandingan Madrasah Di Asia."

Pendidikan Nasional, maka kurikulum yang dipakai pada madrasah menggunakan kurikulum keluaran Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian ditambah dengan kurikulum agama yang disusun oleh Departemen Agama. Untuk itu maka Kementerian Agama mengembangkan kurikulum MI, MTs dan MA yang mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional.

Pada tahun 1993 Menteri Agama menetapkan dengan Surat Keputusan nomor 371 yang mengatur Kurikulum MI, SK nomor 372 untuk Kurikulum MTs dan SK nomor 373 untuk kurikulum MA. Adapun struktur mata pelajaran MI terdiri 12-16 % mata pelajaran agama dan 84-88% mata pelajaran umum. Sedangkan untuk MTs terdiri dari 20% mata pelajaran agama dan 80% mata pelajaran umum. Sementara MA terdiri dari 11-13 % mata pelajaran agama dan 87-89 % mata pelajaran umum.²¹²

Di kurikulum tahun 2004 (KBK), sebaran mata pelajaran madrasah dengan sekolah sama, MI sama dengan SD, MTs sama dengan SMP, MA sama dengan SMA, MAK sama dengan SMK. Yang Membedakan “hanya” pada Pendidikan Agama, jenis dan alokasi waktu, alokasi waktu di madrasah 7–12 jam perminggu, sementara di sekolah umum berkisar 2-3 jam perminggu. Karena kurikulum MA tetap mempertahankan ciri khas keIslamannya, maka perbedaan alokasi waktu PAI di SMA dengan di MA sangatlah tinggi, inilah sisi politis yang cukup fatal untuk dikaji.²¹³

Pada tahun 2006 KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).²¹⁴ Dalam KTSP, sekolah dapat memasukkan tambahan mata pelajaran keagamaan untuk dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal. Disamping itu madrasah juga masih dapat menambah jam belajar mata pelajaran agama yang ada selama 4 jam pelajaran perminggu. Dengan demikian porsi waktu untuk mata pelajaran agama bertambah banyak, sehingga harapan untuk menciptakan

²¹² Mizani, “Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia).”

²¹³ Sudarsono, “Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003).”

²¹⁴ Syarifuddin, “Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia.”

lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang memadai dapat tercapai.²¹⁵

KESIMPULAN

Pada awal mula masuk dan berkembangnya agama Islam, pendidikan Islam di Indonesia masih berlangsung secara informal dengan beberapa institusi pendidikan Islam seperti masjid, pesantren, meunasah, rangkang, dayah dan surau.. Sementara pada masa berikutnya, telah muncul institusi baru seperti madrasah, sekolah dinas dan Pendidikan Tinggi Islam. Beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebut dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu kolonialisme Belanda dan gerakan pembaharuan Islam.

Menurut Daulay, munculnya madrasah dimulai pada tahun 1909 dengan munculnya Adabiyah School (sekolah adab) di Sumatra Barat oleh H. Abdullah Ahmad yang menurut Mahmud Yunus merupakan sekolah agama (madrasah) pertama yang menggunakan sistem klasikal yang berbeda dengan sistem pendidikan di surau-surau, meunasah dan sebagainya yang tidak memiliki jenjang kelas, meja, bangku, papan tulis dan kurikulum yang baku. Kemudian muncullah Madrasah Diniyah (Diniyah School) yang didirikan oleh Zainuddin Laday el-Yunusi pada tahun 1915 di Padang Panjang. Madrasah Diniyah Zainuddin Labai dilakukan secara perkelas dengan susunan pelajaran yang terpadu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Setelah itu Madrasah Diniyah hampir berkembang di seluruh Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, atau berdiri di luarnya.

Setelah Indonesia merdeka, madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah RI. UUD 1945 mengamanatkan, agar mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional yang diatur undang-undang. Untuk melaksanakan amanat tersebut, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat)

²¹⁵ Mizani, "Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia)."

sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa itu, merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 10 pasal. Pada pasal 5 (b) sebagaimana dikutip oleh Hasbullah, menetapkan bahwa “madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya juga mendapat perhatian dan bantuan materil dari pemerintah.” lembaga ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen Agama. Departemen Agama berdiri (3 Januari 1946), pembinaan madrasah menjadi tanggung jawab departemen ini. Sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah yang beragam tersebut, sebagaimana yang ada sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, H. “Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia.” *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri*, no. 51 (2020): 73–98. prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/41.
- Kosim, Mohammad. “Madrasah Di Indonesia (Pertumbuhan Dan Perkembangan).” *Tadris* 2, no. 1 (2007): 41–57. ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/209/200.
- Mizani, Hilmi. “Pendidikan Madrasah (Kebijakan Sistem Madrasah Di Indonesia).” *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2013): 29–50. jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1856/1378.
- Nasir, Muhammad. “Kurikulum Madrasah : Studi Perbandingan Madrasah Di Asia.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2015): 145–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/nw.2015.9.2.524>.
- Rohmah, Munif Rofi’atur, and Zainal Arifin. “Eksistensi Dan

Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MAN 1 Surakarta.” *Jurnal Pendidikan Madrasah* 2, no. 2 (2017): 369–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2017.22-11>.

Sudarsono, Sudarsono. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003).” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2018): 10–24. <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/17>.

Syarifuddin, Nur. “Madrasah Sebagai Bentuk Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Al-Ibroh* 2, no. 2 (2017): 25–54.



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI DI PTU DI INDONESIA²¹⁶

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan instrumen yang berarti suatu isi pembelajaran sebab kurikulum tersebut ialah salah satu aspek berarti buat dapat mencetak lulusan berkompentensi yang didasari iman serta takwa dan berakhlakul karimah. dengan artian lain menciptakan mahasiswa yang mempunyai penyeimbang ranah intelektual, afektif dan psikomotorik serta spiritual sebab kurikulum tersebut ialah salah satu aspek berarti buat dapat mencetak lulusan berkompentensi yang didasari iman serta takwa dan berakhlakul karimah. dengan artian lain menciptakan mahasiswa yang mempunyai penyeimbang ranah intelektual, afektif dan psikomotorik serta spiritual.

Dalam pembelajaran, kurikulum mempunyai sebutan sebagai inti jantung yang memastikan denyut nadi kehidupan. Bisa dinyatakan kalau kurikulum dalam suatu lembaga pembelajaran tertata secara baik, hingga hasil pembelajaran

²¹⁶ Fauzatul Jannah

dilembaga tersebut jadi baik pula, kebalikannya bila kurikulumnya tidak ditata secara baik, hingga bisa dipastikan kalau hasil pembelajaran pada lembaga tersebut hendak tidak akan baik. Oleh sebab itu kampus wajib dapat meningkatkan kurikulumnya secara baik dan cocok dengan visi, misi kampus tersebut, biar sanggup menciptakan mahasiswa yang mempunyai penyeimbang kemampuan berfikir, sikap, psikomotorik dan spiritual.²¹⁷

Kurikulum yang digunakan di lingkungan pendidikan tinggi adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran (CP) lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yg digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi (PRODI)” (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).²¹⁸

PAI merupakan salah satu pembelajaran yang diajarkan di sekolah, namun juga merupakan salah satu bidang studi yang ada di perguruan tinggi umum (PTU) di Indonesia. Kurikulum ini biasa disingkat dengan sebutan kurikulum PTKI. Ajaran Islam memiliki substansi yang sangat luas, baik di bidang aqidah, Syariah serta IPTEK yang modern. Lahan garap keilmuan pada perguruan tinggi Islam ini meliputi aspek kebutuhan hidup manusia untuk kehidupan akhirat yang bahagia merupakan predikat Islam yang sangat melekat. Dalam PTKI, kurikulumnya tetap berlandaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pada paragraf 1 pasal 35 menjelaskan; pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu

²¹⁷ M. Sayyidul Abrori, Khodijah Khodijah, and Dedi Setiawan, “Konsep Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Kompetensi Perspektif Muhaimin Di Perguruan Tinggi Agama Islam,” *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 1, no. 1 (2023): 23–44, <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i1.463>.

²¹⁸ Syafruddin Nurdin, “Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNi Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Al-Fikrah* 5, no. 1 (2017): 21–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jaf.v5i1>.

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.²¹⁹

PAI dibangun oleh dua makna esensial yakni “pendidikan” dan “agama Islam”. Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa, sehingga moral dan intelektual mereka berkembang sehingga menemukan kebenaran sejati, dan guru menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dalam etiknya Aristoteles, pendidikan diartikan mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. PAI adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinyu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karaktersitik utamanya (Rahman, 2012). Karaktersitik utama itu dalam pandangan Muhaimin (2004) sudah menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup seseorang).²²⁰

Oleh karena itu bagaimana kurikulum di perguruan tinggi menerapkan serta mengembangkan kurikulum sangatlah berpengaruh pada perkembangan pembelajaran PAI yang terdapat di PTU, hal ini di sebabkan adanya tuntutan di output yang akan dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut.

²¹⁹ Selamat, Spiana, and Yuliati Zaqiah Qiqi, “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam,” *Jurnal Mahajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 97–111, <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v1i2.320>.

²²⁰ Mokh Firmansyah, Iman, “Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi,” *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–90, <https://doi.org/https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/43562>.

PEMBAHASAN

Pengembangan Kurikulum maka pengembangan kurikulum adalah merupakan "prosedur umum dalam kegiatan mendesain (designing), menerapkan (implementatio), dan mengevaluasi (evaluation) suatu kurikulum". Dalam pengembangan kurikulum banyak pihak yang harus berpartisipasi diantaranya adalah administrator pendidikan, para ahli pendidikan ahli dalam kurikulum, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, guru dan orangtua, serta tokoh masyarakat. Dari pihak tersebut yang secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Arifin (2012), pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depannya atau adanya perubahan/merevisi atau peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum lain.

Menurut Hamalik (2013), pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar-mengajar.

Jadi, pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan guru sebagai tenaga pendidik, akan tetapi semua stakeholder yang berkepentingan. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan akan memberikan panduan yang jelas dalam implementasinya dan

pada akhirnya menghasilkan produk berupa output dan outcome yang diinginkan.²²¹

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik mulai dari Tingkat Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas. Namun berbagai persoalan muncul dalam proses pembelajaran PAI. Materi yang diajarkan boleh dikatakan sama secara nasional. Banyaknya materi ajar dan kurang berfariasinya pengajar dalam menyampaikannya, ditambah lagi dengan alokasi waktu yang kurang memadai, menjadikan peserta didik (mahasiswa) kurang bergairah dalam menyerap perkuliahan. Kesan yang sering muncul di kalangan mahasiswa adalah mata kuliah “wajib lulus” ini seakan berubah menjadi “wajib diluluskan” karena kalau tidak lulus akan menjadi hambatan bagi mata kuliah di atasnya. Secara sederhana bisa juga dikatakan bahwa mahasiswa “wajib lulus” dan sang dosen “wajib meluluskan”.²²²

Pengembangan kurikulum berkaitan dengan penyusunan seluruh dimensi kurikulum mulai dari landasan, struktur penataan mata pelajaran, ruang lingkup (scope), urutan materi pembelajaran, garis-garis besar program pembelajaran, sampai pengembangan pedoman pelaksanaan. Selain itu pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik didasarkan kepada hasil penilaian terhadap kurikulum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Artinya, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atau dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode dan waktu tertentu.

²²¹ Muhammad Rouf, Akhmad Said, and Dedi Eko Riyadi HS., “Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Pengembangan, Dan Implementasi,” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 5, no. 2 (2020): 23–41, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/106>.

²²² Nanang Budiarto, “Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum (Suatu Kajian Inter, Multi, Dan/Atau Transdisipliner),” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2016): 97–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v7i1.6>.

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai:

- Kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, atau
- Proses yang mengkaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik; dan/atau
- Kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI.²²³

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkan Tap. MPRS No. II Tahun 1960 dan UU. Perguruan Tinggi No. 22 Tahun 1961, yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Dengan ketetapan tersebut, eksistensi PAI sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa semakin kuat. Sebagai bagian dari kurikulum inti perguruan tinggi, mata kuliah PAI tentu tidak lepas dari kontrol Pemerintah. Kurikulum PAI, dengan demikian, tidak bisa lepas dari kepentingan politik yang sedang berkembang pada saat mana kurikulum itu diberlakukan. Sehingga, perbedaan orientasi, visi dan misi sebuah rezim pemerintahan, akan berimplikasi pada muatan kurikulum PAI itu sendiri. Pada masa Orde Baru, PAI di Perguruan Tinggi Umum berorientasi murni pada konsep-konsep dasar ajaran Islam normatif.

Domain pembahasannya meliputi tiga pilar utama ajaran Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Inilah yang dijabarkan dalam kurikulum PAI di PTU. Apakah kurikulum yang demikian masih tetap dipertahankan di era Reformasi? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hingga tahun 2002 muatan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum masih meneruskan materi yang telah diterapkan pada masa Orde Baru, meskipun mata kuliah ini telah dimasukkan sebagai salah satu kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Namun, sejak tahun 2002,

²²³ Achmad Junaedi Sitika, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Humanistik Dan Teknologis Di Perguruan Tinggi Umum," *Jurnal Wahana Karya Ilmiah* 3, no. 02 (2019): 364–84, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3162>.

muatan kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum mengalami perubahan yang cukup drastis. Pada bagian berikut, akan diuraikan tentang bagaimana perbedaan yang ada antara kurikulum PAI di PTU tahun 2000 dengan kurikulum PAI di PTU tahun 2002.²²⁴

Dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI, Prodi PAI masih mempertimbangkan ruang lingkup sebagaimana visi Prodi PAI yakni menjadi prodi mitra pembangunan daerah dalam wilayah pulau Sumbawa. Dengan demikian, pengembangan kurikulum Prodi PAI STAI Al-Amin Dompu masih didominasi dengan dasar dan pertimbangan permasalahan yang dihadapi, terutama masalah lokal setingkat daerah dalam wilayah pulau Sumbawa, selain masalah nasional maupun permasalahan pada ruang lingkup global.²²⁵

Para ahli mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantung pendidikan. Pendidikan akan tetap hidup manakala kurikulumnya sehat. Kurikulum yang sehat sesuai dengan profile lulusan. Profile lulusan menjadi bahan orientasi dari menyusun Learning Outcome (LO). LO menjadi dasar untuk menentukan bidang kajian dan nama matakuliah. Pengembangan kurikulum di Prodi PAI senantiasa menemukan ben tuk dan format yang update dan panjang semenjak tahun 2012 yakni se menjak digulirkannya kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).²²⁶

Dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa: “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

²²⁴ N Atiyah, “Model Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dan Perguruan Tinggi Umum,” *Qathrunâ: Jurnal Keilmuan Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2018): 95–120, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/qathruna/article/view/2970>.

²²⁵ Abdul Haris, “Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam,” *Al Furqan: Study Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 63–81, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3440>.

²²⁶ Suwadi, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI-SNPT Berparadigma Interkoneksi Di Program Studi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2016): 223–52, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14421/jpai.2016.132-08>.

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.⁷ KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi (*qualified person*) dan bersertifikasi (*certified person*) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana disusun oleh Tim Kurikulum dan pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014 KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Dengan adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan.²²⁷

Terdapat beberapa tahapan kurikulum PAI dalam perguruan tinggi. Pertama, paradigma kurikulum PAI Tahun 2000 masih merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum Orde Baru, yang berorientasi murni pada konsep-konsep Islam normatif. Domain pembahasannya sebatas tiga pilar utama ajaran Islam, yakni: akidah, syariah, dan akhlak. Kedua, berbeda dari Kurikulum Tahun 2000, Kurikulum PAI Tahun 2002 mengindikasikan pergeseran paradigma dan perubahan materi secara radikal menjadi lebih dinamis, kontekstual, interdisipliner, dan responsif terhadap kondisi kekinian. Agama tidak lagi diposisikan sebagai seperangkat aturan normatif untuk memenuhi

²²⁷ Christin Septina Basani, “Kurikulum Nasional Yang Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi Dengan Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Untuk Menghasilkan Kualitas Manusia Yang Kompeten,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2015): 56–66, doi.org/10.28932/di.v7i1.709.

kebutuhan spiritualitas manusia. Tetapi agama diletakkan dalam konteks realitas yang selalu berubah, karenanya ajaran agama harus dinamis dalam merespon kondisi kekinian.

Kehadiran Kurikulum MKWU-PAI Tahun 2013 ini tidak berarti mengubah konteks dan konten mata kuliah PAI sebelumnya secara total. Justru kurikulum PAI generasi terakhir ini nyaris tidak merombak muatan kurikulum tahun 2002. Yang berubah secara ekstrem hanyalah strategi pembelajarannya yang sangat bertumpu pada kata-kata kunci berikut: Pendekatan Berbasis Proses Keilmuan (Scientific Approach), karakter pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa (Student Active Learning), proses membangun pengetahuan (Epistemological Approaches), dan orientasi pada aktivitas (Activity Base), bukan materi (Content Base).²²⁸

Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

1. **Prinsip relevansi;** secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).
2. **Prinsip fleksibilitas;** dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.
3. **Prinsip kontinuitas;** yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal.

²²⁸ N Fathurrohman, "Konsep Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Berbasis KKNi (Studi Implementasi Pembelajaran MKWU PAI Di UNSIKA)," *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 2, no. 1 (2018): 509–24, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1749>.

Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.

4. **Prinsip efisiensi;** yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. **Prinsip efektivitas;** yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.²²⁹

Dalam penyusunan kurikulum, yang sering dilakukan setelah diperoleh hasil dari analisis SWOT, tracer study, dan market signal adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan ke dalam mata kuliah yang selanjutnya dilengkapi dengan bahan ajarnya (dalam wujud silabus dan kelengkapannya) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun ke dalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS yang dipelajari, serta urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari.

Kurikulum semacam ini sering disebut kurikulum berbasis isi (content-based curriculum). Dalam hal ini, jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) atau tidak. Sedangkan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lulusan program pendidikan, dengan merumuskan terlebih dahulu profil lulusannya yang akan menggambarkan dari perumusan kompetensi lulusan, yang selanjutnya didukung oleh perumusan dan penentuan bahan kajian baik keluasan maupun kedalamannya.

²²⁹ Didiyanto Didiyanto, "Paradigma Pengembangan Kurikulum Pai Di Lembaga Pendidikan," *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2017): 122–32, <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.740>.

Penetapan kedalaman dan keluasan bahan kajian dibarengi dengan menganalisis hubungan antar kompetensi dan bahan kajian terkait, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan struktur kurikulum suatu program pendidikan. Jadi, kurikulum yang disusun berorientasi pada keinginan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan, dan ini yang dianut dalam penyusunan kurikulum mengacu KKNi.²³⁰

Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bermuara pada profil lulusan. Bagaimana lulusan yang berkiprah di bidang keahlian tertentu selepas menyelesaikan studi. Harapannya, mereka memiliki kompetensi memadai. Ilmu dari dalam kampus dapat diterapkan dalam dunia kerja. Dengan demikian penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman untuk :

- a. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan;
- b. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan
- c. Menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan
- d. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia Tim (2014).

Selain itu implikasi yang diharapkan dari penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ini adalah:

- a. Meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;

²³⁰ UIN Raden Fatah Palembang, *Pedoman Kurikulum Mengacu KKNi*, 2015.

- b. Meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. Meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia;
- d. Meningkatnya pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.²³¹

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M. Sayyidul, Khodijah Khodijah, and Dedi Setiawan. "Konsep Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Kompetensi Perspektif Muhammadiyah Di Perguruan Tinggi Agama Islam." *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership* 1, no. 1 (2023): 23–44. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i1.463>.
- Atiyah, N. "Model Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dan Perguruan Tinggi Umum." *Qathrunâ: Jurnal Keilmuan Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2018): 95–120. jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/qathruna/article/view/2970.
- Basani, Christin Septina. "Kurikulum Nasional Yang Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi Dengan Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Untuk Menghasilkan Kualitas Manusia Yang Kompeten." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2015): 56–66. doi.org/ 10.28932/di.v7i1.709.
- Budianto, Nanang. "Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum (Suatu Kajian Inter,

²³¹ Dwi Agustina Rahayu, "Implementasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa," *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 85–99, <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2519>.

Multi, Dan/Atau Transdisipliner).” *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2016): 97–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v7i1.6>.

Didiyanto, Didiyanto. “Paradigma Pengembangan Kurikulum Pai Di Lembaga Pendidikan.” *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2017): 122–32. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.740>.

Fathurrohman, N. “Konsep Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Berbasis KKNi (Studi Implementasi Pembelajaran MKWU PAI Di UNSIKA).” *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 2, no. 1 (2018): 509–24. journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/1749.

Firmansyah, Iman, Mokh. “Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi.” *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–90. ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/43562.

Haris, Abdul. “Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.” *Al Furqan: Study Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 63–81. ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alfurqan/article/view/3440.

Nurdin, Syfruddin. “Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNi Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Al-Fikrah* 5, no. 1 (2017): 21–30. [doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jaf.v5i1](http://dx.doi.org/10.31958/jaf.v5i1).

Palembang, UIN Raden Fatah. *Pedoman Kurikulum Mengacu KKNi*, 2015.

Rahayu, Dwi Agustina. “Implementasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa.” *ASANKA: Journal of Social Science And Education* 2, no. 1 (2021): 85–99. doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2519.

Rouf, Muhammad, Akhmad Said, and Dedi Eko Riyadi HS. “Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep,

Pengembangan, Dan Implementasi.” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 5, no. 2 (2020): 23–41. ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/106.

Selamet, Spiana, and Yuliati Zaqiah Qiqi. “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.” *Jurnal Mahajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 97–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v1i2.320>.

Sitika, Achmad Junaedi. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Humanistik Dan Teknologis Di Perguruan Tinggi Umum.” *Jurnal Wahana Karya Ilmiah* 3, no. 02 (2019): 364–84. journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/3162.

Suwadi. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Tinggi Mengacu KKNI-SNPT Berparadigma Interkoneksi Di Program Studi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 2 (2016): 223–52. [doi.org/https://dx.doi.org/10.14421/jpai.2016.132-08](https://dx.doi.org/10.14421/jpai.2016.132-08).

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



PERKEMBANGAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) DI INDONESIA²³²

PENDAHULUAN

Pendidikan selalu menjadi hal yang sangat krusial dan hangat dalam perbincangan masyarakat. Pendidikan juga menjadi sektor utama dalam pembangunan bangsa yang preferensinya adalah meningkatkan iman dan takwa serta memiliki akhlak mulia. Dalam UU No 20 Tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²³³ Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, maka diperlukan jalan menuju tujuan tersebut. Adapun dalam pendidikan dikenal dengan kurikulum.

Pendidikan agama Islam menjadi rangkaian mata pelajaran Islam yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga

²³² Atik Silvia

²³³ Dian Fitriana, Hasan Basri, and Eri Hadiana, "Hakikat Dasar Pendidikan Islam," *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2020): 143–50, doi.org/10.32923/tarbawy.v7i2.1322.

perguruan tinggi.²³⁴ Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mengenal, memahami, menghayati kemudian mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yakni al-Qur'an dan hadis.²³⁵

Seiring pergantian pemimpin, maka sering berganti pulalah kurikulum pendidikan di Indonesia. Dimulai dari kurikulum rencana pelajaran hingga yang saat ini dijalani yaitu kurikulum merdeka belajar. Pergantian kurikulum sebenarnya menjadi hal biasa karena dilakukan tidak lain agar pendidikan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Sehingga kurikulum yang diterapkan di Indonesia tidak stagnan dan mengalami perubahan demi kemajuan pendidikan.²³⁶

Menyikapi hal tersebut, maka kurikulum di perguruan tinggi agama Islam juga mengalami perkembangan. Kurikulum menjadi kebutuhan peserta didik berdasarkan anggapan dengan melihat keterkaitan antara kurikulum PAI di tingkat Perguruan Tinggi dengan kurikulum PAI di tingkat dasar dan menengah. Pengembangan kurikulum PTAI juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen perguruan tinggi serta dalam rangka mempersiapkan lulusan mahasiswa yang berjiwa imtaq serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi.²³⁷

Selain itu, Dilansir dari kotasemarang.kemenag.go.id, bahwa meskipun terjadi perubahan kurikulum agar tetap bisa menjaga konsistensi tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan akhir

²³⁴ Erwin Muslimin and Uus Ruswandi, "Tantangan, Problematika Dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71, <https://doi.org/DOI:47467/tarbiatuna.v2i1.652>.

²³⁵ Mokh Firmansyah, Iman, "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi," *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–90, <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/43562>.

²³⁶ M Asri, "Dinamika Kurikulum Di Indonesia," *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI* 4, no. 2 (2017): 192–202, <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/128>.

²³⁷ Ismail Makki, "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi," *Islamuna* 3, no. 2 (2016): 159–71, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v3i2.1150>.

dari Pendidikan Agama Islam ialah peserta didik memiliki akhlak yang mulia dan berkarakter.²³⁸ Dari berbagai persoalan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia beserta dinamika pendidikan di masa depan.

PEMBAHASAN

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang kemudian berubah menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Perbedaan diantara keduanya ialah dalam hal pendanaan. PTKIN hampir sepenuhnya didanai oleh pemerintah sedangkan PTKIS didanai oleh masyarakat.²³⁹

Sejak ditetapkan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa, yang kemudian disusul dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, dikalangan PTKI timbul perbincangan tentang model pengembangan kurikulum untuk merespon keputusan tersebut.

Maka, muncullah kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan dalam perguruan tinggi. Dalam konsep KBK di perguruan tinggi dijelaskan bahwa sumber belajar dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan dalam proses pembelajaran. Dosen bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, dan buku belajar bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Pada dasarnya, dalam pembelajaran KBK dosen tidak boleh bergantung pada buku pelajaran. Dosen dapat mencari bahan atau

²³⁸ Admin, "Perubahan Kurikulum, Tetap Jaga Konsistensi Tujuan Pendidikan Agama," 2022, <https://kotasemarang.kemenag.go.id/>.

²³⁹ Makki, "Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi."

sumber pembelajaran dari buku-buku referensi, kliping, media massa, lingkungan di sekitar peserta didik, pernyataan dari tokoh-tokoh serta isu-isu yang terbaru dan relevan dengan tujuan pembelajaran.²⁴⁰

Struktur kurikulum perguruan tinggi dalam KBK terdiri atas kurikulum inti dan institusional yang dikembangkan berdasarkan atas prinsip-prinsip belajar *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Mata kuliah-mata kuliah dalam kurikulum pendidikan tinggi dikelompokkan ke dalam lima kelompok atau elemen kompetensi, yaitu; mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah keahlian dan berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah berkehidupan bersama (MBB). Kelima elemen kompetensi tersebut merupakan ciri khas kurikulum perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini.²⁴¹

Selanjutnya Sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, maka sejak dikeluarkannya Perpres 08/2012 dan Permenristekdikti 44/2015 tentang KKNI dan SN-Dikti dalam mengembangkan kurikulum PTKI mengacu pada keduanya. Pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jendral Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang panduan pengembangan kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI):

Kesatu : Menetapkan Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

²⁴⁰ Euis Anih, "Manajemen Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi," *Jurnal Pendidikan Unsika* 3, no. 1 (2015): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/judika.v3i1.196>.

²⁴¹ Sulalah, "Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Di Perguruan Tinggi Agama Islam," *El-Qudwah* 4 (2006): 1–22, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2028>.

Kedua : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.”²⁴²

KKNI menjadi landasan bagi penyusunan kurikulum PTKI tidak hanya bertujuan mengubah nomenklatur menjadi UIN, namun juga mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dan meningkatkan kualifikasi pekerja domestik dan asing. KKNI sangat penting seiring perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis.²⁴³

Implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum PTAI menjadi sebuah keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTAI. Dalam buku panduan pengembangan kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-Dikti disebutkan tujuan-tujuannya sebagai berikut:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional.
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional.
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

²⁴² Keputusan Jendral Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 Tentang *Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, Hal. iv.

²⁴³ Rina Nirwana and Qolbi Khoiri, “Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi,” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 5266–78, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1266>.

4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman.
9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan.
10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional.
11. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia.
13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*).
14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.
15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.²⁴⁴

Dalam KKNI, kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNI bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran di jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berfungsi untuk menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.²⁴⁵

Selanjutnya, PTKI merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan fungsi dan peran sesuai yang diamanahkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dengan tugas utama yakni melaksanakan tridharma perguruan tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan tridharma PTKI ditujukan pada pengembangan kompetensi yang mampu mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, ilmu, dan kemajuan teknologi yang terus bergerak dinamis.²⁴⁶ Untuk menghadapi tantangan tersebut, PTKI juga menerapkan kebijakan baru Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam mengelola pelaksanaan pendidikan didalamnya termasuk kurikulum.

Program studi dalam MBKM harus mengembangkan kurikulum yang adaptif dan memberikan banyak pengalaman

²⁴⁴ Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SN-Dikti*, 2018, 3-4.

²⁴⁵ Khotibul Umam, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Islam Sinkronisasi Dengan Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)," *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 631-50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/ei.v10i01.2662>.

²⁴⁶ Ria Rizki Ananda, Ahmad Suradi, and Dwi Ratnasari, "Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)," *Islamika* 4, no. 3 (2022): 224-36, doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1868.

praktik bagi mahasiswa. Mahasiswa mempunyai hak untuk belajar di luar kampus dan dapat memilih salah satu dari model pembelajaran seperti pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian/riset, dan membangun desa/KKN, kegiatan wirausaha, studi independen, dan proyek kemanusiaan setara 40 sks (2 semester). Mahasiswa dapat pula mengambil program studi yang berbeda yang dapat dikonversi maksimal 20 SKS (1 semester). Perguruan tinggi harus dapat memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengambil program tersebut.²⁴⁷

Penerapan kurikulum MBKM pada PTKI diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK karena saat ini memasuki era revolusi industri 4.0, dinamika masyarakat memasuki era 5.0, serta banyaknya tuntutan dalam dunia industri. Kurikulum MBKM yang diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan pengembangan dari kurikulum MBKM yang sudah disusun oleh Kemendikbud. Proses pengembangan kurikulum MBKM pada PTKI tidak terlepas dari KKNI dan *Outcome Based Education* (OBE). Dalam konteks rancangan kurikulum pada PTKI, capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan yang menjadi keharusan sebagai karakteristik dari lulusan PTKI. Dengan demikian diharapkan lulusan dari perguruan tinggi keagamaan Islam dapat menunjukkan profil dan kualitas diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas. Kebijakan kurikulum MBKM di PTKI yang mana salah satu programnya adalah kegiatan mahasiswa belajar tiga semester di luar prodi maupun luar perguruan tinggi diharapkan dapat mengarahkan pola pikir mahasiswa agar lebih luas serta terbuka untuk merespon kebutuhan hidup abad 21.²⁴⁸

Penyusunan kurikulum MBKM pada PTKI harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

²⁴⁷ Denny Kodrat, "Mindset Mutu Manajemen Perguruan Tinggi Islam Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm)," *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 3, no. 1 (2021): 48–61, doi.org/https://doi.org/10.51482/almujaddid.v3i1.48.

²⁴⁸ Ananda, Suradi, and Ratnasari, "Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)."

1. Menentukan pola belajar.
2. Memperhatikan beban belajar.
3. Melakukan sebaran mata kuliah.
4. Membentuk kegiatan belajar.
5. Melakukan mekanisme pelaksanaan.
6. Melakukan kemitraan.

Mangasi Panjaitan mengutip dari Mukhlis mengemukakan beberapa dinamika program MBKM, diantaranya:

1. Perguruan tinggi harus merevisi struktur kurikulum untuk disesuaikan pada kebijakan merdeka belajar yakni penyusunan pedoman akademik termasuk didalamnya kalender akademik yang perumusannya menggambarkan teori dan praktek.
2. Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi lainnya baik dalam maupun luar negeri, pemerintah, BUMN, lembaga penelitian, perusahaan, dan sebagainya.
3. Melakukan penyesuaian instrumen pembelajaran seperti kontrak belajar, RPS, silabus, jurnal perkuliahan, format evaluasi pembelajaran, dan lain lain seiring dengan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar.²⁴⁹

Selain itu, tantangan bagi perguruan tinggi Islam dalam program MBKM apabila tidak mampu mengidentifikasi profil lulusan, tidak mempertajam visi dan misi perguruan tingginya serta tidak mengkalibrasi kurikulumnya secara lebih adaptif dan kreatif, bisa jadi perguruan tinggi Islam akan tertinggal jauh dengan perguruan tinggi umum. Dalam konteks pendidikan Indonesia yang secara eksplisit berorientasi pada kepentingan pasar dan mengesampingkan adab dan nilai inti pendidikan, nampaknya ini menjadi celah besar yang dapat diisi oleh perguruan tinggi Islam untuk menegaskan jati diri institusinya

²⁴⁹ Mangasi Panjaitan et al., "Persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi Terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 351–62, doi.org/10.36908/isbank.v7i2.394.

dalam mempromosikan desain sistem pendidikan Islam. Tentunya, masyarakat akan menerima secara baik, bila perguruan tinggi Islam dapat membuktikan kesuksesan hasil pendidikannya dari kompetensi profil lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain.²⁵⁰

KESIMPULAN

Jenjang pendidikan apapun tidak akan pernah terlepas dari kurikulum. Kurikulum menjadi jalan menuju tercapainya tujuan pendidikan. Dalam Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), kurikulum sebagai jembatan menuju terlahirnya mahasiswa yang berjiwa iman dan taqwa yang mampu beradaptasi dengan laju perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat. Kurikulum sesuai dengan perubahan dan pengembangan k13 muncul kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kemudian lahirlah keputusan pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dan selanjutnya Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai upaya responsif kampus terhadap dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dirancang dengan adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan dengan menetapkan capaian pembelajaran lulusan utama sebagai bidang keahlian utama dan dapat memilih bidang keahlian lain sebagai kompetensi pelengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “Perubahan Kurikulum, Tetap Jaga Konsistensi Tujuan Pendidikan Agama,” 2022. kotasemarang. kemenag.go.id/.
- Ananda, Ria Rizki, Ahmad Suradi, and Dwi Ratnasari. “Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus

²⁵⁰ Kodrat, “Mindset Mutu Manajemen Perguruan Tinggi Islam Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).”

- Merdeka (MBKM) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).” *Islamika* 4, no. 3 (2022): 224–36. <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i3.1868>.
- Anih, Euis. “Manajemen Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi.” *Jurnal Pendidikan Unsika* 3, no. 1 (2015): 1–21. doi.org/10.35706/judika.v3i1.196.
- Asri, M. “Dinamika Kurikulum Di Indonesia.” *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI* 4, no. 2 (2017): 192–202. www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/128.
- Firmansyah, Iman, Mokh. “Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi.” *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–90. doi.org/https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/43562.
- Fitriana, Dian, Hasan Basri, and Eri Hadiana. “Hakikat Dasar Pendidikan Islam.” *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2020): 143–50. doi.org/10.32923/tarbawy.v7i2.1322.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SN-Dikti*, 2018.
- Keputusan Jendral Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang panduan pengembangan kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), hal. iv. (n.d.).
- Kodrat, Denny. “Mindset Mutu Manajemen Perguruan Tinggi Islam Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM).” *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 3, no. 1 (2021): 48–61. [doi.org/https://doi.org/10.51482/almujaddid.v3i1.48](https://doi.org/10.51482/almujaddid.v3i1.48).
- Makki, Ismail. “Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi.” *Islamuna* 3, no. 2 (2016): 159–71. doi.org/10.19105/islamuna.v3i2.1150.

- Muslimin, Erwin, and Uus Ruswandi. "Tantangan, Problematika Dan Peluang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71. DOI: 47467/tarbiatuna.v2i1.652.
- Nirwana, Rina, and Qolbi Khoiri. "Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 5266–78. doi.org/10.31004/joe.v5i2.1266.
- Panjaitan, Mangasi, Ayu Dwidyah Rini, Lestari Agusalm, Zed Abdullah, Budhi Purwandaya, and Benny Pasaribu. "Persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi Terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 351–62. doi.org/10.36908/isbank.v7i2.394.
- Sulalah. "Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Di Perguruan Tinggi Agama Islam." *El-Qudwah* 4 (2006): 1–22. ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2028.
- Umam, Khotibul. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Islam Sinkronisasi Dengan Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)." *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 631–50. dx.doi.org/10.30868/ei.v10i01.2662.



PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)²⁵¹

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan “ruh” pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEKS, kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan. Perubahan kurikulum sebuah keniscayaan karena perkembangan IPTEKS yang sangat cepat tidak lagi memungkinkan dunia pendidikan berlama-lama dengan “zona nyaman” kurikulum yang berlaku.²⁵²

Respon terhadap perubahan kurikulum dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kebijakan tentang implementasi kurikulum 2013, lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang

²⁵¹ Rahmawati

²⁵² Maman Suryaman, “Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar,” *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, (2020): 13–28, ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/issue/view/956/.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Implikasi Kebijakan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pola perubahan kurikulum setiap program studi bahkan penyesuaian materi ajar (*content*) yang akan disampaikan kepada mahasiswa.²⁵³

Penerapan kurikulum dengan mengacu pada KKNI ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana individu atau lulusannya memiliki profil dan hasil belajar yang diharapkan dan akan dicapai.²⁵⁴ Mendikbud menjelaskan kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif.²⁵⁵

Demikian berdasarkan gagasan di atas, pemakalah bermaksud melakukan pembahasan yang berkenaan dengan konsep pengembangan kurikulum berbasis KKNI (kerangka kualifikasi nasional Indonesia).

PEMBAHASAN

A. Konsep Kurikulum Berbasis KKNI

Pada dasarnya konsep kurikulum berkembang, sejalan dengan perkembangan konsep pendidikan. Menurut Muhaimin konsep kurikulum tidak hanya dipahami dan dipandang sebagai kumpulan mata pelajaran, tetapi konsep kurikulum di pandang

²⁵³ Ahmad Fathoni, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI," *Al-Idarah Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2015): 76–91, doi.org/10.24042/alidarah.v5i1.755.

²⁵⁴ Ella Dewi Latifah et al., "Peranan Kurikulum Lptk Berbasis KKNI Di Perguruan Tinggi," *Al-Hasanah Islamic Religious Education Journal* 7, no. 1 (2022): 103–16, <https://doi.org/10.51729/7157>.

²⁵⁵ Imroatus Solikhah, "KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes," *Lingua Journal of Language, Literature and Teaching* 12, no. 1 (Maret, 2015): 1–22, <https://doi.org/10.30957/lingua.v12i1.68>.

dan meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah.²⁵⁶

Berbagai kegiatan di luar kelas juga mencakup dalam pengertian kurikulum. Kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.²⁵⁷

Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.²⁵⁸

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi

²⁵⁶ Syaiful Arif, *Pengembangan Kurikulum* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 2.

²⁵⁷ Annisa Mardhatillah et al., "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMA Muhammadiyah Tanah Grogot," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)* 2, no. 1 (2022): 1–17, <http://jipkl.com/index.php/JIPKL/article/view/6/8>.

²⁵⁸ Solikhah, *KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes*, 1–22.

yang tercakup dalam KJNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.²⁵⁹

Dapat penulis pahami mengenai konsep kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KJNI) adalah sebagai rancangan kualifikasi yang dapat menyamakan dan menyelaraskan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja untuk mengenali keterampilan kerja yang sesuai dengan struktur kerja industri yang berbeda dengan negara lain seperti pertukaran pelajar dan tenaga kerja yang bertujuan dapat lebih efektif terlaksana.

B. Deskripsi Jenjang KJNI

KJNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi yakni berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 deskripsi kesembilan jenjang kualifikasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

²⁵⁹ Fathoni, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis KJNI," 85.

Tabel 1. Uraian Jenjang Kualifikasi

Jenjang Kualifikasi	Uraian
<p>Deskripsi Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
<p>1</p>	<p>Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan faktual.</p> <p>Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.</p>
<p>2</p>	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>
<p>3</p>	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat,</p>

	<p>berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</p>
4	<p>Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</p> <p>Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.²⁶⁰</p>
5	<p>Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</p> <p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p> <p>Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.</p>

²⁶⁰ Elih Yuliah, "Standardization of Education Based on the Indonesian National Qualifications Framework Elih," *Tarbiyatu Wa Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam* 04, no. 1 (2022): 51–67, ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/jtt/article/view/159/148.

	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. ²⁶¹
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang

²⁶¹ *Ibid.*

	bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. ²⁶²
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.



Gambar 1.

Kurikulum berbasis KKNi dalam menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Berikut adalah gambar hubungan

²⁶² *Ibid.*

antara kualifikasi jenjang pendidikan formal 1-9 KKNi dengan pasar kerja sebagai pengguna.²⁶³

Dari gambar 1 di atas sudah jelas menggambarkan penyetaraan antara kualifikasi pendidikan formal dengan tingkat keahlian pada bidang pekerjaannya. Keterangan dari ke Sembilan jenjang tersebut adalah sebagai berikut: Lulusan sekolah dasar setara dengan jenjang 1; Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; dan Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

C. Langkah-Langkah Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi

1. Penetapan profil lulusan

Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri PTKI sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya ilmuwan muslim dan problem solver, dan sebagainya. Contoh: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai guru PAI walaupun dalam kenyataan lulusan Program Studi tersebut ada yang menjadi guru.

²⁶³ Kms Badaruddin, "Implementasi Kurikulum KKNi Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang," *Intizar* 27, no. 2 (2021): 137-43, <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10371>.

2. Penetapan capaian pembelajaran lulusan (CPL)

Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.²⁶⁴

Tabel 2. Rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SNPT	Lihat Lampiran SNPT pada permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Keterampilan Umum	Sesuai dengan SNPT	Lihat lampiran SNPT pada permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
3	Keterampilan Khusus	Sesuai dengan level KKNi dalam merumuskan keterampilan khusus	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNi	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012

3. Penetapan bahan kajian

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di PTKI adalah sebagai berikut:

- Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum

²⁶⁴ Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi Dan SN-Dikti Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018, 6.

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

- b. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. Jenjang Magister (S2) / Level 8: menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.
- d. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.²⁶⁵

4. Penentuan mata kuliah

Tabel 3. Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokkan Bahan Kajian

No	Bahan Kajian	Kelua- san	Kedala- man	Bobot	Nama Mata Kuliah	Beban Mata Kuliah
1	Teori Kurikulum	6	2	12	Pengembangan Kurikulum	68
2	Sejarah Kurikulum	4	2	8		
3	Model Kurikulum	8	3	24		
4	Implementasi Kurikulum	8	3	24		
Jumlah				68		
5	Teori media	2	2	4	Media Pembelajaran	40
6	Klasifikasi Media	6	2	12		
7	Pengetahuan Rancangan Media	8	3	24		

²⁶⁵ *Ibid.*

8	Teori Penilaian	2	2	4	Evaluasi Pendidikan	67
9	Penilaian Sikap	3	3	9		
10	Penilaian Pengetahuan	3	3	9		
11	Penilaian Keterampilan	3	3	9		
12	Penyusunan Instrumen Penilaian	12	3	36		
Jumlah					40	

Tabel 8 di atas, menggambarkan bahwa untuk mencapai CPL tertentu yaitu “Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah” membutuhkan 3 mata kuliah dengan bobotnya masing- masing. Mata kuliah yang muncul untuk CPL ini adalah Pengembangan Kurikulum, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pendidikan. Selanjutnya, penamaan mata kuliah yang lain disusun berdasarkan CP yang lain yang merupakan deskripsi lengkap dari unsur CP pada profil lulusan tertentu.²⁶⁶

5. Penetapan besaran sks mata kuliah

Tabel 4. Jumlah SKS Minimum Setiap Jenjang

No	Jenjang	Lama Studi Maksimum	Jumlah SKS Minimum
1	Sarjana S1	7 Tahun	144
2	Magister (S2)	4 Tahun	36

²⁶⁶ *Ibid.*

3	Doktor (S3)	7 Tahun	42
---	-------------	---------	----

Terkait dengan penentuan jumlah SKS secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum SKS keseluruhan dapat dihitung menjadi: $16,9 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 135,5 \text{ SKS}$ ditambah SKS layanan bimbingan skripsi 6 SKS dan KKN 3 SKS menjadi 144,5 SKS atau $19,06 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 152,5 \text{ SKS}$. Jika program studi menetapkan 144 SKS yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan SKS mata kuliah seperti tertera pada tabel 10 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total SKS yang harus ditempuh (144).

6. Penyusunan struktur kurikulum proses pembelajaran

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban SKS. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP. Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI, misalnya S1= 6..., S2= 8..., dan S3= 9 ... Tabel berikut dapat dijadikan contoh struktur mata kuliah.

7. Penilaian

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menurut Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Prinsip Edukatif** merupakan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan
- b. **Prinsip Otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- c. **Prinsip Objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- d. **Prinsip Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. **Prinsip Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.²⁶⁷

8. Penyusunan rencana pembelajaran semester.

Agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran/perkuliahan di kelas, maka silabus perlu dijabarkan/ dikembangkan menjadi Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat komponen; identitas RPS, capaian pembelajaran, indikatorcapaian pembelajaran, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar, kriteria dan bobot penilaian, dan daftar referensi.²⁶⁸

D. Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI

Menurut depdiknas, terdapat tiga strategi yang dianut dalam proses pengembangan KKNI. *Pertama*, strategi kesetaraan kualifikasi seseorang yang didapat dari pendidikan formal, informal, nonformal, dan juga pengalaman kerja. *Kedua*, KKNI juga mengakui kualifikasi dari pemegang ijazah yang akan bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar negeri, pertukaran pelajar dan pekerja lintas negara, atau para pekerja di Indonesia yang memiliki ijazah dari luar negeri. Dan yang *ketiga*, KKNI juga mengakui kesetaraan kualifikasi capaian pembelajaran berbagai bidang keilmuan pada tingkat pendidikan tinggi, baik melalui jalur akademik, vokasi, profesi, serta melalui

²⁶⁷ Kasman, "Konsep Dasar Evaluasi Dalam Kurikulum Berbasis KKNI," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2018): 555–70, doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.286.

²⁶⁸ Syfruddin Nurdin, "Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI Di Perguruan Tinggi," *Al-Fikrah* 5, no. 1 (2019): 22–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813>.

pengembangan karir yang terjadi di strata kerja, industri, dan asosiasi profesi.²⁶⁹

Demikian penulis melakukan analisis terhadap strategi dosen dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI untuk meningkatkan mutu pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pembelajaran yang dilakukan oleh dosen PAI

Dalam suatu perkuliahan, seorang dosen adalah manajer yang bertanggung-jawab untuk mengelola segala sumberdaya yang ada untuk tercapainya tujuan pembelajaran.²⁷⁰

Hal ini, berkaitan dengan LPM (Lembaga Penjamin Mutu) menjadi patokan dalam pembuatan RPS karena pembuatan RPS mengikuti panduan dari LPM. Kemudian, dalam pembuatannya, RPS sudah dibuat oleh masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang diampu serta berlandaskan pada kurikulum berbasis KKNI. Selanjutnya, penyusunan RPS lebih menekankan kepada analisis materi yang akan diajarkan kemudian memahami silabus yang ada yang disesuaikan dengan materi perkuliahan yang sejalan dengan waktu mengajar. Habis itu, barulah menganalisis pencapaian pembelajaran termasuk mengkompilasi referensi yang digunakan dalam pembelajaran.

2. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengembangkan minat serta keinginan yang baru, membangkitkan motivasi bahkan membawa pengaruh psikologis

²⁶⁹ Solikhah, "KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes." 5.

²⁷⁰ Lukman Ahmad and Muhammad Wali, "Perancangan Software Asisten Dosen Sebagai Media Dalam Pelaksanaan Computer Assisted Learning Di AMIK Indonesia Banda Aceh," *Smart Comp Jurnalnya Orang Pintar Komputer* 8, no. 1 (2019): 38–43, <https://doi.org/10.30591/smartcomp.v8i1.1316>.

terhadap pembelajaran.²⁷¹ Sehingga banyak cara yang bisa dilakukan dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media yang akan memancing semangat peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran.

3. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran

Metode pembelajaran adalah kondisi yang diciptakan oleh instruktur dengan disengajar seperti metode, sarana prasarana, materi, media dan sebagainya agar peserta didik difasilitasi, dipermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan.²⁷²

Metode yang biasa digunakan dosen PAI dalam mengajar sebagian besar dosen menggunakan metode tradisonal (ceramah, diskusi, tanya jawab) akan tetapi sebagian yang lainnya sudah menggunakan metode modern yaitu terkait dengan pendekatan-pendekatan yang modern yang mana terkait dengan model dan strategi dalam pembelajaran salah satu contohnya strategi yang banyak digunakan adalah *cooprative learning* yaitu setiap mahasiswa mempraktekkan langsung berbagai macam metode yang ada. Pembelajaran akan menjadi lebih menarik jika disampaikan dengan cara yang menarik juga sehingga pembelajaran akan mudah untuk dipahami.

4. Penyesuaian pembelajaran dengan mata kuliah yang dipelajari

Lingkungan belajar atau sumber belajar, dalam proses pembelajaran untuk penggunaan sumber belajar, yang pertama kali dilakukan siswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga meminta siswa untuk mereview, menganalisis serta mengobservasi pembelajaran ke sekolah-sekolah. Kedua sumber belajar yang utama, yaitu buku dan bahan ajar. Kemudian menggunakan masyarakat yaitu mahasiswa itu mampu

²⁷¹ Amelia Putri Wulandari et al., "Pentingnya Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3928–36, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1074>.

²⁷² Herdi Herdi and Kun Nurachadijat, "Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa," *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)* 1, no. 3 (2023): 180–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/alfihris.v1i3.315>.

mengaplikasikan atau mengimplementasikan setiap materi yang dipelajari di dalam kelas untuk dipraktikkan dibuat video yaitu sebagai bentuk pelaksanaan materi pembelajaran di kelas ketika dalam kehidupan sehari-hari melalui video, kemudian bahan ajar dari media internet seperti mencari video-video yang berkaitan dengan materi yang telah dibuat orang lain sebagai bahan referensi.

5. Evaluasi dalam proses pembelajaran

Evaluasi dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Hal ini berkenaan dengan ranah kognitif mengukur pengetahuan mahasiswa melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester tugas perkuliahan lainnya. Sementara, kedua ranah afektif yaitu ranah yang menilai tingkah laku peserta didik seperti yang berkaitan dengan sikap yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) tau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga dalam proses penilaian memiliki bagian-bagian tersendiri apa saja yang akan dinilai pada peserta didik.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. KKNI juga disebut penjenjangan yang melahirkan pekerjaan. Demikian halnya, implikasi yang diharapkan dari penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ini.²⁷³

- a. Meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan in internasional
- b. Meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional

²⁷³ Dwi Agustina Rahayu, "Implementasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa," *Journal of Social Science And Education* 1, no. 2 (2020): 85–99, doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2519.

- c. Meningkatkan mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia
- d. Meningkatkan pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Konsep kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) adalah sebagai rancangan kualifikasi yang dapat menyamakan dan menyelaraskan pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja untuk mengenali keterampilan kerja yang sesuai dengan struktur kerja industri yang berbeda dengan negara lain seperti pertukaran pelajar dan tenaga kerja yang bertujuan dapat lebih efektif terlaksana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 deskripsi kesembilan jenjang kualifikasi nasional, jenjang 1; Lulusan pendidikan menengah, jenjang 2; Lulusan Diploma 1, jenjang 3; Lulusan Diploma 2, jenjang 4; Lulusan Diploma 3, jenjang 5; Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana, jenjang 6; Lulusan Magister Terapan dan Magister, jenjang 8; Lulusan Doktor Terapan dan Doktor, jenjang 9; Lulusan pendidikan profesi.

Langkah-langkah penerapan kurikulum berbasis KKNI yaitu penetapan profil lulusan, penetapan capaian pembelajaran lulusan (CPL). penetapan bahan kajian, penentuan mata kuliah, penetapan besaran sks mata kuliah, penyusunan struktur kurikulum proses pembelajaran, penilaian, dan penyusunan rencana pembelajaran semester.

Strategi dosen dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI untuk meningkatkan mutu pendidikan pada program studi Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam antara lain Penyusunan rencana dan program pembelajaran, media, metode, penyesuaian pembelajaran dengan mata kuliah yang dipelajari dan evaluasi

Perlunya dukungan bagi pemerintah dan masyarakat sekitar untuk melakukan pengembangan kurikulum. Karena hal ini penting dilakukan mengingat kurikulum sebagai pemegang kendali terhadap proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlunya ada penelitian lebih lanjut kembali karena hasil penelitian ini hanya dilakukan secara konseptual, kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lukman, and Muhammad Wali. "Perancangan Software Asisten Dosen Sebagai Media Dalam Pelaksanaan Computer Assisted Learning Di AMIK Indonesia Banda Aceh." *Smart Comp Jurnalnya Orang Pintar Komputer* 8, no. 1 (2019): 38–43. doi.org/10.30591/smartcomp.v8i1.1316.
- Arif, Syaiful. *Pengembangan Kurikulum*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Badaruddin, Kms. "Implementasi Kurikulum KKNi Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang." *Intizar* 27, no. 2 (2021): 137–43. doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10371.
- Dewi Latifah, Ella, Muhamad Habaib, Lisnawati, Hendi Suhendraya Muchtar, and Rita Sulastini. "Peranan Kurikulum Lptk Berbasis KKNi Di Perguruan Tinggi." *Al-Hasanah Islamic Religious Education Journal* 7, no. 1 (2022): 103–16. https://doi.org/10.51729/7157.
- Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI. *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi Dan SN-Dikti Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018.
- Fathoni, Ahmad. "Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNi." *Al-Idarah Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2015): 76–91. doi.org/10.24042/alidarah.v5i1.755.
- Herdi, Herdi, and Kun Nurachadijat. "Metode Demonstrasi

- Dalam Meningkatkan Keterampilan Siswa.” *Jurnal Inspirasi Pendidikan (ALFIHRIS)* 1, no. 3 (2023): 180–99. doi.org/10.59246/alfihris.v1i3.315.
- Kasman. “Konsep Dasar Evaluasi Dalam Kurikulum Berbasis KKNI.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2018): 555–70. doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.286.
- Mardhatillah, Annisa, Elisa Novianur Fitriani, Siti Ma’rifah, and Adiyono. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMA Muhammadiyah Tanah Grogot.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)* 2, no. 1 (2022): 1–17. <http://jipkl.com/index.php/JIPKL/article/view/6/8>.
- Nurdin, Syfruddin. “Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI Di Perguruan Tinggi.” *Al-Fikrah* 5, no. 1 (2019): 22–30. dx.doi.org/10.31958/jaf.v5i1.813.
- Rahayu, Dwi Agustina. “Implementasi Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Civic Skill Mahasiswa.” *Journal of Social Science And Education* 1, no. 2 (2020): 85–99. doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2519.
- Solikhah, Imroatus. “KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes.” *Lingua Journal of Language, Literature and Teaching* 12, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.30957/lingua.v12i1.68>.
- Suryaman, Maman. “Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar.” *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 2020, 13–28. ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/issue/view/956/.
- Wulandari, Amelia Putri, Annisa Anastasia Salsabila, Karina Cahyani, Tsani Shofiah Nurazizah, and Zakiah Ulfiah. “Pentingnya Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar.” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3928–36. doi.org/10.31004/joe.v5i2.1074.
- Yuliah, Elih. “Standardization of Education Based on the

Indonesian National Qualifications Framework Elih.”
Tarbiyatu Wa Ta’lim *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 04,
no. 1 (2022): 51–67. [ejournal.staisyamsululum.ac.id/
index.php/jtt/article/view/159/148](http://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/jtt/article/view/159/148).



www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



Biodata Penulis



ROYHAIN IQBAL merupakan penulis pertama dalam buku ini dengan judul Organisasi kurikulum (struktur horizontal). Lahir di Pamekasan 06 April 1997. Ia berdomisili di Batulabang Akkor Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 lulusan Institut Agama Islam negeri Madura (IAIN Madura) Prodi PAI (2021). SMA Al-istbatiah Darul Ulum Banyuwangi (2015), MTS Nurul Sholah (2012), SDN Larangan Badung VI (2009). Disamping Pendidikan formal juga menjadi lulusan Pondok pesantren Nurul Sholah Batulabang Akkor Palengaan Pamekasan dan Darul ulum Banyuwangi Pamekasan. Profesi saat ini masih aktif di perguruan tinggi masih bernotabek sebagai mahasiswa sekaligus kordinator kelas A pasca sarjana IAIN madura. Penulis merupakan royhainiqbaliqbal@gmail.com



MOHAMMAD JUHRI merupakan penulis kedua dengan judul model pengembangan kurikulum ralph w. Tyler. Lahir di sampan pada tanggal 07 Desember 1996. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 Lulusan STAI Miftahul Ulum Pamekasan. (2015 - 2019), D1 multimedia : its surabaya (2015 - 2016), SMK Al Miftah Pamekasan (2013-2015), Smp Al Miftah Terpadu (2011-2013) dan SDN Tobai Barat II (2005-2011). Email: mohammadjuhri61@gmail.com



ALI NIZAR FADHOLI, lahir pada tanggal 14 Maret 1999 di Jl. Temenggungan kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan. anak ke 2 dari tiga bersaudara. Pertama, bernama Laily Alfiatur Rahmah dan yang saudara laki-lakinya yang bernama Hudan Alfian Rachmani. Dari pasangan Drs. A. faqhuddin dengan istrinya Dra. R.A. Hj. Charrijatur Rasjidah dia memiliki minat dan hobi yang lumayan besar dibidang kesenian. Pendidikan dasarnya dimulai di SDN Barurambat Kota VII Pamekasan, SMPN 2 Pamekasan dengan jurusan seni rupa. SMAN 3 Pamekasan dengan konsentrasi jurusan MIPA (Matematika IPA). S1 IAIN Madura pada tahun 2017 yang pada saat itu masih bernama STAIN Pamekasan. Di IAIN Madura dia sempat mengikuti UKM yang bertujuan untuk mengasah kemampuan seninya, namun bukan seni rupa seperti bakat pertamanya melainkan seni musik di UKM Musik. Tidak hanya musik dia juga aktif di beberapa organisasi intra kampus seperti HIMA Prodi yang telah berganti nama menjadi HMPS dan SENAT Mahasiswa Fakultas Tarbiyah pada tahun 2020 sebagai koordinator Undang-Undang dan aktif di berbagai komunitas luar

seperti Channel Youtube perfilm an MI Cinema Production sebagai ketua umum.



ACHMAD merupakan penulis ke Empat dalam buku ini dengan judul Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum 1. Lahir di Pamekasan 06 Januari 1982. Ia berdomisili di desa Palengaan laok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam (2023) S1 lulusan Institut Agama Islam (IAI AL-KHAIRAT) Pamekasan Prodi PAI (2010).

MA. Mambaul Ulum Bata-Bata (2004), MTs Nurussalam (1999), SDN Palengaan Laok III (1996) Disamping Pendidikan formal juga menjadi lulusan PP.Bustanul Ulum Sabajeruk Kec. Palengaan Kab. Pamekasan (1990-1999) & PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Kec. Palengaan Kab. Pamekasan (2000-2006). Profesi saat ini menjadi guru/pengajar di Lembaga Pendidikan SMK Al-Gaffar Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Penulis bisa dihubungi melalui: achmadpmk67@gmail.com

ncetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



DIDIK ANDRIYANTO merupakan salah satu penulis ke Lima dalam buku ini dengan judul Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum 2. Lahir di Pamekasan 15 Juni 1990. Yang berdomisili di Desa Branta Tinggi Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Prodi PAI (2016). Diploma II Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) 2016. MA. Al-Falah Tlanakan

(2010), SMP Negeri 1 Tlanakan (2007), SDN Baddurih (2002). Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BEM di Politeknik Negeri Malang (2014-2016). Profesi saat ini sebagai guru/pengajar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sumber Anyar Larangan Tokol Tlanakan Imel: didik.andriyanto567@gmail.com



MULYADI merupakan penulis ke Enam dalam buku ini dengan judul Jenis - Jenis Kurikulum. lahir di pamekasan pada tanggal 07 januari 1997, bisa dipanggil Adi anak dari bapak Moh Horrih dan Ibu Sitti Aisyah, merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, penulis memulai pendidikan di SDN plakpak 5 selanjudnya penulis melanjutkan pendidikan di PP. Ummul Quro Pangaporan Plakpak Pegantenan Pamekasan di MTS

Ummul Quro dan MA Ummul Quro, Pada tahun 2017 melanjutkan studi keperguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu STAIN Pamekasan yang sekarang berganti menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Profesi saat ini menjadi guru/pengajar di Lembaga Pendidikan Ummul Quro Assuyuty Pangaporan Plakpak Pegantenan Pamekasan, Penulis bisa dihubungi melalui: adi679198@gmail.com



SYAFIYQUN FAWWAZ adalah sebuah nama yang di berikan Oleh Orang Tua Penulis dengan Sowan Kepada Para Muassis Ulama Kala Itu, untuk nama panggilan banyak versi yang bisa dipanggil, bisa denga panggilan Syefi (Murni dari Orang Tua), Fawwaz (Murni panggilan teman-teman di Kampus), atau fi... panggilan yang sering di gunakan oleh Guru penulis di pesantren, kami

merupakan penulis ke delapan dalam buku ini dengan judul Evaluasi Kurikulum. Lahir di Pamekasan 27 November 1998. Ia berdomisili di Dsn. Utara 1 Desa Toronan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 lulusan Institut Agama Islam Negeri Madura lulus tanggal 05 April 2021). Menempuh Pendidikan Menengah Atas di MA Darul Akhlaq (2017), MTs Darul Akhlaq (2014), MI Darul Akhlaq (2011) dan TK Darul Akhlaq (2005). Profesi saat ini masih Santri Aktif di PP Darul Akhlaq Toronan Pamekasan, sekaligus mengabdikan dengan menjadi guru/pengajar di Lembaga Pendidikan Darul akhlaq (MI Darul Akhlaq, Madrasah Diniyah Darul Akhlaq) Dsn Tengah Desa Torona Pamekasan. Untuk Konfirmasi lebih lanjut Penulis bisa dihubungi melalui: syefisyamilah27@gmail.com



MOH. HASIBUDDIN merupakan salah satu penulis dalam buku ini dengan judul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Lahir di Pamekasan 07 Oktober 1996 putra dari pasangan Bpk Samnawi dan Ibu Sutima (Almh). berdomisili di Desa Potoan Daya Kec. Palengaan Kab. Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1

lulusan Institut Agama Islam negeri Madura (IAIN Madura) Prodi HES (2021). SMA Al-istbatiah darul ulum Banyuwang (2015),

MTS Darul Ulum Banyuanyar (2012), SDN Potoan Daya I (2009). Disamping Pendidikan formal juga menjadi lulusan Pondok pesantren Puncak Darus Salam palengaann Pamekasan dan Darul ulum Banyuanyar Pamekasan. Profesi saat ini masih aktif di perguruan tinggi sebagai mahasiswa pasca sarjana IAIN madura. Penulis mohhasibuddin@gmail.com



MUHAMMAD merupakan penulis ke 10 buku ini dengan judul peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. lahir di Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang 12 Maret 1976. Riwayat pendidikan S2 IAIN Madura, lulusan S1 STAI YPBWI Surabaya, SMA Paket C Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, MTs Miftahul Ulum Sidogiri Kabupaten Pasuruan, MI Miftahul Ulum Sidogiri Kabupaten Pasuruan. Penulis bis dihubungi melalui muhammadmutiara7@gmail.com

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah



MAHFIDA INAYATI merupakan penulis ke Sebelas dalam buku ini dengan judul Evaluasi Kurikulum. Lahir di Pamekasan 3 Juli 2000 dari pasangan bapak Moh Sodik dan ibu Lilik Suwarni. Ia berdomisili Ds.Larangan Dalam Kec. Larangan Kab. Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 lulusan Institut Dirosat Islamiyah Al Amien (IDIA) Sumenep Prodi PAI (2022). SMK Al Imron Jurusan RPL (2018), SMP Miftahus Sa'adah (2015), SDN Larangan Dalam II (2012) dan TKQ Miftahul Qulub (2006). Disamping Pendidikan formal juga menjadi lulusan Pondok pesantren Nurul Huda Al Imron Sumenep (2012-2022). Profesi saat ini menjadi guru/pengajar di

Lembaga Pendidikan Al Imron (MI dan SMK Al Imron serta MDT Nurul Huda) Pakamban Laok Pragaan Sumenep. Penulis memiliki beberapa karya baik cetak (buku) maupun yang terpublish, bisa mengunjungi google scolar “Mahfida Inayati” dan bisa melalui: mahfidainayati99@gmail.com



SHERLY QURAISSY adalah susunan kalimat yang tertulis pada bab ke-12 dalam buku ini dengan judul “Perkembangan Kurikulum PAI di Sekolah Indonesia. Pemilik nama tersebut dilahirkan oleh sepasang manusia yang saling mencintai, tepatnya di kota Sampang 15 Juni 1998. Ia berdomisili di Dsn. Pesisir Barat Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang. Pada saat ini, Sherly sedang menempuh Pendidikan S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 lulusan Institut Dirosat Islamiyah Al Amien (IDIA) Sumenep Prodi PBA (2021). SMA TMI Al-Amien Prenduan (2017), SMPN 1 Camplong (2013), SDN Tambaan I (2010) dan TK Dharma Wanita (2005). Penulis bisa dihubungi melalui: quraisysherly98@gmail.com

hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



ZAINAB NURLAILI merupakan penulis ke tiga belas, lahir di Blitar pada tanggal 16 Mei 2000. Biasa dipanggil dengan sebutan Nana. Anak ke 4 dari pasangan Alm.Bapak Syafi’I Abdullah dan Ibu Fadhilatur Rahmah. Juga merupakan anak dari Taufiqur Rahman dan Ibu Mazdalina Rahmawandari Nurhani. Penulis menempuh pendidikan di SDN Tanjung III lulus tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan di MTSN 1 Pamekasan lulus tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan ke SMA An-Nur Bululawang Malang. Pada tahun 2018 melanjutkan studi keperguruan tinggi di

Institut Agama Islam Negeri Madura dan lulus pada tahun 2022, kemudian penulis langsung melanjutkan studi S2 di tempat yang sama. Karya inilah yang merupakan bentuk fisik sebagai tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pasca sarjana Pendidikan Agama Islam di IAIN Madura.



FAUZATUL JANNAH merupakan penulis keempat belas lahir di Pamekasan tanggal 25 Oktober 1999. Penulis memulai pendidikan dari Tk Al Hidayah. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar di SDN TANJUNG 1, dilanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di MTsN Pademawu. Kemudian melanjutkan ke tingkat menengah atas di MAN 2 Pamekasan. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah tinggi agama islam Negeri (STAIN) pamekasan, yang sekarang sudah berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Saat ini penulis menempuh jenjang Pascasarjana (S2) prodi Pendidikan Agama Islam di IAIN Madura. Penulis juga mengajar di salah satu lembaga pendidikan Madrasah Al Hidayah di Desa Tanjung Kec. Pademawu.



ATIK SILVIA merupakan penulis ke Limabelas dalam buku ini dengan judul Perkembangan Kurikulum PTAI di Indonesia. Tempat lahir Pamekasan 12 Desember 1998. Ia berdomisili di Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan. Ia memulai pendidikan pertamanya sejak berumur 5 tahun di RA As-Syahidul Kabir I (2005) dan melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Pamaroh I (2011). Kemudian melanjutkan belajar agama di Pondok Pesantren As-Syahidul

Kabir Blumbungan Larangan Pamekasan dibawah asuhan KH. M. Mundzir Cholil sekaligus menempuh pendidikan formal di MTs al-Ula I (2014) dan MA al-Islamiyah I (2017) dibawah naungan lembaga tersebut. Selanjutnya, ia memutuskan untuk belajar program Strata 1 PAI di Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) dan menyandang status santri di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik (2022). Pendidikan yang ditempuh sekarang Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam. Profesi saat ini menjadi guru/pengajar di Lembaga Pendidikan MTs Al-Ula I sekaligus di PP MTQ As-Syahidul Kabir. Penulis bisa dihubungi melalui: sevisilvia97@gmail.com



RAHMAWATI merupakan penulis ke enam belas dalam buku ini dengan judul Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI. Lahir di Sampang 2 Agustus 1999. Ia berdomisili di Dusun Taman Desa Ragung Kec. Sampang. Pendidikan yang ditempuh saat ini S2 Pascasarjana IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam, S1 lulusan IAIN Madura Program Studi Pendidikan Agama Islam (2021). SMA Negeri 1 Tojun Sampang (2017), SMP Negeri 2 Pangarengan Sampang (2014), SDN Ragung 4. Profesi saat ini menjadi guru/pengajar di Lembaga Pendidikan SMK Miftahul Ulum Pekalongan Sampang. Ia juga sebagai penulis dari buku berjudul ofNafas Rasa dalam Kata dan Bunga Rampai Konsep Pendidikan Perspektif Al-Judah Al-Syamilah Fii Al-Ta'lim. Penulis bisa dihubungi melalui: irahmawati043@gmail.com